



Rangrang
education

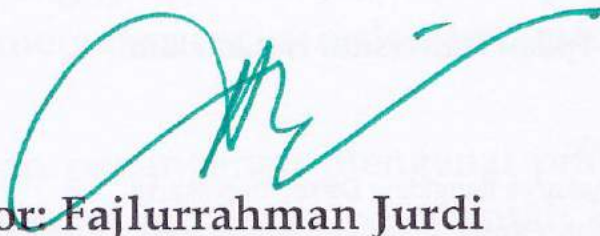
KEJAHATAN KORUPSI



Editor
Fajlurrahman Jurdi

KEJAHATAN KORUPSI

KEJAHATAN KORUPSI



Editor: Fajlurrahman Jurdi

Diterbitkan atas kerjasama:
Garda Tipikor Universitas Hasanuddin
dan Rangkang Education
2016

KEJAHATAN KORUPSI

© Garda Tipikor Universitas Hasanuddin

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama: Mei 2016

xii + 220 hlm, 14 cm x 21 cm

ISBN: 978-602-7793-37-8

Penulis : Tim Garda Tipikor
Editor : Fajlurrahman Jurdi
Perancang Sampul : Kuning
Penata Letak : Rangkang Room Corner A

Diterbitkan atas kerjasama
Penerbitan

Rangkang Education, Yogyakarta

Telp. 081 22 77 40007

rangkang_education@yahoo.com,

dengan

Garda Tipikor Universitas Hasanuddin

Pencetak:

Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta

Jl. Wates Km 4, Tegalyoso, Banyuraden, RT 02/RW 07 No. 65

Sleman, Yogyakarta (55293)

Telp. 081 22 77 40007

e-mail: rangkang_education@yahoo.com

PENGANTAR
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Korupsi merupakan suatu kejahatan sekaligus penyakit yang sedang menjangkiti bangsa Indonesia saat ini. Tidak tanggung-tanggung akibat dari kejahatan ini, timbul berbagai kesenjangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Didalam perkembangannya, praktik-praktik korupsi mulai menampakkan diri sejak masa pemerintahan Belanda yang saat itu mendirikan perserikatan dagang yang disebut dengan VOC (Verenigde Oostindische Compagnie). Perserikatan ini pertama kali terbentuk pada tahun 1602, namun akhirnya bangkrut dan bubar pada 1799 karena maraknya praktik korupsi yang dilakukan oleh para pegawainya. Bukan hanya sampai disitu penyakit ini ibarat kanker yang sudah menyebar dan tumbuh subur dalam diri bangsa Indonesia. Hingga pada akhir abad ke-19 atau tepatnya pada tahun 1998 tuntutan akan reformasi yang mengidealkan hilangnya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) memaksa rezim orde baru untuk bubar dan runtuh.

Dalam tataran penanganan mengenai praktik dan tindak pidana korupsi ini, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang secara positif, dituangkan dalam Undang-Undang no. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang no. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam kenyataannya, penanganan praktik tindak pidana korupsi tidaklah efektif jika hanya mengandalkan regulasi yang notabene-nya

bersifat menindak(*hard approach*). Dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang lebih halus dan mengandalkan semua kalangan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Upayaupaya preventif (*soft approach*) dapat dilakukan dengan mengandalkan kelas-kelas menengah, yang salah satunya adalah mahasiswa.

Peran mahasiswa tentu sangat dibutuhkan mengingat mahasiswa merupakan pelopor perubahan (*agent of change*). Dalam hal pengimplementasian dari fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, Mahasiswa harus mampu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Apalagi dalam upaya melawan korupsi haruslah melibatkan seluruh komponen bangsa secara sistematis sebab kita mengenal korupsi sebagai tindak pidana yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Terlepas dari itu semua, saya sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mengapresiasi dan menyambut baik penerbitan buku ini. Karya otentik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang peduli akan gejala sosial yang ada disekitarnya menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Semoga dengan terbitnya buku ini mahasiswa-mahasiswa di seluruh nusantara bisa semakin kritis dalam menganalisis gejala sosial yang ada disekitar mereka.

Makassar, 10 Mei 2016

Prof. Dr. Farida Patittingi., SH., M.Hum

PENGANTAR

Melihat fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini, praktik bernegara telah terinfeksi virus-virus Korupsi. Terbukti, dengan keadaan sumber daya alam yang berlimpah akan tetapi kesenjangan justru terjadi dan malah semakin melebar. Yang paling miris adalah, masyarakat justru menganggap praktik kecurangan-kecurangan itu sebagai hal biasa dan diperparah oleh sikap apatis dan pragmatisme para Mahasiswa yang hanya berani berteriak tapi tidak dapat berbuat apa-apa, seakan ke-Maha-an yang ada, berganti menjadi "Pecundang" dan mutlak tersemat pada mereka. Mahasiswa seakan lupa akan tugas mereka, bingung akan apa yang harus dan perlu dilakukan, bahkan mungkin tidak tahu hakikat dari Mahasiswa itu sendiri. Untuk itu, Garda Tipikor berinisiatif untuk mencurahkan pemikirannya dalam bentuk tulisan. Aksi literasi yang kami lakukan ini adalah sebagai bentuk perhatian akan pengkhianatan yang dilakukan para pemilik sebahagian hak warga Negara Indonesia, yang menghabiskan uang rakyat untuk berzina, untuk membahagiakan keluarga mereka yang hina, dan untuk membesarkan anak mereka yang mengalir darah haram dalam dirinya. Kami berfikir bahwa, jikalau belum bisa menyentuh sistem yang ada, paling tidak kami dapat mencoba untuk membuka pikiran semua elemen masyarakat Indonesia melalui karya ini, dan menyadarkan bahwa kita semua adalah korban Korupsi. Semua ini tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk perlawanan terhadap kesewenangan yang terjadi. Dengan kata lain, kami mengajak semua kalangan masyarakat untuk bangkit melawan, berhenti untuk bungkam atas pengkhianatan ini,

atas ketidakadilan ini, serta menyadarkan diri bahwa penjajahan jilid II sedang berlangsung dimana pelakunya bukan oleh para asing, tetapi oleh manusia bertopeng kemunafikan dalam memanfaatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk kepentingan keturunan mereka yang mengaku sebagai saudara sebangsa dan setanah air.

Kehadiran karya ini merupakan bentuk kegelisahan teman-teman yang aktif dalam berlembaga di Garda Tipikor. Sebab, selain metode pergerakan yang telah dilakukan, kami menganggap bahwa pengembangan budaya literasi adalah hal yang perlu diperhitungkan dalam upaya mengawal pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, dengan pergerakan ini kami berhaiap agar apa yang kami suarakan dalam aksi literasi ini, sejnua kalangan dan elemen-elemen yang ada dalam sistem dapat lebih mengerti serta sadar akan bahaya yang ditimbulkan akibat perilaku koruptif. Selain itu, karya ini semoga dapat menjadi stimulan bagi seluruh pihak terkhusus kalangan mahasiswa sebagai patron pergerakan menuju perubahan.

Pemberantasan Korupsi atau Mali, sampai Mati, harga Mati!

Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!

Makassar, Mei 2016

Ketua Umum Garda TIPIKOR UNHAS

Muh. Fazlurrahman K.

DAFTAR ISI

Pengantar

Prof. Dr. Farida Patittingi., SH., M.Hum

(Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) v

Muh. Fazlurrahman K.

(Ketua Umum Garda TIPIKOR UNHAS) vii

Daftar Isi ix

BAB I

KONSEP KORUPSI DI INDONESIA 1

A. Definisi Tentang Korupsi 1

B. Dinamika Sistem Sosial Masyarakat dan Potensi Korupsi 10

C. Struktur dan Pola Pemikiran Masyarakat Indonesia Terhadap Korupsi 18

BAB II

KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN

KELAS MENENGAH 23

A. Kekayaan Negara Yang dikuasai Kapitalis 23

B. Konspirasi Penguasa Dan Kapitalis 34

C. Propaganda Penguasa Terhadap Rakyat 47

D. Tertidurnya Kelas Menengah Dan Butanya Masyarakat 57

BAB III

PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI

SISTEM HUKUM.....	69
A. Korupsi Kekuasaan Sebagai Suatu Kejahatan.	69
B. Konsep Lawrence M. Friedman Tentang Sistem Hukum.....	74
C. Penataan Sistem sebagai Langkah Awal Pemberantasan Korupsidi Indonesia	84
D. Korupsi sebagai <i>Extra Ordinary Crime</i>	105
E. Efektivitas Hukum Sebagai Akibat Dari Penguatan Sistem Hukum	108

BAB IV

MAHASISWA DENGAN FUNGSI

PENCEGAHAN KORUPSI	117
A. Konsep Pergerakan Menuju Perubahan.	117
B. Pengembalian Fungsi Mahasiswa untuk Mencegah Korupsi.....	125
C. Membangunkan Mahasiswa Dari Sifat Hedonisme	131
D. Pentingnya Lembaga Kemahasiswaan Yang Berorientasi Pada Tindak Pidana Korupsi.....	137
E. Tuntutan Lembaga Mahasiswa Abad Ini	142

BAB V

KORUPSI SEBAGAI AKIBAT KURANGNYA PENDIDIKAN MORAL

DAN ETIKA	145
A. Pendidikan Moral Sebagai Upaya	145

B. Pencegahan Korupsi.....	145
C. Pengajaran Moral Dan Etika Sebagai Bentuk Penguatan Karakter Bangsa	149
D. Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Berbasis Moral Dan Etika.....	154

BAB VI

KORUPSI SEBAGAI MUSUH BERSAMA.....	161
A. Korupsi Sebagai Musuh Bersama	166
B. Korupsi Sebagai Musuh Bersama	170
C. Mencabut Akar Korupsi.....	171
D. Korupsi dan Penghianatan Konstitusi	173
E. Korupsi sebagai Musuh Bersama.....	17
F. Sturkturalisasi Pemberantasan Korupsi.....	181
G. Korupsi Tak Kunjung Padam.....	185
H. Korupsi Musuh Kita Bersama.....	192
DAFTAR PUSTAKA	195
INDEKS	201
BIODATA PENULIS.....	205

BAB I

KONSEP KORUPSI

DI INDONESIA

"Tuhan menurunkan akal adalah untuk mengentas manusia dari kesengsaraan batin dan material sekaligus menciptakan suasana damai dalam jiwa"

(Muhammad Reza Murti)

A. Definisi Tentang Korupsi

Dewasa ini, selain kata "miskin", kata yang selalu menjadi topik permasalahan dalam realitas bangsa khususnya bangsa Indonesia adalah kata "korupsi". Sudah selayaknya korupsi masuk dalam jajaran permasalahan klasik bangsa Indonesia. Kalau kemudian kemiskinan adalah *"the oldest social problems"*, maka korupsi barangkali boleh juga dikatakan sebagai *"as old as the organization of powers"*. Ada sebuah jurnal asing yang mengatakan bahwa *corruption is way of life in Indonesia*, yang berarti bahwa korupsi telah menjadi pandangan dan jalan kehidupan bangsa Indonesia. Kenyataannya, perbuatan korupsi telah menjalar dalam berbagai sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia dan bisa dikatakan bahwa korupsi bukan hanya telah menjadi budaya dalam kehidupan bangsa namun juga telah melembaga. Dapat dipastikan bahwa hampir secara keseluruhan lembaga-lembaga negara telah mengalami proses institusionalisasi sehingga jauh dari kata bebas dari penyakit korupsi.

Korupsi dalam sejarah hidup Nabi Muhammad SAW disebut *gulul*, yaitu perilaku menyimpang, terutama penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang berpangkat dalam bentuk penyalahgunaan jabatan. Sementara kalau ditelusuri, kata "korupsi" yang berasal dari kata *corruptio* atau *corruptus* (Latin) sebenarnya sudah dipakai sejak zaman para filsuf Yunani Kuno. Aristoteles misalnya, memakai kata itu dalam judul bukunya *De Generatione et Corruptione*. Dalam pemahaman Aristoteles, kata korupsi yang ditempatkan dalam konteks filsafat alamnya lebih berarti perubahan tapi bersifat negatif. Dalam arti ini secara semantis kata korupsi masih jauh dari kata kekuasaan terutama uang.¹ Pendapat lain mengemukakan, bahwa kata korupsi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu "corrupt", yang berasal dari perpaduan dua kata bahasa latin yaitu *corn* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol. Secara harfiah korupsi berarti kebusukan, „ikeburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian. Kata kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan, sementara dalam bahasa Indonesia kata korupsi berarti perbuatan buruk. Seperti penggelapan uang, penyuapan, dan sebagainya.

Jhon A. Gridiner dan David J.Olson dalam bukunya "*Theft of The City Reading in Corruptio in urban Amerika*" berusaha memberikan arti umum tentang korupsi dari berbagai sumber dengan klasifikasi antara lain;²

¹ Al-Andang L Binawan, *Korupsi Kemanusiaan: Menafsirkan Korupsi Dalam Masyarakat*, Jakarta: Kompas, 2006, him. xii

² M Akram, *Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Atas Dasar Perintah Jabatan Yang Sah*. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tidak

Dari sudut pandang teori pasar, Jacob van Klaveren bahwa seorang pengabdian negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, dimana pendapatannya diusahakan semaksimal mungkin.

Dari sudut pandang yang menekankan pada jabatan pemerintahan, Bayley mengemukakan bahwa korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi untuk kepentingan pribadi.

Dan sudut pandang kepentingan umum, Carl J. Friesrich, mengatakan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seseorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggungjawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan dalam undang-undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian sangat membahayakan kepentingan umum.

Dan sudut pandang politik, Theodora M. Smith, dalam tulisannya "*Corruption Tradition and Change Indonesia*" mengatakan:

"secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada masalah ekonomi. Hal tersebut menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya. Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok

elite."

*Dari sudut pandang sosiologi, jika kita melihat uraian Syeid Hussein Alatas dalam bukunya "The Sociology of Corruption" yang antara lain menyebutkan bahwa korupsi terjadi apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik. Sesungguhnya istilah itu sering pula digunakan pada pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri.*³

Samuel P. Huntington mengemukakan bahwa korupsi adalah penyakit demokrasi dan modernitas. Pernyataan ini menyiratkan, bahwa pandangan mengenai korupsi masih belum bersifat luas sebelum sistem demokrasi dan modernisasi itu ada.⁴ Rose Ackerman mendefinisikan korupsi sebagai pembayaran ilegal kepada pejabat publik untuk mendapat keuntungan disertai absennya pertumbuhan. Jhonston mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran dan sumber daya publik atau penggunaan bentuk pengaruh politis yang tidak terlegitimasi, yang dilakukan oleh pihak publik ataupun swasta.

³ Martiman Prodjohmidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Bandung: CV Mandar Maju, 2001, hlm. 8.

⁴ Chaeruddin, dkk, *Strategis Pencegahan dan Pengakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Cet. I*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 2.

Sementara itu, dalam kamus Meriam-Webster, mendefinisikan korupsi sebagai: 1. Rusaknya integritas, nilai dan prinsip moral, 2. Pembusukan, 3. Induksi terhadap cara yang tidak benar dan melanggar hukum seperti suap, dan 4. Tindakan tidak pantas dan biasanya melanggar hukum untuk mengamankan keuntungan bagi diri sendiri dan orang lain. Merujuk pada pandangan ini, bila dalam suatu komunitas telah menganggap perilaku korup sebagai sesuatu hal yang lumrah dan kesadaran hukum yang kurang sehingga dapat diterima pada komunitas itu, maka dapat dipastikan pula bahwa perilaku korup akan semakin mengakar dan membudaya dan hanya akan menjadi angan-angan dalam pemberantasan.

Robert Klittgard mengajukan rumus sederhana yaitu:

$$C = D + M - A \text{ -- Atau}$$

$$Corruption = Discretion + Monopoly - Accountability.$$

Korupsi mengandung unsur-unsur: melawan hukum/melanggar hukum; menyalahgunakan kewenangan/kesempatan/sarana yang ada pada pelaku korupsi karena jabatan/ kedudukannya (*abuse of power*); kerugian keuangan/ kekayaan/ perekonomian negara; dan memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi.

Baharuddin Lopa, mengemukakan korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi di bidang materil, sedangkan korupsi di bidang politik dapat berwujud berupa

manipulasi pemungutan suara engan cara penyuapan, intimidasi, paksaan dan/ atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan dalam memilih.⁵

Sudarto, mengemukakan bahwa perkataan korupsi semula bersifat umum dan baru menjadi istilah yuridis untuk pertama kali dipakai dalam Peraturan Penguasa Militer. Dalam peraturan ini korupsi diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan oelh siapapun baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau badan yang secetra langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan petekonomian negara⁶.

Makna korupsi berkembang dari waktu ke waktu, berkembang sesuai dengan representasi perilaku masyarakat yang menyimpang, dimana semula istilah korupsi merupakan istilah yang banyak dipakai dalam ilmu politik, kemudian menjadi sorotan berbagai disiplin ilmu sesuai dengan konteks perkembangan peradaban.

Sementara secara yuridis,pemahaman Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Korupsi adalah perbuata secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi adalah : 1. Secara melawan hukum; 2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain; dan 3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Secara melawan hukum artinya

⁵ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2001, hlm. 6.

⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*,Bandung: Alumni, 2007,h1m. 115.

meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Korupsi dapat dikategorikan sebagai kasus yang bersifat insidental dan sistemik dengan pola yang terstruktur, sistematis, dan masif. Adapun menurut skalanya, korupsi dapat pula berupa *grand corruption*, *petty corruption* dan *political corruption*.

Grand Corruption merupakan bentuk korupsi yang paling berdampak luas dan negatif. Bentuk korupsi yang satu ini biasanya dapat dilacak dalam kegiatan pemerintah tingkat tinggi yang mendistorsi kebijakan-kebijakan atau fungsi sentral negara, dan memungkinkan para pemimpinnya untuk mendapat keuntungan dengan mengorbankan masyarakat luas.

Petty Corruption merupakan korupsi kecil-kecilan yang merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di level bawah dan menengah dalam keseharian interaksinya dengan warga biasa, yang kadang mencoba mengakses pelayanan dasar seperti rumah sakit, sekolah, kantor polisi, dan lembaga negara lainnya.

Serta *Political Corruption* merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dengan cara memanipulasi kebijakan, lembaga, dan aturan atau prosedur, terkait dengan alokasi sumber daya dan pembiayaan, yang dilakukan oleh pembuat kebijakan demi terus mempertahankan kekuasaan, status dan kekayaannya.

Pendefinisian mengenai korupsi cukuplah banyak dan tentunya masing-masing definisi korupsi memiliki nuansa yang berbeda. Salah satu definisi yang cukup menarik yakni the *GOPAC Handbook on Controlling Corruption*, dalam buku itu dikatakan

"korupsi dipandang sebagai penyalahgunaan ykuasaan (wewenang) publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang menjadi gantungan kesetiaan. Korupsi terjadi bila seorang pejabat publik menerima, meminta, atau meminta paksa bayaran, atau bila agen privat menawarkan sebuah bayaran untuk menerobos hukum demi keuntungan kompetitif atau keuntungan pribadi (*corruption as the abuse of public position for private, individual or group to whom one owes allegiance. It occurs when a public official accepts, solicit, or extorts payment, or when private agents offer a payment to circumvent the law for comptetitive personal advantage*)

Korupsi merupakan perilaku kejahatan yang mengorbankan hajat hidup orang banyak. Sebuah perilaku kejahatan ekonomi, penuh kalkulasi pendapatan dan keuntungan. Suap dipertimbangkan sebagai pengeluaran kecil demi mendapatkan hasil yang jauh lebih besar. Jadi perputaran uang hanya berkisar antara penyuap dan kelompoknya, dan mengorbankan warga diluar lingkaran dekat penguasa. Perilaku korupsi yang dilakukan secara berkesinambungan akan semakin memperpanjang jurang pemisah antara kelas penguasa dengan masyarakat kecil.

Dimanapun dan kapanpun korupsi selalu meruntuhkan sendi-sendi moral, peremehan terhadap hukum, menusuk rasa keadilan dan menyebabkan ekonomi biaya

tinggi, dan pada gilirannya juga memperparah kemiskinan, cita-cita luhur yang diharapkan oleh para the founding fathers dimana kesejahteraan rakyat menjadi tolak ukur akan makmurnya suatu negara semakin sirna. Dalam konteks itulah regulasi yang dikesankan tidak memihak kepentingan bangsa seyogyanya tidak hanya dilihat dari dimensi teknis procedural, dimana regulasi dijadikan alat oleh para elit politik tertentu untuk menambah pundi-pundi kekayaan. Beberapa aturan mulai dari UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan turunannya perlu disesuaikan dengan visi kebangsaan Indonesia. Suatu visi yang secara cerdas telah dirumuskan oleh pendiri bangsadan termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. A turan hukum yang bertentangan dengan filosofi dasar harus dianggap batal tidak hanya demi hukum tetapi juga demi kesejahteraan bangsa Indonesia

Namun yang perlu kemudian menjadi titik perhatian bahwa perilaku korupsi akan selalu berbeda dalam setiap masanya seiring dengan kemajuan peradaban. Olehnya itu pendefinisian "korupsi" akan selalu bersifat dinamis sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi dalam setiap zaman.

B. Dinamika Sistem Sosial Masyarakat dan Potensi Korupsi

Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang seragam atau unikultural. Fakta bahwa ada begitu banyak suku, budaya, agama, dan norma hidup yang menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang multietnis, multikultural, multiagamis dan multipandangan. Seakan-akan bahwa keberagaman menjadi hal yang bersifat mutlak bagi yang terlahir di Indonesia. Namun fakta perbedaan itu tidak hanya ada pada

lembaga-lembaga formal tersebut. Sejarah dunia mencatat bahwa bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang begitu kompleks dan plural. Bangsa Indonesia sudah mengalami segalanya; demokrasi dan kediktatoran militer, undang-undang dasar non agamis dan .gyariah Islam, kekayaan ekstrem lapisan atas *dan fight for survival* lapisan kecil, nasionalisme dan separatisme, toleransi dan kekerasan ektrem, korupsi yang meresapi semua bidang kehidupan masyarakat dan hukum yang bisa diperjualbelikan, tradisonalis dan modernis, lokalis dan globalis.⁷

Pada hakikatnya masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan arah perubahan tersebut tergantung dari sifat perubahan yang dilakukan oleh masyarakat. Apapun bentuk perubahan masyarakat senantiasa mengalaminya. Hal ini disebabkan karena manusia tidak hanya merupakan kumpulan sejarah manusia, melainkan tersusun pula dalam berbagai kelompok dan pelembagaaan, sehingga kepentingan anggota masyarakat menjadi tidak sama. Namun karena ada kepentingan yang sama dalam kehidupan masyarakat, maka mendorong timbulnya pengelompokan diantara mereka⁸. Olehnya itu seringkali dalam menjalankan kepentingan kelompok ataupun kepentingan pribadi tidak jarang harus merugikan kepentingan khalayak salah satunya yaitu dengan jalan melakukan perilaku korupsi

Perilaku korupsi sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan sistem dimana suatu masyarakat hidup. Korupsi adalah gejala kejiwaan kelompok (*group psychology*).

⁷ Hidy Tjaya dan J. Sudarminta, *Menggagas Manusia Sebagai* Penafsir, Jogjakarta: Kanisius, 2005, hlm. 86.

⁸ Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.1P., M.Hum, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2006, h1m. 71.

Tingkat perkembangan dan kondisi moralitas orang-seorang juga penting. Tetapi yang lebih penting adalah setting sosial-budaya yang mengkondisikan kelompok.⁹ Jadi pengaturan sosial-budaya memiliki peranan yang vital dalam mempengaruhi perilaku korupsi. Dalam melakukan sosialisasi sekaligus internalisasi nilai-nilai luhur diperlukan pemahaman terhadap kehidupan masyarakat yang sedang dan terus berkembang. Hal ini diperlukan agar tidak terjebak pada dimensi nostalgia dan romantisme yang kelam dan sudah tidak relevan lagi dengan problem bangsa masa kini dan masa yang akan datang khususnya masalah korupsi yang semakin kompleks. Kondisi masyarakat dan negara di era reformasi masih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Kinerja lembaga negara belum dapat menjadi pelayan dan pelaksana tatanan demokrasi secara substansial. Berbagai kekurangan dan kelemahan yang tidak dapat dipungkiri masih melekat pada lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan, lembaga pers/ media, dan yang lain. Hal tersebut merupakan sebuah pantulan atau akibat dari realitas sosio-ekonomi-politik kultural yang ada.¹⁰ Dimana dalam realitasnya, masih terdapat beberapa lembaga yang lebih memprioritaskan kepentingan oknum-oknum tertentu yang memiliki kepentingan dengan pelaku sendiri sehingga mengakibatkan jurang pemisah diantara kaum proletar dan kaum borjois semakin melebar dan itu merupakan fakta yang hingga saat ini belum mampu dihilangkan dalam jajaran permasalahan klasik di

⁹ M. Amien Rais, *Menyingkap korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia*, Jogjakarta: Aditya Media, 1999, hlm. 22.

¹⁰ Hariyono, *Ideologi Pancasila "Roh Progresif Nasionalisme Indonesia"*, Malang: Intrans Publishing, 2014, hlm. 27. sulit diatasi.

negara Indonesia. Kemiskinan, korupsi, ketimpangan sosial, serta permasalahan klasik lainnya yang menggorogoti bangsa Indonesia saling memiliki relevansi satu sama lain.

Ada sebuah adagium hukum yang mengatakan "*manusia adalah seri gala bagi manusia lainnya sendiri*" sikap naluriah manusia yang menganggap diri pribadi selalu benar meskipun tidak objektif dan tidak bersifat hakiki dan terkadang konflik dengan kepentingan individu lainnya. Itulah yang menjadi salah satu aspek mengapa korupsi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai konsekuensinya, sirkulasi elit melalui proses demokrasi yang idealnya dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki *konstituen*, *kompetensi*, dan *integritas* makin sulit diwujudkan. Mereka yang memiliki harta dan nafsu berkuasa biasanya tidak hanya berusaha menarik konstituen mau memilih dirinya. Mereka yang kadar intelektualitas dan moralitasnya rendah mudah tergoda untuk mengajak kerjasama pengusaha melakukan korupsi. Mereka tidak peduli dengan nasib rakyat dan bangsa kedepan. Orientasi mereka sangat pendek, yaitu menduduki dan mempertahankan kekuasaan. Setelah kekuasaan di "tangan" dicari kesempatan mencari ganti "biaya" yang telah dikeluarkan. Banyaknya pejabat (dan mantan) politik yang berurusan dengan penegak hukum mencerminkan hal tersebut.¹¹

Sementara pejabat negara yang masih bergelut dengan mental *inlander*, disisi lain kemiskinan seolah tidak memberi ruang pada masyarakat untuk berpikir dan berkontemplasi. Mereka enggan melakukan refleksi terhadap perubahan sistem yang

¹¹ Ibid, hlm.29

lebih baik. Seolah masyarakat sudah kehilangan daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan harga diri sebagai warga Indonesia yang berprestasi dan bermartabat seolah terdesak oleh kepentingan sempit dan sesaat. Proses demokrasi yang menjadi panglima di era reformasi belum mampu memberikan dimensi substansi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara historis, berbagai bentuk korupsi yang telah berlangsung sejak sebelum 1800-an cenderung semakin meluas setelah terjadinya peralihan kekuasaan ke tangan gubernur jenderal Belanda. Penyebabnya adalah terjadinya perubahan metode pembayaran, dari upeti menjadi gaji, terhadap para aristokrat pribumi. Akibatnya, para aristokrat pribumi terpaksa menggunakan cara-cara yang tidak sah jika mereka ingin mempertahankan taraf hidup yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Perluasan pengertian korupsi secara besar-besaran terjadi setelah Indonesia merdeka. Dengan beralihnya kekuasaan ke tangan pemerintah Indonesia, tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara oleh para pejabat negara sangat mudah dituding korupsi. Sebagai mana dikemukakan *Wertheim*, tindakan yang sebelumnya dipandang wajar, kini cenderung dipandang lebih kritis.¹²

Dua hal penting yang perlu untuk diketahui mengenai perluasan pengertian korupsi dalam realitas sosial masyarakat adalah: *Pertama*, korupsi pada dasarnya berkaitan dengan perilaku kekuasaan. Mengutip Lord Acton, kekuasaan cenderung untuk korup dan kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut pula. *Kedua*,

¹² Revrison Baswir, *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 208-209.

korupsi sangat erat kaitannya dengan perkembangan sikap kritis masyarakat. Semakin berkembang sikap kritis masyarakat, maka korupsi akan cenderung dipersepsikan semakin merajalela.¹³

Untuk itu diperlukan upaya memahami perilaku korup yang selalu berkembang sesuai dengan konteks zaman. Diperlukan pemikiran-pemikiran besar dalam menangani setiap permasalahan korupsi. Etos kebangsaan yang inklusif, manusiawi, dan berkeadilan yang tertanam dalam bangsa Indonesia akan menjadi sebuah alat dalam visi pemberantasan korupsi di Indonesia. Barangkali kalau sebagian besar bangsa Indonesia sudah mampu membangun etos kebangsaan maka akan muncul suatu harapan besar. Sebuah harapan diseberang jembatan emas tempat menyeberang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan yang membumi dapat terelisasi melalui proses pemberdayaan *civil society* yang tidak hanya mampu memandirikan masyarakat dari aspek ekonomi melainkan juga dapat menjadi massa yang kritis yang dapat mengontrol roda pemerintahan menjadi *clean and good governance* dan terhindar dari perilaku-perilaku korupsi.

Ketika sistem sosial masyarakat yang berkembang sekarang ini dihubungkan dengan perilaku korupsi maka akan muncul kata potensi, sesuatu hal yang tidak dapat dipungkiri ketika realitas dalam masyarakat selalu berpotensi menghandirkan perilaku-perilaku korup.

¹³ *Ibid*, hlm. 209.

Mengikuti pendapat dari *Hibermas*, potensi dari perilaku korup dapat dilihat dari tiga perspektif.

Pertama, dari segi objektivitas (kebenaran epistemologi) korupsi selalu berkaitan dengan hubungan antara publik dengan privat. Korupsi terjadi kalau ada dana publik yang dipakai untuk tujuan dan kepentingan pribadi, atau kalau dana pribadi digunakan untuk memengaruhi keputusan atau kebijakan yang bersifat publik. Dalam kedua kasus tersebut kepentingan pribadi selalu dimenangkan dengan mengorbankan kepentingan publik, dan dengan cara melanggar hukum. Selain itu, potensi korupsi selalu dijalankan dengan rencana, atau sekurang-kurangnya dengan sadar. Beberapa keadaan yang baru disebut ini dapat dianggap sebagai unsur-unsur konstitutif yang membentuk perbuatan korupsi.

Kedua, korupsi juga berkaitan dengan moralitas norma-norma dalam kebudayaan. Persoalan adalah apakah norma-norma tersebut atau menolak korupsi dan segala kaitannya. Dengan demikian kekuatan norma kebudayaan, dalam berhadapan dengan korupsi, tidak ditentukan oleh sekedar penolakan terhadap korupsi tetapi juga penolakan terhadap segala akibat dan potensi perilaku korupsi. Sering terjadi bahwa orang mungkin menolak korupsi tetapi tidak cukup waspada untuk menolak segala hasil dari perilaku korupsi sehingga potensi korupsi selalu muncul dalam setiap perilaku masyarakat. Adalah jelas bahwa absennya penolakan terhadap akibat korupsi merupakan suatu bentuk impunitas yang secara tak sadar disumbangkan oleh masyarakat sehingga semakin memperkuat praktik korupsi. Meluasnya impunitas seperti ini bukan saja menyebabkan meluasnya praktik korupsi

dimana koruptor menjadi korbannya secara moral) tetapi juga mengakibatkan korupsi terhadap norma-norma moral yang berlaku (dimana masyarakat menjadi korbannya secara moral), karena perlahan-lahan dibuat tidak berdaya dan lambat laun membawa kita kepada proses yang akan mengubah fakta kekayaan menjadi sesuatu normatif.

Ketiga, melemahnya norma-norma dalam masyarakat pada gilirannya akan mengacaukan kebenaran psikologis atau kekuatan subyektivitas dalam diri seseorang. Kalau pada tingkat moralitas korupsi dapat menyebabkan pengaburan norma oleh fakta, maka pada tingkat subyektivitas dapat terjadi pengaburan persepsi oleh fakta yang muncul berulang kali. Kebenaran psikologis pada *Habermas* berarti bahwa ucapan dan pernyataan seseorang merepresentasikan subyektivitasnya.¹⁴

Berbagai perspektif tersebut merupakan fenomena menarik untuk melihat hubungan antara sistem sosial masyarakat dengan potensi korupsi yang ditimbulkan. Tarik urat antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum mulai tampak dalam realitas sosial masyarakat. Kalau ditinjau dari segi pemerintah, akan lebih baik bila pihak pemerintah berlaku arif, mengakomodir, kecenderungan zaman dengan cara memberikan saluran secara seimbang dan fungsional. Seluruh sistem dan struktur yang berlaku nampaknya perlu dikaji ulang untuk menjawab desakan yang kian deras. Bagaikan kerikil yang jatuh ditengah telaga yang tenang dan sepi, realitas tersebut mengoyak kebekuan dengan riak riak kecil yang bergelombang. Dan jika ini berlanjut terus, maka akan dapat menjadi gelombang besar yang mampu menguak

¹⁴ Al-Andang L Binawan, *Korupsi Kemanusiaan: Menafsirkan Korupsi Dalam Masyarakat*, Jakarta: Kompas, 2006, hlm.7-10.

tabir pemberantasan korupsi yang lebih besar.¹⁵

Namundemikian patut kiranya kita mempertanyakan, apakah dari berbagai persepektif tersebut merupakan pertanda kran korupsi di Indonesia telah terbuka lebar dan semakin menjamur ? Sudahkah bangsa Indonesia benar-benar memiliki kemampuan untuk meredam potensi-potensi korupsi yang timbul? Sudah tepatkah bangsa Indonesia dalam mengambil tindakan untuk memperjuangkan pemberantasan korupsi dalam kondisi sekarang ini ? Terlepas dari berbagai asumsi tentang sistem sosial masyarakat dan potensi korupsi yang sudah tampak semakin kompleks, yang jelas fenomena ini menarik untuk dianalisis dan dijadikan bahan renungan untuk memandang perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia.

C. Struktur dan Pola Pemikiran Masyarakat Indonesia Terhadap Korupsi

Korupsi merupakan sebuah budaya yang absurditas yang telah mengakar dalam pola pikir masyarakat Indonesia. Seringkali orang tua menakut-nakuti ketika anaknya menangis ataupun ketika seorang anak terjatuh maka orang tua pasti akan langsung menyalahkan objek benda mati yang membuat anaknya terjatuh, dari dua hal tersebut maka hal yang dapat kita jadikan sebagai sebuah konklusi bahwa sejak dulu orang tua memberikan sebuah solusi tapi terkadang tidak bersifat solutif serta sejak kecil kita diajarkan terlebih dahulu untuk mengkambinghitamkan sesuatu tanpa melihat secara objektif akar dari permasalahan tersebut. Pola pikir yang telah

¹⁵ Al-Zastrouw, *Reformasi Pemikiran: Respon Kontemplatif datum Persoalan Kehidupan*, Jogjakarta: LIC.PSM, 1988, hhn. 80.

ditanamkan sejak dini akan membawa pengaruh dalam tingkah laku keseharian. Disisi lain, sekolah yang bersikap "memaksa" terhadap peserta didik, karena merasa bahwa sekolah yang akan menentukan nasib dan masa depan seseorang. Sementara itu pendidikan informal ataupun non-formal hanya merupakan ornamen yang tidak pernah punya peran dalam menentukan masa depan seseorang.¹⁶ Konsekuensinya seluruh peserta didik harus patuh dan tunduk secara mutlak terhadap aturan dan mekanisme yang ditawarkan oleh oleh sekolah tanpa dialog, bargaining, ataupun kompromi sehingga implikasinya para peserta didik termindset untuk mencapai tujuan secara formalitas tanpa didukung dengan pemebentukan kepribadian yang utuh.

Secara ideal, antara sekolah, masyarakat dan negara sebenarnya merupakan pilar segitiga untuk menegakkan keseimbangan hidup masyarakat. Masyarakat menyerahkan amanat pada negara (pemerintah) untuk mengatur kehidupan, sementara sekolah dengan kemampuan akademiknya menjadi lembaga penghubung yang menjembatani antar masyarakat dengan negara. Dengan kemampuan akademinya, sekolah melakukan kritik pada negara bila terjadi penyimpangan dan mensosialisasikan gagasan pada masyarakat. Jika sekolah semata-mata hanya mengutamakan kepentingan negara dan mensubordinasikan dirinya pada negara sehingga kehilangan daya kritis, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan terhadapnya, dan harmonitas sosial akan terganggu. Sehingga sikap acuh tak acuh

¹⁶ *Ibid*, him. 131.

masyarakat terhadap negara akan muncul secara sendirinya.¹⁷ Pengembalian marwah dunia pendidikan yang tidak hanya mengutamakan formal birokratik akan sangat berimbas pada karakter dan pola pikir para peserta didik sehingga perilaku-perilaku korup yang awalnya telah membelenggu masyarakat Indonesia pada umumnya dapat dihilangkan meskipun membutuhkan proses yang cukup lama.

Sudah menjadi hal yang biasa, ketika dalam masyarakat masalah korupsi cenderung diyakini sebagai masalah yang melekat pada orang atau personal, "seperti apapun sistemnya, kalau manusianya belum jujur, maka korupsi akan tetap menjadi budaya laten" secara moral, kesimpulan seperti itu mungkin sesuai dengan keadaan. Tetapi bila dilihat secara sistemik, kesimpulan tersebut jelas merupakan suatu langkah mundur yang sangat patut untuk diwaspadai. Secara sistemik, kegagalan indonesia dalam memerangi korupsi terletak pada kealpaan bangsa itu sendiri dalam memberdayakan dan meningkatkan partisipasi rakyat. Hal itu tidak hanya terjadi dalam praktik ketatalaksanaan di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah.

Dalam kasus tertentu, setiap kali aparat penegak hukum berusaha membongkar suatu kasus korupsi, kendala utama dan pertama yang dihadapi justru datang dari sesama aparat pemerintah. Apakah itu dari jajaran pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Alasan klise yang selalu diutarakan adalah untuk menjaga hubungan baik dan demi kerjasama ataupun demi menjaga kewibawaan antar sesama instansi. Karena itu, penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi banyak yang hilang ditelan waktu atau diberhentikan sama sekali tanpa adanya dasar

¹⁷ *Ibid*, him. 131.

hukum yang kuat.¹⁸

Upaya dalam pemberantasan korupsi belum mampu dilakukan secara maksimal karena iklim, sifat serta suasana koruptif nampaknya telah menjadi hal yang lumrah dalam masyarakat. Penindakan terhadap perbuatan korupsi tidak banyak memperoleh respon yang positif oleh masyarakat khususnya masyarakat yang bermukim di daerah tertinggal sehingga masyarakat bersikap apatis, apalagi karena laporan pengaduan lebih sering tidak ada tindak lanjutnya. Korupsi bukan bersifat personal tapi bersifat struktural. Dan lebih dari itu, konon katanya bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi kultural atau telah membudaya.

Melihat kondisi sosial tersebut maka diperlukan sebuah upaya komitmen sosial yang kuat dalam pola pikir masyarakat. Dimana komitmen sosial merupakan suatu pilihan jiwa dan panggilan hati untuk secara sadar melakukan pemihakan dan pembelaan terhadap masalah korupsi baik yang terjadi di tengah masyarakat ataupun diantara lembaga-lembaga pemerintahan. Dengan kesadaran tersebut, komitmen sosial ini menuntut untuk diwujudkan dengan berbagai aktifitas baik yang konsepsional ataupun bersifat praktis. Perilaku seperti ini mensyaratkan adanya kerelaan diri untuk melakukan pereduksian terhadap kepentingan diri untuk selanjutnya melebur dalam persoalan masyarakat secara lebih luas¹⁹. Dalam konteks peradaban sekarang ini, secara faktual idealitas tersebut sangat jelas bertentangan dengan budaya dan gaya hidup yang tengah berjalan ditengah-tengah masyarakat

¹⁸ Antonius Sujata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Djarnbatan, 2000, hlm 157.

¹⁹ Al-Zastrouw, *Reformasi Pemikiran: Respon Kontemplatif dalam Persoalan Kehidupan*, Jogjakarta: LKPSM, 1988, him. 155.

yakni sikap pragmatis dan sikap hidup yang masa bodoh pada orang lain, sebagai dampak meningkatnya derajat kompetisi dan tuntutan profesionalitas.

Komitmen sosial pada hakikatnya merupakan panggilan kesadaran dan kepekaan terhadap peran sosial masyarakat secara keseluruhan. Penumbuhan terhadap kesadaran ini memerlukan proses yang menuntut ketekunan karena berifat jangka panjang dan berkesinambungan. Terlebih jika hal ini dilakukan secara intens, proses ini pada akhirnya akan bermuara pada terbentuknya perilaku yang berintegritas dan kritis terhadap sosial sehingga perilaku korup sangat sulit untuk tumbuh dalam lingkup masyarakat yang memiliki komitmen sosial.

BAB II
KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN
KELAS MENENGAH

*“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah,
tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan
bangsamu sendir”²⁰.*

(Bung Karno)

A. Kekayaan Negara Yang dikuasai Kapitalis

Kita mencoba membuka tulisan saya dari penggalan kata - kata dari salah satu proklamator bangsa Indonesia, pemimpin yang sangat dikagumi dunia pada masanya. Dari kutipan diatas, bisa kita pahami bahwa Bung Karno telah memprediksi masalah terbesar bangsa berada dalam bangsa ini sendiri. Kalau kita melihat kenyataannya sampai detik ini, memang prediksi Bung Karno tersebut sangat relevan, kita bisa melihat bagaimana orang - orang dari kelas sosial tertentu mencoba mempreteli bangsa ini. Tidak ada lagi perjuangan yang dilakukan atas nama bangsa, semua hanya demi kepentingan sendiri maupun kepentingan kelompok. Indonesia Raya hanyalah sekedar lagu yang dinyanyikan untuk formalitas belaka, seakan mereka benar - benar mencintai negeri ini murni tanpa ada kepentingan. Mungkin mereka memang mencintai negeri ini, tapi ketika tidak ada lagi yang bisa mereka

²⁰ Detik - Detik menjelang lengsernya Bung Karno, Ketika pidato-pidato tak lagi didengar dan dipelintir (Lihat di: [www.andrian-suseno.blogspot.com/ 2013/ 09/ soekarno-perjuanganku-lebih-mudah.html?m=1](http://www.andrian-suseno.blogspot.com/2013/09/soekarno-perjuanganku-lebih-mudah.html?m=1))

perjual belikan, apakah rasa cinta itu tetap ada ?atau mungkin terbang jauh bersama garuda.

Sebelum masuk ke pembahasan subbab ini, saya akan mencoba memberi definisi tentang kekayaan negara dan kapitalis. Pertama, kita akan mencoba memahami apa sebenarnya yang dimaksud kekayaan negara. Kekayaan negara sendiri mencakup banyak hal seperti kekayaan alam, keuangan negara, sumber daya manusia dengan ragam budayanya.

Kekayaan alam sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat 3 adalah " Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar - besar kemakmuran rakyat.²¹ Daripasal tersebut cukup jelas bahwa kekayaan alam meliputi seluruh kandungan yang berada di bumi Indonesia, itu termasuk tanah, ruang angkasa, lautan, dan kandungan - kandungan alamnya. Kekayaan alam ini dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni kekayaan alam hayati dan nonhayati. Mungkin semua orang sudah memahami kekayaan alam hayati ini yang dimaksud adalah kekayaan alam yang berhubungan dengan makhluk hidup, yakni hewan dan tumbuhan. Juga kekayaan alam nonhayati yang berhubungan dengan air, tanah, angin, hasil tambang, minyak bumi dan batubara. Indonesia sendiri menempati posisi kedua dengan tingkat keanekaragaman alamnya.²²

Sedangkan keuangan negara, menurut Undang -Undang No. 17 tahun 2003

²¹ Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

²² https://id.wildpedia.org/wild/sumber_daya alam, diakses pada tanggal 23 Februari 2016

tentang keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut.²³ Unsur "segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang" memberikan pemahaman bahwa semua kekayaan alam yang dijelaskan diatas sudah termasuk keuangan negara, karena pada dewasa ini kekayaan alam diatas pada praktiknya dapat dinilai dengan uang.

Selanjutnya saya akan mencoba membahas tentang sumber daya manusia serta keragaman budayanya. Berdasarkan statistik dari badan pusat statistik, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 258.705 juta jiwa.²⁴ Dari jumlah tersebut, Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam kategori negara dengan jumlah penduduknya²⁵ Penduduk tersebut tersebar di 35 provinsi yang ada di Indonesia dengan sekitar 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.²⁶

Dari beberapa cakupan kekayaan negara diatas, dapat disimpulkan bahwa negara kita ini adalah negara yang sangat kaya, baik itu sumber daya manusia maupun kekayaannya. Namun ini juga bisa jadi problematika untuk bangsa ini, apakah kekayaan negara ini benar-benar dipergunakan untuk tujuan bernegara seperti pandangan Aristoteles yang mengemukakan bahwa tujuan negara tidak lain adalah

²³ Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

²⁴ <https://bps.go.id>, diakses pada tanggal 24 Februari 2016

²⁵ https://id.wikipedia/wiki/daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk, diakses pada tanggal 24 Februari 2016

²⁶ https://id.wikipedia/wiki/suku_bangsa_di_Indonesia, diakses pada tanggal 25 Februari 2016

untuk menyelenggarakan hidup yang lebih baik untuk semua warganya²⁷. Hal yang sama dikemukakan oleh John Locke bahwa tujuan negara tidak lain adalah untuk kebaikan umat manusia (*"the end of government is the good of mankind"*).²⁸ Dari dua pandangan tujuan negara yang dikemukakan oleh dua tokoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan negara pada umumnya adalah semata - mata untuk kesejahteraan warga negaranya. Tujuan negara Indonesia sendiri termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 yang berbunyi *"kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...."*.²⁹ Secara garis besar ada empat tujuan negara yang dimaksudkan, yakni

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Penulis tidak akan menjelaskan semua tujuan negara diatas, melainkan hanya menitikberatkan pada poin kedua yaitu memajukan kesejahteraan umum, karena pada subbab ini, kesejahteraan umumlah yang akan dijadikan sebagai objek pembahasan,

²⁷ Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Jakarta: Kencana, Cetakan pertama, 2012, hlm. 11.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Alinea Keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Mencerdaskan kehidupan bangsa

kesejahteraan umum menurut penulis sendiri adalah kondisi dimana tidak ada kesenjangan sosial antar warga negara. Namun fakta yang ada pada saat ini, sebanyak 0,2 persen penduduk Indonesia menguasai 74 persen perekonomian Indonesia, sedangkan 99,8 persen penduduk lainnya menguasai lahan tersisa atau sekitar 26 persen saja.³⁰ Jika penduduk Indonesia sekarang berjumlah 258.705 juta jiwa, maka yang jumlah penduduk yang menguasai 74 persen perekonomian Indonesia adalah 517.410 penduduk. Sedangkan sisanya menjalankan 26 persen perekonomian Indonesia. Data tersebut membuktikan bahwa kesejahteraan umum yang dimaksudkan dalam alinea keempat UUD NRI 1945 belum tercapai, keadaan sosial masih sangat timpang. Mereka 517.410 penduduk Indonesia bisa disebut sebagai para kapitalis Indonesia. Kapitalis menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kaum bermodal, orang yang bermodal besar, golongan atau orang yang sangat kaya. Sedangkan penduduk sisanya bukannya kaum tak bermodal atau proletar, tapi mereka yang juga sedang berusaha menjadi kapitalis - kapitalis baru. Itulah kecenderungan yang terjadi, mereka yang belum tergolong bermodal akan mencoba untuk menjadi kaum bermodal.

Negara sendiri mendukung upaya-upaya masyarakat tersebut untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hal tersebut dijamin dalam pasal 28C angka 1 UUD NRI 1945, disebutkan bahwa *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu*

³⁰ <https://impr.gold/posts/zulkifli-indonesia-menghadapi-persoalan-keadilan-yang-sangat-pelik>, diakses pada tanggal 26 Februari 2016

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".³¹ Tetapi negara sendiri kurang mengontrol bagaimana warga atau masyarakat tersebut meningkatkan kualitas dirinya, jika melihat fakta bahwa 0,2 persen warga yang menguasai 74 persen perputaran perekonomian. Tak salah jika orang beranggapan bahwa orang kaya akan semakin kaya, dan orang miskin menjadi semakin miskin.

Mengacu pada teori kelas, secara hakiki, negara dikuasai secara langsung atau tidak langsung oleh kelas - kelas yang menguasai bidang ekonomi.³² Negara bukanlah lembaga di atas masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa pamrih, melainkan merupakan alat dalam tangan kelas - kelas atas untuk mengamankan kekuasaan mereka.³³ Jadi negara pertama - tama tidak bertindak demi kepentingan umum, melainkan demi kepentingan - kepentingan kelas atas.³⁴ Biarlah para pembaca yang menilai, apakah teori Marx tersebut relevan dengan keadaan negara saat ini.

Lebih lanjut, dijelaskan bagaimana para kapitalis - kapitalis ini menguasai kekayaan negara. Prinsip dasar para kapitalis adalah ekonomi yang bebas, bebas dari pelbagai pembatasan oleh raja dan penguasa lain bebas dari dari pembatasan-pembatasan produksi, bebas dari pembatasan tenaga kerja, yang menentukan semata-mata keuntungan yang lebih besar.³⁵ Secara teori, prinsip - prinsip ini tidaklah berlaku

³¹ Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

³² Franz Magnis-Suseno, *Arus Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Kedelapan, 2010, hlm. 120

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*, hlm. 164

dalam negara ini, dimana negara telah membatasi kegiatan perekonomian nasional. Batasan tersebut didapati pada pasal 33 ayat 1 hingga ayat 4. Inti dari BAB XIV tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial adalah kegiatan perekonomian diselenggarakan sepenuhnya untuk memakmurkan masyarakat umum. Tentunya ini hal tersebut menghalangi keinginan kapitalis - kapitalis untuk memakmurkan dirinya sendiri. Namun para kapitalis ini tidaklah kehabisan akal, mereka bermain di batasan - batasan yang telah ditetapkan negara. Batasan - batasan tersebut mereka perkecil dengan menempatkan orang - orang pada posisi strategic dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mengamankan ambisi mereka untuk mengumpulkan pundi - pundi dari negara ini. Kekayaan - kekayaan negara yang mestinya diolah secara penuh untuk kepentingan negara mereka eksploitasi melalui peraturan dan izin yang tidak lain dari orang - orang yang telah mereka tempatkan pada posisi atau jabatan. Bahkan ada beberapa dari kapitalis - kapitalis tersebut turun langsung untuk menduduki jabatan - jabatan strategis, tentunya untuk mengamankan kepentingan mereka.

Sampai disini mungkin timbul pertanyaan, mengapa kapitalis - kapitalis tersebut melakukan hal -hal tersebut ? Pada awalnya mereka salah, secara moral kita harusnya mementingkan kepentingan - kepentingan umum, kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Tetapi kesalahan tersebut dilakukan oleh banyak orang sehingga suatu tindakan yang pada awalnya salah bisa dibenarkan karena telah dilakukan oleh banyak orang yang sangat lumrah kita temui. Hal ini selaras dengan teori Weber, "Manusia (kapitalis) hanya dipenuhi dengan usaha terus menerus untuk

mencari harta dan uang, dengan meficipai tujuan akhir dari kehidupannya"³⁶

Sistem kerja dari kapitalis - kapitalis ini sendiri adalah mempekerjakan kaum - kaum yang tidak punya modal materi, yang dipunyai adalah modal fisik dan kemauan untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhan primer mereka. Ada hubungan timbal balik antara kaum kapitalis dan kaum pekerja, bagi kaum pekerja tidak ada cara lain untuk bertahan hidup kecuali bekerja pada kaum kapitalis yang dapat memberi mereka penghasilan yang mereka butuhkan. Dan kaum kapitalis sebenarnya juga bergantung pada kaum - kaum yang mereka pekerjakan, karena kaum - kaum pekerja lah yang akan memproduksi apa yang akan dijual oleh para kapitalis tersebut. Tentunya dengan cara kerja seperti itu, para kaum kapitalis membantu negara dalam memberdayakan masyarakatnya, negara dalam hal ini pemerintah tidak perlu repot - repot untuk menciptakan lapangan kerja untuk semua warganya dengan catatan bahwa kaum kapitalis ini tidak mengambil keuntungan dari kekayaan - kekayaan alam yang harusnya dikelola sendiri oleh negara. Yang perlu ketahui disini bahwa kaum kapitalis mempunyai prinsip kerja mendapatkan keuntungan sebesar-sebesarnya dengan mengeluarkan modal seminimal mungkin, yang artinya mereka akan membayar kaum pekerja seadanya saja, yang menurut kaum pekerja cukup untuk menghidupi kehidupan primer dirinya sendiri maupun keluarganya. Itulah sebabnya kaum pekerja sulit mengembangkan taraf hidup mereka, berbeda dengan kaum kapitalis.

³⁶ Max Weber, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, Yogyakarta: Narasi, Cetakan Pertama, Diterjemahkan oleh : Yusup Priasudiarja, 2015, hlm.84

Cara yang dipakai para kapitalis - kapitalis untuk menguasai kekayaan negara bisa terbilang cukup terstruktur, mereka memulai dari mencari apa yang dapat mereka kelola untuk dijadikan sumber pendapatan, kekayaan alam adalah ladang empuk bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan karena hasil - hasil alam bernilai tinggi. Jika kekayaan alam yang mereka jadikan objek pendapatan adalah sumber daya alam hayati, selama itu bukan sumber daya alam yang dilindungi, mereka akan mudah untuk mendapatkan hak untuk mengelolanya. Tetapi jika itu sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, mereka akan menggunakan orang - orang yang ada dalam lingkaran kekuasaan yang mereka bisa kontrol untuk memuluskan niat mereka. Setelah sumber pendapatan telah mereka dapatkan, mereka akan mempekerjakan orang - orang yang tidak mempunyai modal untuk mengelola sumber pendapatan mereka. Mereka bisa mempekerjakan orang mulai dari yang tak berpendidikan hingga dengan pendidikan tertinggi karena mempunyai modal yang memungkinkan untuk itu. Merekalah kaum pekerja yang akan menggunakan otak dan otaknya untuk memberi keuntungan bagi si pemilik modal. Ketika kaum kapitalis mendapatkan keuntungan, mereka akan mencari sumber pendapatan lain, terus menerus hingga mereka mempunyai kekayaan - kekayaan yang tak akan terasa cukup bagi mereka. Dengan pola seperti itu, maka kaum kapitalis - kapitalis ini akan menguasai perputaran perekonomian, bagaimana dengan pekerja-pekerjanya ?. Mereka yang mendapatkan upah yang hanya cukup untuk kebutuhan primer akan terus - terusan bergantung kepada si pemberi upah sembari menunggu keajaiban mengubah keadaan mereka. Untuk mereka yang diberi upah tinggi, mereka akan mengumpulkan modal - modal

untuk menjadi kapitalis-kapitalis Baru seperti apa yang saya paparkan pada awal pembahasan subbab ini.

Secara sederhana, tujuan sistem ekonomi kapitalis adalah uang, dan bukan barang yang diproduksi. Barang hanyalah sarana untuk memperoleh uang. Makin banyak keuntungan sebuah perusahaan, makin kuat kedudukannya selanjutnya di pasar, dan sebaliknya.³⁷ Hukum keras kapitalisme adalah persaingan. Demi persaingan, produktivitas produksi harus ditingkatkan dan harus ditingkatkan terus - menerus. Artinya biaya produksi perlu ditekan serendah mungkin sehingga hasilnya dapat dijual semurah mungkin dan dengan demikian menang terhadap hasil produksi saingan.³⁸

Namun, kesuksesan kewirausahaan adalah cukup menarik bagi semua orang, kecuali bagi lapisan tertinggi masyarakat feodal yang mendatangkan orang - orang genius untuk menghasilkan kesuksesan lebih jauh guna menghasilkan uang tambahan untuk rasionalis.³⁹ Jadi, dalam pengertian ini, kapitalisme dan bukan hanya kegiatan ekonomi pada umumnya, telah menjadi kekuatan pendorong rasionalisasi perilaku manusia.⁴⁰ Proses kapitalisasi merasionalisasi perilaku dan ide-ide, hal ini dimulai dari pikiran kita, bersama dengan keyakinan metafisika, mistik serta ide-ide romantis dari segala macam.⁴¹

³⁷ Frans Magnis-Suseno, *Op. Cit*, hlm. 164

³⁸ *Ibid*, hlm. 165

³⁹ Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan pertama, diterjemahkan oleh : Teguh Wahyu Utomo, 2013, hlm. 204

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*, hlm. 207

Menurut Weber, ada sebuah antitesis dari kapitalisme ini, yaitu dalam suatu standar kehidupan kehidupan pasti yang menuntut sanksi etika, yang harus dihadapi adalah tipe sikap dan reaksi terhadap situasi - situasi yang akan mungkin kita sebut sebagai tradisionalisme.⁴² Tradisionalisme yang dimaksud adalah tidak mengharapkan untuk untuk memperoleh uang lebih banyak dan lebih banyak lagi namun mereka secara sederhana berharap untuk bisa hidup seperti biasa dan untuk memperoleh penghasilan sebanyak kebutuhannya untuk hidup.⁴³

B. Konspirasi Penguasa Dan Kapitalis

Sebelum membahas lebih jauh tentang konspirasi penguasa dan kapitalis, terlebih dahulu sebaiknya kita mengetahui apa arti dari konspirasi itu sendiri. Karena ketika telah mengenal akan menjadi lebih mudah untuk mengidentifikasi dan dilanjutkan dengan melawan konspirasi-konspirasi yang berbahaya tersebut.

Teori persekongkolan atau teori konspirasi (dalam bahasa Inggris, *conspiracy theory*) adalah teori-teori yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertindi dari satu atau serangkaian peristiwa (pada umumnya peristiwa politik, sosial, atau sejarah) adalah suatu rahasia, dan seringkali memperdaya, direncanakan diam-diam oleh sekelompok rahasia orang-orang atau organisasi yang sangat berkuasa atau berpengaruh. Banyak teori konspirasi yang mengklaim bahwa peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah telah didominasi oleh para konspirator belakang layar yang

⁴² Max Weber, *Op.Cit.* hlm.92

⁴³ *Ibid*, hlm. 94

memanipulasi kejadian-kejadian politik. Dengan kata lain, menjadikan sesuatu sebagai alternatif demi mencapai tujuan yang telah dirancang. Teori ini ada di seputaran gerak dunia global dan merambah hampir ke semua ranah kehidupan manusia, dari urusan politik sampai makanan. Orang yang tidak percaya selalu menganggap semua hanya olok-olok, mengada-ada, menyia-nyiakan waktu, kurang kerjaan, dan sebagainya. Bagi para penganutnya, teori itu tidak serta-merta muncul mendunia tanpa ada yang menciptakan polanya.⁴⁴ Dari pengertian teori konspirasi diatas dapat kita simpulkan bahwa konspirasi ini erat kaitannya dengan penguasa dan kapitalis, hal ini disebabkan karena penguasa dan kapitalis memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar. Penguasa memiliki kekuasaan dalam membuat berbagai regulasi dan perundang-undangan sedangkan kapitalis memiliki uang yang kemudian menjadi alat yang dapat memengaruhi pembuatan regulasi agar dapat menguasai pasar yang akan lebih memperkaya dirinya atau kelompoknya

Kapitalisme atau Kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar.⁴⁵ Pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan

⁴⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_persekongkolan

⁴⁵ "Capitalism" *Oxford Dictionaries*. "capitalism an economic and political system in which a country's trade and industry are controlled by private owners for profit, rather than by the state." Retrieved 4 January 2013.

pribadi.⁴⁶ Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan modal-modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin dahulu, baru buruh sebagai operator mesin dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan baku tersebut.

Sedangkan Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal dengan sebutan *guild* sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini, kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan belaka. Peleburan kapitalisme dengan sosialisme tanpa adanya perubahan menjadikan kapitalisme lebih lunak daripada dua atau tiga abad yang lalu.

⁴⁶ Chris Jenks. *Core Sociological Dichotomies*. "Capitalism, as a mode of production, is an economic system of manufacture and exchange which is geared toward the production and sale of commodities within a market for profit, where the manufacture of commodities consists of the use of the formally free labor of workers in exchange for a wage to create commodities in which the manufacturer extracts surplus value from the labor of the workers in terms of the difference between the wages paid to the worker and the value of the commodity produced by him/her to generate that profit." London, England, UK; Thousand Oaks, California, USA; New Delhi, India: SAGE. p. 383. dengan sosialisme tanpa adanya perubahan menjadikan kapitalisme lebih lunak daripada dua atau tiga abad yang lalu.

Istilah kapitalisme, dalam arti modern, sering dikaitkan dengan Karl Marx.⁴⁷ Dalam *magnum opus* *Das Kapital*, Marx menulis tentang "cara produksi kapitalis" dengan menggunakan metode pemahaman yang sekarang dikenal sebagai Marxisme. Namun, sementara Marx jarang menggunakan istilah "kapitalisme", namun digunakan dua kali dalam interpretasi karyanya yang lebih politik, terutama ditulis oleh kolaborator Friedrich Engels. Pada abad ke-20 pembela sistem kapitalis sering menggantikan kapitalisme jangka panjang dengan frase seperti perusahaan bebas dan perusahaan swasta diganti dengan kapitalis rente dan investor sebagai reaksi terhadap konotasi negatif yang terkait dengan kapitalisme.⁴⁸

Kritik kapitalisme mengasosiasikannya dengan kesenjangan sosial dan distribusi yang tidak adil dari kekayaan dan kekuasaan; kecenderungan monopoli pasar atau oligopoli (dan pemerintah oleh oligarki), imperialisme, perang kontra revolusioner dan berbagai bentuk eksploitasi ekonomi dan budaya; materialisme, represi pekerja dan anggota serikat buruh, alienasi sosial, kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi. Hak milik pribadi juga telah dikaitkan dengan tragedi *anticommons*.

Marxis telah menganjurkan penggulingan revolusioner dari kapitalisme yang akan memimpin ke sosialisme, sebelum akhirnya berubah menjadi komunisme. Banyak sosialis menganggap kapitalisme menjadi tidak rasional, dalam produksi dan arah ekonomi tidak direncanakan, menciptakan banyak inkonsistensi dan kontradiksi

⁴⁷ Scott, John (2005). *Industrialism: A Dictionary of Sociology*. Oxford University Press.

⁴⁸ Williams, Raymond (1983). "Capitalism". *Keywords: A vocabulary of culture and society*, revised edition. Oxford University Press. p.51

internal.⁴⁹ Sejarahwan tenaga kerja dan cendekiawan seperti Immanuel Wallerstein berpendapat bahwa tidak bebas tenaga kerja. Oleh para budak, pembantu dengan perjanjian, tahanan, dan orang-orang lainnya dipaksa-kompatibel dengan hubungan kapitalis.⁵⁰ Ekonom Marxis Richard D. Wolff mendalilkan bahwa ekonomi kapitalis memprioritaskan keuntungan dan akumulasi modal atas kebutuhan sosial masyarakat, dan perusahaan kapitalis jarang pernah menyertakan pekerja dalam keputusan-keputusan dasar dari pertisahaan.⁵¹

Banyak aspek kapitalisme telah datang di bawah serangan dari gerakan anti-globalisasi, yang terutama menentang kapitalisme korporasi. Para pegiat lingkungan berpendapat bahwa kapitalisme membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, dan bahwa hal itu pasti akan menguras sumber daya alam terbatas di Bumi.⁵² kritik tersebut berpendapat bahwa sementara neoliberalisme ini, atau kapitalisme kontemporer,⁵³ memang meningkatkan perdagangan global, tapi juga memungkinkan meningkat kemiskinan global.- dengan lebih hidup hari ini dalam kemiskinan dari sebelumnya neoliberalisme, dan indikator lingkungan menunjukkan

⁴⁹ Brander, James A. *Government policy toward business*. 4th ed. Mississauga, Ontario: John Wiley & Sons Canada, Ltd., 2006. Print

⁵⁰ *Towards a Comparative Political Economy of Unfree Labor* (Cass, 1999). Marcel van der Linden (Fall 2003). "Labour History as the History of Multitudes"

⁵¹ Frances Goldin, Debby Smith, Michael Smith (2014), *Imagine: Living in a Socialist USA*. Harper Perennial. pp. 49-50

⁵² McMurty, John (1999). *The Cancer Stage of Capitalism*. PLUTO PRESS.

⁵³ The crisis of neoliberalism. *The Real News*. 30 March 2010. When we speak of neoliberalism, we speak of contemporary capitalism." - Gerard Dumenil, economist at the University of Paris.

kerusakan lingkungan besar-besaran sejak akhir 1970-an.⁵⁴

Setelah krisis perbankan tahun 2007, Alan Greenspan⁵⁵ mengatakan kepada Kongres Amerika Serikat pada tanggal 23 Oktober 2008, "Bangunan intelektual seluruhnya runtuh. Aku membuat kesalahan dalam menganggap bahwa kepentingan diri dari organisasi, khususnya bank dan lain-lain, adalah seperti bahwa mereka yang terbaik yang mampu melindungi pemegang saham mereka sendiri. ...aku terkejut."

Banyak agama mengkritik atau menentang unsur-unsur tertentu dari kapitalisme. Tradisional Yahudi, Kristen, dan Islam melarang meminjamkan uang dengan bunga, meskipun metode alternatif perbankan telah dikembangkan. Beberapa orang Kristen telah mengkritik kapitalisme untuk aspek materialis dan ketidakmampuannya untuk memperhitungkan kesejahteraan semua orang. Banyak perumpamaan Yesus berurusan dengan masalah ekonomi: Pertanian, penggembalaan, berada di utang, melakukan kerja paksa, dikucilkan dari perjamuan dan rumah-rumah orang kaya, dan memiliki implikasi untuk kekayaan dan distribusi kekuasaan.⁵⁶

Dalam 84-halaman himbauan apostolik *Evangelii Gaudium*, Paus Francis⁵⁷ menggambarkan terkekang kapitalisme sebagai "tirani baru" dan menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk memerangi meningkatnya kemiskinan dan ketidaksetaraan. Di dalamnya ia mengatakan:

⁵⁴ Campbell Jones, Martin Parker, Rene Ten Bos (2005). *For Business Ethics*. Routledge. p. 101

⁵⁵ New York Times, Oct. 23, 2007.

⁵⁶ Ross Gittins (9 April 2012). "What Jesus said about capitalism". *The Sydney Morning Herald*.

⁵⁷ Naomi O'Leary (26 November 2013). Pope attacks 'tyranny' of markets in manifesto for papacy. *Reuters*. Retrieved 30 December 2013

"Beberapa orang terus membela teori trickle-down yang menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi, didorong oleh pasar bebas, pasti akan berhasil dalam mewujudkan keadilan yang lebih besar dan inklusivitas di dunia. Pendapat ini, yang belum pernah dikonfirmasi oleh fakta, mengungkapkan kepercayaan mentah dan naif dalam kebaikan mereka memegang kekuatan ekonomi dan sakralisasi kerja dari sistem ekonomi yang berlaku. Sementara itu, yang dikecualikan masih menunggu."⁵⁸

Sifat kapitalisme di Indonesia dan Asia pada era penjajahan berlainan sekali dengan kapitalisme di Belanda dan Eropa lain. Di Eropa lahir dan majunya kapitalisme itu sendiri terbawa oleh keperluan negeri sendiri, sedangkan di Indonesia majunya kemodalan itu terbawa oleh keperluan bangsa asing.⁵⁹ Sebab itu di Eropa, majunya kapitalisme itu dengan jalan menurut alam atau organisch, sedangkan di Indonesia kunstatig atau buatan. Maka dari itu, kapitalisme di Eropa sehat dan sempurna, sedangkan di Indonesia verkracht atau terperkosa, seolah-olah sepokok kayu yang kena kelindungan.

Kapitalisme di Eropa membagi negeri atas kota dan desa. Di kota terdapat perusahaan atau industry dari kain, besi, batu, kertas dll. Sedangkan di desa terdapat gandum, sayur, sapi, domba dan hasil buat lain-lain makan. Jadi dipukul rata kota memperusahakan barang pabrik dan desa mengadakan hasil tanah dan ternak. Bagian pekerjaan di kota dengan desa itu bertambah terang sekali pada negeri yang sangat

⁵⁸ Zachary A. Goldfarb and Michelle Boorstein (26 November 2013). Pope Francis denounces 'trickle-down' economic theories in critique of inequality. *The Washington Post*. Retrieved 26 November 2013.

⁵⁹ Tan Malaka (1926). *Semangat Muda* Halaman.32 Januari 1926 Tokyo

maju permodalannya. Hasil pabrik di kota itu berguna untuk penduduk kota sendiri. Sisanya ditukarkan dengan makanan yang dihasilkan desa. Jadi kain, pisau, perkakas rumah, baja, dll yang di produksi di kota ditukar dengan gandum, sayur, daging dll yang dihasilkan di desa.

Pada negeri yang modalnya belum jelas imperialistis, dan sehat ekonominya seperti Amerika sebelum perang 1914-1918, maka jumlah barang yang di produksi dari kota sama banyaknya dengan hasil tanah dari desa. Begitulah asal majunya kemodalan dan perusahaan, yaitu dari pertukaran barang pabrik di kota dan hasil tanah di desa-desa, makin maju perusahaan kota, makin banyak penduduk desa pindah ke kota mencari pekerjaan dan keterampilan karena di kota berkumpul pabrik, sekolah, bioskop, dan lain-lain.

Di Indonesia juga bisa seperti itu, jika Belanda tidak datang dan membunuh perusahaan kecil-kecil, membuat kapal, kain, barang-barang besi dan lainnya. Perusahaan kecil-kecil itu berpotensi menjadi besar, memakai uap dan listrik seperti di Eropa dan Amerika. Tetapi, dengan hukum Belanda yang mengatur untuk melarang membuat kapal dan membunuh perusahaan anak negeri dengan memasok barang pabrik yang murah harganya, maka kondisi seperti di Eropa tidak dapat terjadi. Kota kita tidak ada yang menghasilkan kain, bajak dan perkakas lain buat desa-desa, karena semua barang ini dimonopoli atau diborong oleh Belanda. Desa tidak mengadakan hasil untuk penduduk kota, hanya tebu, the, getah kopi dan barang mentah lainnya. Bukan untuk keperluan negeri atau bumi outer, melainkan untuk keuntungan si pengisap yang tidur di Belanda. Sebab itu desa dan kota kita satu

dengan lainnya tidak bergandengan seperti pada suatu negeri yang sehat ekonominya, melainkan keduanya untuk pengisi perut besar si Lintah darat yang tidur di Belanda saja. Maka dari itu, majunya kapitalisme di negeri kita jadi kunstmatig atau tak sehat. Karena perusahaan di negeri kita tidak untuk keperluan anak bumi putera sendiri, maka barang yang perlu untuk hidup kita harus dibeli dari negeri lain dengan harga sesukanya. Dan karena tanah di Jawa terdesak oleh kebun-kebun besar, maka beras yakni nyawa kita, harus datang dari negeri lain.

Pada tahun 1922 rakyat juga membeli barang kain, sedangkan di jajahan lain seperti India, Tiongkok dan Filipina barang pakaian sudah bisa di buat di negeri sendiri. Jadi disana uang upah kain itu untuk negeri sendiri, sedangkan di Indonesia terbang kesakunya Lintah Darat Belanda. Harga beras pun demikian, meskipun beras Jawa memiliki kualitas nomor 1 di dunia dan memang orang Jawa pintar dalam bertani pada tahun 1922. Karena di Jawa hampir tidak ada kapital dan saudagar anak negeri, maka kita juga ikut dijajah dalam hal ini, maka perniagaan beras ini tidak satu peser jatuh ke tangan anak negeri. Demikianlah keuntungan perniagaan berhubungan dengan import yang pada tahun 1922 itu hampir semuanya mengalir ke saku Lintah Darat bangsa asing.

Maka jelaslah, bahwa total ekspor pada tahun 1922 semuanya dimaka oleh lintah darat Belanda yang memonopoli sekalian perusahaan besar-besar di Indonesia. Sedangkan di jajahan lain untung dari impor dan ekspor sebagian jatuh di tangan anak negeri. Maka Indonesia yang subur dan kaya ini, semua keuntungan perniagaan dan hasilnya perusahaan dan tanah terbang ke perut Lintah Darat yang tidur pulas di

belanda. Sisanya untuk keperluan bumi putera, yang gunanya untuk hidup sebentar, seperti kuda atau kebau yang dipakai menarik kereta yang diberikan makan.

Sebab kapitalisme Indonesia gunanya buat memenuhi keperluan bangsa asing, maka kromo mesti menyewa tanah untuk bertani dan jadi kuli belanda .Rakyat Indonesia tak bisa dapat pabrik kain, pabrik mesin dan kapal. Sebab Belanda takut perusahaan kainn mereka akan jatuh dan juga saudagar-saudagar Belanda, pabrik kapal dan pearusahaan-perusahaan kapal yang mengangkut barang impor dan ekspor dari Indonesia ke Belanda akan jatuh. Sebab itulah Indonesia hanya menjadi *landbow land* atau negeri pertanian, bukan menjadi negeri perusahaan atau *industry land*. Penduduknya tertinggal dan mudah ditindas.⁶⁰

Sebagaimana pengertian tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa kapitalis ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini jelas dinyatakan dalam Bab XIV pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 ini sendiri tidak lepas dan erat kaitannya dengan judul Bab XIV tersebut yaitu "Kesejahteraan Sosial".⁶¹ Maka dari itu, sistem ekonomi kita jelas berpegang pada mendahulukan kepentingan umum. Adapun bunyi pasal 33 UUD 1945 yaitu ;

1. Perfkonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atts asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

⁶⁰ Tan Malaka (1926). Semangat Muda Halaman.36 Januari 1926 Tokyo

⁶¹ Sri Edi Swasono, "pasa/ 33 UUD 1945 Harus Dipertahankan, Jangan Dirubah, Boleh Ditambah Ayat", Diktat, Perpustakaan LPEMFEUL Januari-Maret Vol. No 26 2002.

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada ayat 2 pasal 33 UUD 1945 diatas jelas mengandung ideologi kerakyatan yang artinya segala tindak perekonomian Indonesia harus memberikan manfaat kepada kepentingan umum bukan untuk pihak-pihak tertentu. Maka, sebagai warga negara yang di berikan kekuasaan sudah sepantasnya pemerintah harus mengikuti hierarki yang dimana Undang-undang dasar memiliki kedudukan tertinggi dalam pembuatan perundang-undangan selanjutnya. Tetapi realita yang terjadi sekarang, pemerintah sebagai penyelenggara negara dan DPR sebagai pembuat undang-undang dan mengawasi pemerintah yang terlampau mengagumi pasar bebas.

Suatu perjuangan dalam menghadapi situasi ini adalah Didik Rachbini yang di berbagai forum menyuarakan perlunya *political will* untuk mengubah struktur dan kekuatan ekonomi nasional. Yang akhirnya membuat Didik pun terjun menjadi anggota DPR dan merancang Undang-undang untuk membawa Indonesia menuju ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Dari perjuangan Rachbini kemudian lahir ketetapan MPR Nomor XVI/ MPR/1988 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Yang menjadi titik demokrasi ekonomi yaitu pertimbangan pada butir (b) yang mendorong demokrasi ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33 UUD 1945.⁶² Butir (b) menegaskan , "bahwa sejalan dengan perkembangan, kebutuhan dan tantangan pembangunan nasioal, diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan

⁶² Didik J. Rachbini, Politik Ekonomi Baru : Menuju Demokrasi Ekonomi, Jakarta: PT. Grasindo, 2001.

pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional

Amien Rais, yang merupakan salah satu tokoh reformasi menyebutkan istilah "begundal". Amien Rais yang merupakan mantan ketua MPR RI itu mengatakan, begundal adalah istilah untuk menyebut para pejabat publik yang tak pernah kenyang makan dari uang rakyat. Begundal ialah penyakit kronis politik dan ekonomi negeri ini. Mereka disuburkan sejak lama, bahkan sejak Indonesia merdeka. Dari waktu ke waktu penyakit ini modus, intensitasnya berbeda.⁶³

Kongres ke-12 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Surabaya pada 23 November 1993⁶⁴ mengungkapkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara relasi peningkatan investasi proyek yang dilakukan konglomerat dengan tingkat proteksi yang diperoleh dari penguasa. Merupakan rahasia umum bahwa sejumlah konglomerat (termasuk begundal pejabat publik) tumbuh besar karena fasilitas yang diperoleh oleh oknum penguasa. Fasilitas itu antara lain dari sejumlah regulasi, proteksi, koneksi, lobi, ikatan primordial, perlakuan anak emas, serta nepotisme. Proses memperoleh tender dan mengembangkan usaha, sering tidak dapat lepas dari praktik-praktik semacam itu. Permainan antara pengusaha dan penguasa ini, menyebabkan ekonomi Indonesia berbiaya tinggi (*high cost*) dan mudah panas (*overheated*). Hal ini disebabkan rapuhnya fondasi perusahaan para konglomerat kita akibat terlilit hutang (*high leverage*). Akibatnya, ekonomi kita sangat peka terhadap

⁶³ Majalah *D&R*, 15 Agustus 1998

⁶⁴ John Perkins, *Confessions of an Economic Hitman*, New York : First Plume Printing, 2006.

gejolak, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Dari paparan di atas tentang kapitalisme, keadaan Indonesia yang disebutkan Tan Malaka dalam karyanya Semangat Muda tahun 1926, dan keadaan Indonesia setelah masa penjajahan yang diwarnai dengan Konspirasi Penguasa dan Kapitalis yang tentunya hal ini membuat perekonomian Indonesia tidak mencapai tujuannya dalam Undang-Undang Dasar yakni "Kesejahteraan Sosial".

Meskipun butuh waktu yang tidak sedikit untuk membangun dan menata kembali perekonomian Nasional yang berpihak ke rakyat demi terwujudnya "kesejahteraan sosial". Kita pun bertanya "bagaimana kita memperbaikinya ?" menurut penulis hal ini bisa dijawab dari perubahan dan pembaharuan dari pemimpin kita yakni Presiden. Andil kita dalam perbaikan ekonomi ini dapat kita wujudkan dengan kritis terhadap kebijakan yang di buat pemerintah yang merugikan masyarakat sebagaimana tugas dari mahasiswa itu sendiri yakni *Social Control*, *Agent of Change* dan *Moral Value*.

C. Propaganda Penguasa Terhadap Rakyat

Dalam dinamika sistem sosial berbagai pandang tentang keniscayaan adanya pertentangan antara kelas penguasa dan kelas bawah telah menjadi diskursus yang berkepanjangan. Sejak zaman klasik hingga zaman kontemporer wacana (diskursus) mengenai pertentangan antara kelas penguasa dan kelas bawah selalu berada dalam kontroversi. Dari masing-masing zaman, diskursus tentang pertentangan itu menghasilkan produk-produk pemikiran yang masing-masing relevan terhadap

zamannya. Marx menggambarkan pertentangan kelas antara kelas pemilik modal yang ia istilahkan dengan kaum kapitalis dengan kelas pekerja yang ia istilahkan dengan kaum proletariat. Kapitalisme menurut Marx adalah suatu struktur (atau, lebih akuratnya, serangkaian struktur) yang mendirikan penghalang yang antara seorang individu dan proses produksi, produk dari proses itu, dan orang-orang lain. Pada akhirnya, kapitalisme bahkan memecah belah diri individu itu sendiri. Hal irti adalah pengertian dasar konsep *alienasi* (keterasingan): kerusakan antarhubungan alamiah antara manusia dan benda yang dihasilkannya. Alienasi terjadi karena kapitalisme telah berevolusi menjadi sistem dua-kelas di mana segalintir kapitalis memiliki proses produksi, produk-produk, dan waktu kerja dari orang-orang yang bekerja untuk mereka. Sebagai ganti menghasilkan secara alamiah untuk diri sendiri, manusia dalam masyarakat kapitalis, menghasilkan secara tidak alamiah untuk sekelompok kecil kapitalis.⁶⁵

Berangkat dari pandangan Marx itu, terlihat sekat yang membatasi antara kapitalis dan proletariat yang pada akhirnya memecahbelahhubungan-hubunganyang alamiah antara manusia dan benda yang dihasilkannya, sehingga menyebabkan ketidak seimbangan dalam sistem sosial. Ketidak seimbangan itu menyebabkan terjadinya konflik. Konflik dalam dinamika sosial lahir karena pada dasarnya masyarakat selalu mengalami perubahan sosiasl baik pada nilai dan strukturnya baik secara revulusioner maupun evolusioner. Perubahan perubahan tersebut di pengaruhi

⁶⁵ George Ritzer, *Teori Sosiologi; Dan Sosiologi Klasik Sampai perkembangan Terakhir Postmodern*; Edisi kedelapan 2012, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, him. 41-42.

oleh gerakan-gerakan sosial dari individu dan kelompok sosial yang menjadi bagian bagi masyarakat. Gerakan sosial dalam sejarah masyarakat dunia bisa muncul dalam bermacam bentuk kepentingan, seperti mengubah struktur hubungan sosial, mengubah pandangan hidup, dan kepentingan merebut peran politik.⁶⁶

Dengan demikian dalam sebuah ranah sosial terdapat upaya saling mendominasi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dalam pandangan Pierre Bourdieu, ranah sosial di istilah sebagai *field* (lapangan). *Field* adalah arena sosial orang-orang menciptakan manuver, seperti permainan dalam *game* menciptakan berbagai strategi, dan perjuangan demi sumber daya yang diinginkan.⁶⁷ Lebih lanjut ia mengatakan posisi tertentu memiliki kekuasaan yang besar dan posisi lain tidak memiliki kekuasaan. Menurut Bourdieu sumber kekuasaan bisa diperoleh dari modal (*capital*) berbeda dalam berbagai arena. Bourdieu menganalisis tiga sumber modal sumber kekuasaan, yaitu modal ekonomi, sosial, dan budaya. Modal ekonomi (*economic capital*) merupakan sumber kekuasaan dari kekayaan material. Semakin banyak harta yang dimiliki, akan semakin besar kekuasaannya. Modal sosial (*social capital*) merupakan sumber kekuasaan yang diperoleh melalui jaringan (*network*) dan pengaruh sosial. Sedangkan modal budaya (*cultural capital*) menunjuk pada cara seseorang merasakan dan mempersepsikan sesuatu, menimbang hal baik dan buruk, boleh atau tidak. Bagi Bourdieu modal budaya berbeda dari satu kelas ke kelas yang lain. Pada dimensi ini, sumbangan original Bourdieu, modal budaya beroperasi

⁶⁶ Novri Susan, *Sosiologi Konflik & Isti-Isti Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 29.

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 75

secara masif dalam menciptakan sistem hubungan posisi. Melalui modal budaya inilah dominasi kelas-kelas direproduksi untuk menjaga sistem posisi dalam masyarakat.⁶⁸

Sebuah budaya akan mereproduksi kekuasaan. dalam suatu ranah sosial dimana tempat berlangsungnya interaksi-interaksi sosial untuk melakukan hubungan-hubungan sosial, terdapat pola-pola hubungan yang berbeda-beda antara agen (individu) dan struktur (masyarakat). Menurut Anthony Giddens para agen mempunyai kemampuan untuk membuat suatu perbedaan didalam dunia sosial. Bahkan lebih kuat lagi, para agentidakbermakna tanpa kekuasaan; yakni seorang aktor berhenti menjadi seorang agen jika dia kehilangan kecakapan untuk membuat suatu perbedaan.⁶⁹ Dengan demikian seorang agensi atau aktor dapat dan berpotensi menjadi patron dalam struktur sosial. Lebih lanjut ia menambahkan, *struktur* didefinisikan sebagai "sifat-sifat penyusun [*aturan-aturan dan sumber-sumber daya...* sifat-sifat yang memungkinkan adanya praktik-praktik sosial serupa yang dapat dilihat membentang rentang waktu dan ruang dan yang memberi bentuk sistemik pada mereka".⁷⁰ Dalam hal ini seorang agen membutuhkan alat untuk mempertahankan kekuasaan, dimana alat yang dimaksud adalah hegemoni.

Gramsci menyebut istilah hegemoni untuk melihat proses menguasai kesadaran publik oleh negara. Menurut Simon, Gramsci meyakini bahwa kekuasaan negara selalu melakukan proses hegemoni. Untuk menciptakan masyarakat loyal yang merasa kepentingan negara adalah kepentingan masyarakat, maka hegemoni

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 75-76

⁶⁹ Ritzer, *Op.Cit.hlm.* 891-892

⁷⁰ *Ibid.* hlm.892

dilakukan melalui aparatus negara. Hegemoni adalah program kultural, dengan menampilkan dirinya sebagai pemimpin moral dan intelektual secara konsesual. Sebuah hubungan hegemonik ditegakkan ketika kelompok berkuasa berhasil mendapatkan persetujuan kelompok subordinat atas subordinasi mereka. Dengan kata lain, kelompok-kelompok subordinat menerima ide-ide dan kepentingan politik kelompok berkuasa, tidak ditentang karena ideologi, kultur, nilai-nilai, norma dan politiknya sudah diinternalisasi sebagai kepunyaan sendiri oleh kelompok-kelompok subordinat. Hegemoni selalu dilempar ke ruang-ruang publik sebagai wacana. Melalui teori ini, setiap ruang publik tidak pernah lepas dari kepentingan menghegemoni dari kekuasaan.⁷¹

Di era kekinian dimana arus globalisasi dan teknologi meleburkan batas antara budaya masyarakat satu dengan masyarakat lain. Sehingga celah untuk terjadinya kekacauan semakin terbuka. Hal ini dimanfaatkan oleh penguasa umum, dengan memanfaatkan kedigdayaan globalisasi dan teknologi mentransformasi pemikiran kaum-kaum yang berasal dari kelas bawah ke arah yang menunjukkan pembenaran terhadap kekuasaan. Tak terkecuali pula kelas menengah yang seyogyanya berpihak kepada kelas bawah berubah dan betransformasi menjadi sahabat kekuasaan.

Dalam tatanan sosial bangsa Indonesia kekuasaan direproduksi melalui budaya yang semakin menunjukkan pergeseran ke arah yang negatif. Kekuasaan negara semakin menampakkan ketidakseimbangan hubungan antara penguasa dan rakyat.

⁷¹ Novri Susan, *Op.Cit.hlm.* 78

Para pelaksana pemerintahan semakin menunjukkan ketidak pedulian mereka terhadap bangsa. Melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya, para penyelenggara kekuasaan negara menghegemoni rakyat dan melemparkan wacana-wacana tertentu yang menghasilkan kepercayaan rakyat pada paradoks kekuasaan negara. Dimana tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk diri pribadi atau kelompok oligarkinya. Foucoult melihat bahwa wacana tertentu menghasilkan kebenaran dan pengetahuan tertentu yang menimbulkan efek kuasa. Kebenaran disini oleh Foucoult tidak dipahami sebagai sesuatu yang datang dari langit, bukan juga sebuah konsep yang abstrak, akan tetapi diproduksi kebenaran sendiri melalui mana khalayak digiring untuk mengikuti kebenaran yang telah ditetapkan tersebut. Disini, setiap kekuasaan berpotensi menghasilkan rezim kebenaran tertentu yang disebarkan lewat wacana yang dibentuk oleh kekuasaan.⁷² Dengan demikian hegemoni merupakan sebuah paradoks kebenaran yang diciptakan oleh rezim kekuasaan, dimana dengan adanya wacana-wacana tertentu khalayak digiring untuk terus mengikuti kebenaran tersebut. Sehingga melanggengkan kekuasaan suatu rezim.

Propaganda pemerintah dilakukan dalam berbagai dimensi, mulai dari pemanfaatan media massa, tayangan hiburan televisi, hingga menyentuh bagian vital tatanan sosial yaitu bidang pendidikan. Wacana para elite merupakan suatu pesan politik yang dikemas dengan teknik pemasaran yang sebaiknya dibaca sebagai perembesan nilai komersial kedalam politik dan perembesan itu, tanpa disadari oleh

⁷² *Ibid.* hlm. 80

semua pelaku politik, tiba-tiba muncul, atau lebih tepatnya kerangka besar kolonialisme budaya itu menjadinya dan amat bersifat politis. Kelompok-kelompok politik dan para elit itu menciptakan kerangka besar kolonialisme budaya yang pada dasarnya berusaha mengontrol kehidupan sosial politik masyarakat dan dengan begitu masyarakat kapanpun bisa menjadi prajurit yang mendukung kepentingan mereka tanpa harus membayar dengan apapun terhadap masyarakat.⁷³ Sehingga pada akhirnya masyarakat tidak menyadari bahwa kekuasaan yang mutlak secara tidak langsung telah dipegang oleh pelaku-pelaku politik yang memanfaatkan masyarakat untuk melegitimasi kekuasaannya yang mutlak untuk memperoleh kepentingan pribadi atau kelompok oligarki.

Pemandangan yang sering dilakukan oleh bangsa Indonesia sekarang ini membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia seolah melegitimasi praktik-praktik pragmatis penguasa negara, seperti korupsi, suap dan lain sebagainya. Pemandangan ini tampak ketika terjadi pergantian rezim kekuasaan yang ditandai dengan pemilu. Onani pemilu demokratis seolah menjadi fantasi yang tak kunjung berujung ejakulasi. Harapan akan sebuah pemilihan yang demokratis seolah jauh dari harapan. Terbukti setiap pelaksanaan pemilu, menjadi hal yang lumrah bagi sebagian besar masyarakat untuk memilih calon-calon pemimpin yang melakukan politik transaktif, atau lazimnya politik uang (*money politics*). Hal ini sudah menjadi kebiasaan buruk dalam mekanisme pemilihan calon pemimpin. Sehingga bukan tidak mungkin apabila penguasa umum yang terpilih dari mekanisme pemilihan yang

⁷³ *Ibid.*

seperti demikian dalam melaksanakan kekuasaan akan mendapat sebuah pembenaran yang mutlak dari masyarakat. Dalam menjalankan kekuasaannya seorang aktor bisa saja melakukan hal yang sewenang-wenang namun dalam kadar yang tak terdeteksi oleh masyarakat.

Dalam upaya propagandanya terhadap rakyat, para pelaksana kekuasaan negara menjaga kekuasaannya dengan cara melempar isu-isu yang kelihatannya menarik bagi masyarakat luas yang disajikan dalam berbagai bentuk media massa, sehingga opini publik tergiring oleh apa yang selalu diberitakan oleh media, dan secara tidak langsung menggiring masyarakat untuk tidak terlibat dalam kritik-kritik mengenai pelaksanaan pemerintahan. Propaganda melalui tayangan-tayangan hiburan televisi, dilakukan dengan cara memanipulasi tayangan-tayangan televisi dalam bentuk yang semenarik mungkin, tujuannya adalah menggeser kepedulian masyarakat terhadap kelompok masyarakatnya agar bertindak lebih individual, dan secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk berperilaku konsumtif. Budaya konsumtif inilah yang nantinya akan menggiring kelompok-kelompok masyarakat lain untuk mendominasi sesamanya dengan cara yang pragmatis, hedonis dan cenderung koruptif. Dalam bidang pendidikan propaganda yang diberikan adalah mengubah pola pikir para pelajar untuk lebih mementingkan prospek dibanding proses. Ketakutan para pelajar dalam persaingannya di dunia kerja, mengakibatkan para pelajar tidak peduli dengan dunia sekitarnya dan hanya mementingkan dunia akademik yang cenderung formalistik. Yang menjadi sasaran utama penguasa dalam mengintervensi dunia pendidikan adalah mahasiswa. Mahasiswa dianggap sebagai kelas menengah

yang paling berbahaya dan seringkali mengancam kekuasaan.maka cara yang paling tepat untuk menghentikan gerak mahasiswa adalah mengintervensi dunia pendidikan tinggi dengan kebijakan-kebijakan yang mematikan gerak mahasiswa dan mengubah pola pikir mahasiswa untuk lebih fokus dengan prospek kerjanya kedepan. Sehingga mahasiswa menutup mata dan tidak mau mengetahui gejala sosial yang ada disekitarnya dan secara tidak langsung melegitimasi kekuasaan oligarkis yang korup. Dengan demikian bangun kekuasaan yang mutlak dan koruptif menjadi bangunan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Segala bentuk dominasi kekuasaan atau represi politik adalah kekerasan struktural. Bentuknya bisa berupa struktur, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga keamanan, atau sistem birokrasi yang menekan dan menghambat kebebasan manusia. Bisa juga secara langsung berupa penggunaan otoritas yang menyebabkan terjadinya kekerasan.Dominasi kekuasaan atau represi politik biasanya dilakukan dengan menjustifikasi politik dan hukum tertentu yang digunakan sebagai sarana untuk melegalkan dan mensahkan secara politik penggunaan otoritas dalam suatu kebijakan. Hegemoni disisi lain, merupakan kekerasan yang bersifat kultural. Hegemoni belangsung melalui pemberlakuan. suatu nilai, pandangan moral, paham, ideologi, atau konstruksi pengetahuan untuk mengontrol dan mempengaruhi kesadaran atau alam pikir manusia.Bentuknya bisa klaim atas kebenaran, pandangan kultural, ideologi politik, manipulasi kekuasaan, atau penciptaan kebohongan-kebohongan

publik. Dalam hegemoni, kekuasaan sering sekali identik dengan kebenaran.⁷⁴

Dengan adanya propaganda dan hegemoni, kekuasaan pemerintah akan tampak "benar" dalam pelaksanaannya. Kepalsuan-kepalsuan yang ditunjukkan oleh penguasa membutakan masyarakat terhadap kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga apa yang sesungguhnya dilakukan oleh pemerintah dileburkan dengan wacana-wacana dan isu-isu palsu yang ditunjukkan dihadapan publik. Dengan demikian praktik pelaksanaan pemerintahan yang sangat korup sekalipun dapat tersamarkan melalui propaganda dan hegemoni kekuasaan. Inilah yang dimaksud dengan bentuk hegemoni yang secara perlahan membunuh masyarakat kelas bawah.

D. Tertidurnya Kelas Menengah dan Butanya Masyarakat.

Hegemoni adalah membunuh, namun seolah merangkul. Menampar namun seolah mengelus. Menginjak-injak namun seolah memijat. Pendeknya hegemoni adalah senyum drakula yang menyembunyikan taringnya. Ialah penindas yang berbohong menjadi penolong. Sementara dominasi adalah praktik kekuasaan yang "jujur". Ia membunuh dengan menusuk langsung ke jantung. Menampar dengan terang-terangan. Menginjak-injak dengan akibat rasa sakit seketika. Dominasi adalah tertawanya drakula yang mempertontonkan taringnya. Ia penindas yang jujur mengaku sebagai penindas. Jika dominasi adalah otoritarianisme yang terang

⁷⁴ Lambang Trijono, *Pembangunan Sebagai Perdantaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 49

terangan, maka hegemoni adalah otoritarianisme berbaju demokrasi.⁷⁵

Tampak perbedaan antara orde baru dan reformasi. Jika orde baru tampil terang-terangan dengan dominasi, maka reformasi tampil dengan paradoks demokrasi dan hegemoni. Di era reformasi sekarang ini hegemoni penguasa masuk dalam setiap sisi kehidupan manusia, merayu dengan pembodohan, dan membunuh secara perlahan. Mulai dari bidang politik mereka merayu dengan janji-janji politik layaknya kaum demagog, memasarkan citra dibalik kemunafikan. Dalam bidang hukum, mereka membuat kebijakan-kebijakan yang seolah-olah ideal padahal justru menimbulkan kekacauan. Hukum yang seharusnya diperjuangkan kepada rakyat-rakyat kecil, malah justru berubah menjadi produk yang di komersialkan. Pejuang hukum hanya sebatas simbol. Pejuang hukum di era sekarang malah justru berubah menjadi pedagang yang menjajakan dagangannya yang berupa argumen-argumen pembenar yang memihak pada kuasa materi dan uang. Hukum digunakan untuk melindungi dan memperkuat kekuasaan. Secara halus berbagai kebijakan muncul untuk meredam kritik. Memang tidak secara langsung namun muncul dengan seolah-olah. Dalam bidang ekonomi, muncul berbagai kebijakan yang menguntungkan kaum kapitalis yang mengakibatkan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin tertindas. Budaya konsumtif dibangun, dikonstruksi secara masif dalam pola pikir masyarakat, sehingga perilaku-prilaku pragmatis menjadi budaya yang kokoh.

⁷⁵ Eep Syaifulloh Fatah, *Mencintai Indonesia Dengan Antal: Refleksi Atas Fase Awal Demokrasi*, Jakarta: Republika, 2004, lam. 35

Dengan demikian kekuasaan yang kokoh itu suatu saat akan membunuh rakyatnya sendiri dengan perlahan-lahan. Praktik-praktik korupsi sudah merajalela dan membudaya hingga dalam tatanan masyarakat yang paling sederhana sekalipun. Amanat konstitusi sebagai suatu kepastian yang menggambarkan tujuan negara diabaikan oleh penguasa negara demi mendapatkan kesenangan-kesenangan pribadi dan kelompok oligarkinya. Praktik oligarki kekuasaan menandakan sebuah petanda besar kehancuran bangsa. Namun suatu budaya yang kokoh sekalipun mau tidak mau harus bertarung dengan perkembangan zaman. Begitu pula dengan praktik-praktik korupsi yang dianggap telah membudaya dengan kokoh juga telah memilih untuk bertarung dengan pola pikir yang rasional. Bukan berarti praktik korupsi yang telah kokoh dan membudaya sudah tidak mampu lagi untuk dirubah. Hanya yang mampu berpikir rasional lah yang mampu merubah budaya tersebut.

Jika dalam kenyataannya yang terjadi adalah demikian, apakah suatu bangsa harus menerima begitu saja perlakuan para penguasa yang mengabaikan kepentingan-kepentingan umum demi kepentingan pribadi dan kelompoknya? semua bangsa didunia ini mungkin akan sepakat bahwa suatu perlakuan yang sewenang-wenang itu harus dilawan. Sebuah *status quo* tidak boleh terus dipertahankan, apalagi jika *satus qou* itu menandakan sebuah kehancuran. Sebab pada dasarnya setiap yang ada dimuka bumi ini selalu berubah-ubah untuk mentransformasi diri menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, jika dalam revolusi prancis yang berperan besar dalam melakukan perubahan adalah kelas menengah, maka dalam konteks keindonesiaan untuk menghadapi berbagai ketidakadilan penguasa dibutuhkan juga peran dari kelas

menengah yang menyuarakan perlawanan terhadap ketidakadilan penguasa. Lalu siapakah yang dimaksud dengan kelas menengah itu ?

Jika kelas menengah yang menjadi suksesor perubahan (revolusi) Prancis adalah golongan-golongan yang mapan secara ekonomi, yaitu para pengusaha independen yang tidak bergantung pada negara. Dalam konteks keindonesiaan yang dimaksud dengan kelas menengah sebaiknya ditransformasikan kepada kelompok-kelompok yang ingin melakukan proses pembaruan atau reformasi terhadap segala persoalan yang dianggap menjadi kendala untuk menyejahterakan rakyat, baik aspek ekonominya, maupun sosial-politiknya. Jadi dalam konteks keindonesiaan kelas menengah bukan berarti dari golongan yang mapan secara ekonomi saja.⁷⁶

Namun yang menjadi persoalan adalah kemana perginya kelas menengah itu saat ini. Euforia reformasi masih terasa hingga saat ini, namun bukan menjadi alasan bahwa suatu pergerakan juga harus tertidur menanti kembali terjadinya kekacauan. Kelas menengah berfungsi sebagai alat kontrol dalam suatu tatanan sosial. Perubahan suatu kelompok yang mengarah ke arah penyimpangan, haruslah dikontrol melalui mekanisme sistem yang di motori oleh kelas menengah tersebut. Pencapaian tujuan suatu kelompok merupakan suatu kesatuan gerak yang sistematis antara penguasa, kelas menengah, dan masyarakat. Kelas menengah adalah penghubung antara penguasa dan rakyat yang bergerak dua arah, disamping mengawasi penguasa kelas menengah

⁷⁶ Happy Bone Zulkarnain, dalam pengantar buku *Menggusur Status Quo; Esai-esai Perjalanan Mahasiswa, Cendekiawan, dan Kelas Menengah Indonesia Dalam Menegakkan Demokratisasi dan Reformasi Di Masa Orde Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998

juga menjaga keseimbangan perubahan masyarakat. Kelas menengah sekarang seperti kehilangan taji. Sebab pemikiran mereka telah dimanipulasi oleh teknologi, sehingga mereka yang pada awalnya merupakan *agent of change* telah berevolusi menjadi *agent of behavior*. Dimana *agent of behavior* merupakan agen yang di desain oleh penguasa untuk mempertahankan status quo. Dengan begitu agen tersebut adalah agen dari penguasa yang kemudian berpihak pada penguasa.⁷⁷

Reformasi mereproduksi kapitalisme dan oligarki. Perjuangan reformasi 1998 membebaskan rakyat indonesia dari kediktatoran penguasa, namun melahirkan kebebasan yang lebih liberal yaitu kapitalisme dan oligarki. Kenyataanlah yang membuktikan bahwa pelaksanaan sistem pemerintahan dipenuhi dengan intrik-intrik modal, negosiasi politik dan oligarki. Kepalsuan menjadi senjata ampuh yang menidurkan kelas menengah. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa, namun apabila ditelusuri lebih jauh implikasi dari praktik politik penguasa akan berdampak buruk bagi bangsa indonesia.

Pada dasarnya kelas menengah terdiri dari kalangan pengusaha, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), akademisi/ cendekiawan, dan mahasiswa. Namun sedikit demi sedikit dari empat kategori itu terdegradasi. Hingga yang tersisa pada saat terjadinya reformasi di tahun 1998 hanyalah akademisi/ cendekiawan dan mahasiswa. Pendegradasian kalangan pengusaha dalam kategori kelas menengah kala itu adalah diakibatkan karena para pengusaha jarang mengeluarkan suatu pendapat

⁷⁷ Ceramah singkat Kakanda Alwi Rahman dalam seminar nasional Garda Tipikor FH-UH, 4, Maret, 2016.

perihal ketimpangan sosial, ekonomi, ataupun politik yang ada dalam lingkup negara indonesia. Seperti yang dikatakan Loekman Soetrisno "para pengusaha besar nasional yang bergabung dalam organisasi Kamar Dagang Indonesia (KADIN) jarang memberikan suatu pendapat perihal ketimpangan sosial, ekonomi, ataupun politik yang ada dinegara kita.Terasa bahwa KADIN sebagai wadah dari pengusaha nasioanal Indonesia hanya memperjuangkan kepentingan golongan mereka terlepas dari kepentingan rakyat pada umumnya". Lebih lanjut ia mengatakan "Disamping itu kemandulan golongan ini dalam menransformasikan diri mereka menjadi golonagn pembaru disebabkan Tatar belakan sosial dari pengusaha-pengusaha tersebut. Kebanyakan pengusaha nasional yang dominan di Indonesia adalah mantan pejabat tinggi, perwira-perwira ABRI atau putra-putri mereka atau orang-orang yang memiliki hubungan denganpara pejabat di pemerintahan.Jelas mereka bukanlah orang-orang *wirausaha*. Hal ini menyebabkan orientasi ekonomi, sosial maupun politik mereka tidak akan mungkin berbeda dengan pemerintah. Usaha dari pihak penguasa untuk mempunyai pandangan ekonomi, sosial maupun politik yang berbeda dari pemerintah akan berarti tertutupnya lapangan usaha mereka. Suatu resiko yang dihindari para pengusaha tersebut".⁷⁸ Kemudian alasan kenapa LSM juga terdegradasi ialah kurang pekanya lembaga swadaya saat itu terhadap carut-marut reformasi. LSM yang seharusnya menjadi patron penggerak kelas menengah lain untuk menuntut

⁷⁸ *Andito Dkk*, Menggusur Status Quo; Esai-esai Perjalanan Mahasiswa, Cendekiawan, dan Kelas Menengah Indonesia Dalam Menegakkan Demokratisasi dan Reformasi Di Masa Orde Baru,*Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998, him. 15-16*

sebuah perubahan malah justru hilang taji.

Jika melihat dinamika sosial bangsa Indonesia dalam konteks kekinian apa yang telah dikatakan oleh Loekman Soetrisno itu masih relevan dengan perilaku pengusaha di era reformasi sekarang ini. Hubungan timbal balik antara penguasa dan kapitalis sering mengaburkan batasan antara penguasa dan kapitalis. Sebab dalam arena pertarungan politik nasional saat ini, banyak partai-partai politik yang dikuasai oleh pengusaha-pengusaha kapitalis. Hal ini membuktikan bahwa, hanya orang-orang yang bermodal lah yang mampu melanggengkan kekuasaan dan memonopoli setiap sisi kehidupan bangsa. Dengan adanya kenyataan yang seperti itu saat ini, golongan kelas menengah lain yaitu akademisi dan cendekiawan juga mulai menampilkan pragmatismenya terhadap hegemoni kekuasaan. Jika merujuk kembali peristiwa yang terjadi pada tahun 1998, para akademisi dan para cendekiawan justru memiliki andil besar dalam melakukan manajemen pergerakan serta manajemen aksi. Maka pantaslah apabila mereka juga dijuluki sebagai salah satu suksesor perubahan yang paling berbahaya. Namun, tidak demikian di era reformasi. Dunia akademik mulai diintervensi oleh penguasa, dimana antara penguasa dan birokrat-birokrat kampus berupaya mengkonstruksi pemikiran mahasiswa melalui kebijakan-kebijakan kampus. Mulai dari pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan kemahasiswaan, sistem *drop-out* jika tidak mampu menyelesaikan studi dalam waktu yang sudah ditentukan, dan sebagainya merupakan alat penguasa untuk mempengaruhi pemikiran mahasiswa. Dan inilah yang menjadi indikator terpengaruhnya pemikiran akademisi dan cendekiawan dalam hegemoni kekuasaan.

Dunia akademik yang menjadi basis utama kelas menengah terakhir yaitu mahasiswa, juga terkontaminasi oleh hegemoni dan propaganda penguasa. Paradigma berpikir mahasiswa yang cenderung pragmatis kelak akan menjadi pelaku-pelaku politik yang koruptif. Eko Prasetyo menggambarkan dunia kampus dan mahasiswa di era sekarang sebagaimana dikutip dalam bukunya *"Bangkitlah pergerakan mahasiswa"*. "...mahasiswa dilatih untuk berpakaian sopan, mencukur rambut dengan rapi dan masuk dengan tertib. Susunan bangku berurutan dari depan kebelakang. Teratur dan terkendali. Seperti yang kubilang diawal, pekarang kampus tidak hanya ditumbuhi dengan tanaman tapi juga papan larangan. Malah ada pintu kampus yang ditancapkan gambar dosen-dosen yang jadi pejabat. Singkatnya, di bawah orde kapitalis, kampus sibuk merias dan berpamer diri. Memalukan jika kita merunut pada sejarah perguruan tinggi, yang sejujurnya tak terlampau hirau dengan penampilan apalagi ketertiban masuk kelas. Pendirian kampus selalu dikaitkan dengan mandat pembebasan. Terutama kampus yang tinggal di negara yang masih punya problem kedaulatan. Walau sudah menyebut dirinya merdeka tapi makna hakiki sebagai bangsa berdaulat terkubur."⁷⁹

Demikianlah realitas mahasiswa dan kampus saat ini. Simbol kelas menengah sebagai aktor pembawa perubahan justru kehilangan taji tatkala para penguasa merajalela menghisap dan menguras kekayaan bangsa. Bukan hanya mahasiswa yang kehilangan taji namun juga semua kelas menengah yang ditidurkan melalui propaganda dan hegemoni penguasa. Reformasi menjadi sajian paradoks untuk

⁷⁹ Eko Prasetyo, *Bangkitlah Gerakan Mahasiswa*, Malang: Intrans publishing, 2015, hlm. 159

menidurkan kelas menengah. Seperti tak terjadi apa-apa, ibu pertiwi menangis namun tertutup oleh selendang halus para penguasa yang munafik. Mungkin sudah saatnya para pemangku simbol kelas menengah mulai merefleksikan pikiran mereka kepada gejala-gejala sosial yang terjadi disekitar mereka. Yang harus dilihat saat ini adalah betapa timpangnya jarak antara tujuan dan cita-cita bangsa dengan realitas sosial bangsa Indonesia yang semakin hari semakin memprihatinkan. Tak ada lagi penguasa yang bisa dipercaya, para penguasa sibuk dengan kepentingan pribadi dan kelompok oligarkinya. Tak mungkin menunggu mereka untuk bertaubat, menunggu mereka bertaubat sama saja dengan menunggu darah bangsa habis terhisap.

Apakah pernah Soekarno-Hatta, Gandhi-Nehru, Abdel Naser, Ho CM Minh, Mao Zedong dan lain-lain dulu berdoa agar pemerintah kolonial bertaubat? Mereka tidak senaif itu. Pejuang-pejuang muda sekaliber Soekarno-Hatta tidak menyibukkan diri agar suksesi Gubernur Jenderal de Jong oleh Tjarda van Starkenborgh Stachouwer akan memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia atau mengharapkan agar Volksraad bertaubat menjadi komite nasional Indonesia Merdeka. Mereka muda-muda waktu itu dan bukan jenis pelari estafet. Mereka mempersiapkan paradigma baru bagi hari depan bangsa. Dan mereka berhasil, meskipun relatif amat sedikit pengikut mereka. Dengan modal apa? Pertama, hati yang mampu mendengar dan ikut merasakan penderitaan rakyat dan secara pribadi tak gentar menderita pula. Kedua, mereka berinteleksi tinggi, mampu menyerap segala yang baik dan bijak dari buddya, Asia, Eropa, Amerika dan benua-benua lain. Kemenangan RI bukan kemenangan senjata (pasukan-pasukan bersenjata Belanda dan RI remis, tidak ada

yang menang, tidak ada yang kalah), tetapi berkat intelegensi tinggi yang cerdas memanfaatkan faktor-faktor obyektif dan subyektif, regional maupun internasional. Dan yang ketiga, Soekarno-Hatta dan kawan-kawan selalu mencari jalan damai, jalan tanpa kekerasan. Tanpa mengabaikan hak membela diri bila kekerasan dipakai lawan. Dari tiga bentuk modal itu tentulah ada satu dua yang masih kurang dan masih perlu ditingkatkan pada generasi muda sekarang, tergantung situasi dan posisi. Dan akhirnya modal keempat adalah waktu. Atau dalam bahasa mitologi: senjata pamungkas cakra.

Perubahan dan perbaikan besar-besaran memerlukan waktu bila mau mengakar mendalam. Tidak pernah ada perubahan total berjalan mendadak dan lewat jalan pintas.⁸⁰ Kesadaran akan sebuah perubahan haruslah berakar tumbuh dalam benak kaum muda saat ini terkhusus untuk kelas menengah, dan lebih khusus lagi mahasiswa. Sebagai pemangku kelas menengah dan pembawa perubahan sudah selayaknya kaum muda khususnya mahasiswa peka terhadap gejala sosial yang ada disekitar mereka, lalu kemudian menciptakan berbagai gerakan yang inovatif untuk mengalahkan hegemoni kekuasaan dan membawa sebuah perubahan.

⁸⁰ Andito, Op. cit. hlm. 207-208

BAB III

PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI SISTEM HUKUM

*"Terukir kehancuran negeriku
Saat alinea keempat dibungkam
Dengan kelicikan meretas aturan
Koruptor sedang memahat kekuasaan"*
(Musthakim Algozaly)

A. Korupsi Kekuasaan Sebagai Suatu Kejahatan.

Soehino⁸¹ memaparkan bahwa *"Negara sebagai wadah dari suatu bangsa yang diciptakan oleh negara itu sendiri dan untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsanya."* Berdirinya suatu negara selalu disertai oleh keinginan pemegang kedaulatan negara itu sendiri. Pemegang kedaulatan negara yang dimaksudkan, khususnya negara demokrasi seperti Indonesia adalah kumpulan orang-orang yang kemudian dikenal dengan sebutan rakyat. Mereka yang menghendaki adanya suatu wadah sebagai alat untuk menyegerakan tujuannya membentuk organisasi berlandaskan keinginan bersama, bergerak bersama, dan meraihnya secara bersama-sama.

Kemudian, terjadilah konsensus antara rakyat dan suatu otoritas hingga terciptalah suatu konstitusi. Dari hal itu, muncullah kontrak dan janji kedua belah pihak dalam bentuk postulat-postulat yang mengindikasikan tujuan berdirinya suatu Negara. Saat itu pula petualangan dan perjalanan meraih cita-cita bangsa dimulai dengan ditandai oleh sebuah konstitusi tertulis bernama Undang-Undang Dasar. Hal

⁸¹ Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 146.

ini senada dengan apa yang konsepsikan oleh Savornin Lohman⁸² yang dinyatakan dalam tiga unsur, yaitu:

1. Konstitusi dipandang sebagai kontrak sosial sebagai manifestasi perjanjian antara masyarakat dan pemerintah.
2. Konstitusi sebagai *pacta* yang menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia serta penentu batasan hak dan kewajiban baik rakyat maupun pemerintah.
3. Sebagai *forma regimenis*, berarti sebagai kerangka bangunan pemerintahan atau gambaran struktur pemerintahan negara.

Dalam perjalanan menuju orientasi suatu negara dibutuhkan rangkaian perangkat yang secara komprehensif mampu merangkul seluruh keinginan berdirinya dari negara tersebut. Selain itu, pola dan alur perjalanansejogyanya ditata dan disistematisasikan agar mengefisiensikan dan mengefetifkan langkah-langkah menuju tujuan negara. Pendapat C. F. Strong⁸³ ialah "*Konstitusi sebagai kerangka negara yang terorganisir secara normatif kemudian hukum menetapkan pengaturan terkait pendirian lembaga-lembaga yang permanen, fungsi alat dari alat-alat kelengkapan, dan hak-hak tertentu yang telah ditetapkan.*"Hal-hal terkait perangkat negara kemudian disusun dan dilembagakan yang akan melahirkan suatu struktur pemerintahan. Selanjutnya, struktur ini akan berisikan komposisi-komposisi vital penggerak roda suatu negara untuk mendekatkan dengan tujuannya. Setelah itu negara membentuk rangkaian sistem dan pola yang mampu menggerakkan struktur

⁸² M. Solly Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 48.

⁸³ Romi Librayanto, *Iluui Negara*, Makassar: Refleksi Pustaka, 2010, hlm. 223.

tadi ke arah yang ditargetkan. Maka dari itu dibuatlah sebuah sistem hukum yang bermuatan aturan tertulis kemudian diharapkan mampu secara tepat melangkah maju ke arah yang tepat. Aturan-aturan mengenai sistem hukum tidak terlepas dari kehendak dan kebiasaan masyarakat dalam negara itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan hal-hal urgen dan dibutuhkan suatu warga masyarakat.

Hernold Ferry⁸⁴ berpendapat bahwa *"Keuangan negara sebagai alat mewujudkan tujuan negara, penyelenggaraan untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat di nilai dengan uang."* Segala elemen dan perangkat tadi bersumber dan berfungsi jika keperluan logistik telah terpenuhi, dalam hal ini adalah keuangan negara. Ibarat sebuah kendaraan, maka kendaraan selalu membutuhkan bahan bakar untuk bergerak. Maka, sama halnya dengan perangkat ketatanegaraan yang membutuhkan dana untuk menjalankan fungsinya. Dalam konteks sebuah keuangan negara tidak sesederhana kendaraan yang membutuhkan bahan bakar. Kendala selalu saja muncul dalam penggunaan dana dari negara. Kendala dalam bentuk struktural, fungsional, dan teknis yang kian lama makin banyak, makin menumpuk, dan eksekusi penyelesaian kendala yang sangat tidak berpihak pada percepatan menuju tujuan negara menjadi momok bagi negara itu sendiri.

Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak negara yang memiliki masalah internal yang menghambat kemajuannya. Negara ini memiliki masalah klasik,

⁸⁴ Hernold Ferry Makawimbang, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015, hhn. 6-7.

masalah turun-temurun, masalah yang diwariskan, masalah yang dikembangkan, masalah yang dilestarikan, dan masalah yang dijaga eksistensinya yaitu permasalahan korupsi. Dari tahun ke tahun alternatif untuk melestarikan korupsi di Indonesia selalu bermunculan dalam varian dan formula yang baru. Hal tersebut berimbas pada pemberantasannya yang kian hari semakin sulit. Kilas balik sejarah dalam sebuah artikel tentang sejarah korupsi di Indonesia diceritakan bahwa:

"Catatan sejarah memang menunjukkan bahwa pada paruh kedua abad ke-18 VOC digerogoti oleh korupsi yang akut. Pada tanggal 12 Desember 1642 Gubernur Jenderal Antonio Van Diemen bahkan menyurati Heeren XVII tentang parahnya korupsi yang terjadi di tubuh VOC. Berbagai upaya untuk (sic) memberantas korupsi di dalam tubuh asosiasi dagang ini tak berhasil. Sehingga tak jarang dikatakan bahwa korupsi sudah menjadi kenyataan hidup... Persoalan korupsi ini tidak berarti tuntas tatkala VOC digantikan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sistem birokrasi Hindia Belanda yang mengenal dua sistem, Bestuur Beambten (BB) dan Pangreh Praja, memicu tindakan korupsi dalam bentuk yang lain. Pada masa Tanam Paksa, 1830-1870, penduduk pribumi diwajibkan untuk menanam beberapa jenis tanaman yang laku di pasar-pasar Eropa. Menurut peraturan, para petani diharuskan untuk menanam 1/3 bagian dari tanahnya bagi tanaman wajib tersebut. Umumnya tanaman tersebut berusia tahunan seperti kopi, teh, atau nila. Berdasarkan peraturan harus mengubah 1/3 bagian dari sawah-sawah produktif mereka guna tanaman tersebut dan meluangkan 1/3 waktu mereka

untuk mengawasi tanaman tersebut.

Akan tetapi, dalam praktiknya kepala desa, demang, wedana, atau bupati yang bertanggung jawab atas Tanam Paksa tersebut justru memaksa para petani untuk menanam 2/3 bagian dari tanahnya untuk tanaman wajib, keuntungan yang didapat sudah barang tentu masuk dalam kantong pribadi para pejabat tersebut. Sementara itu, residen-residen dan pengawas (controleur) Hindia Belanda mendinginkan saja praktik tersebut karena mendapatkan bagian yang tidak sedikit.⁸⁵

Negara ini telah dilukis oleh tangan-tangan oligarki yang mengikrarkan kemajuan Indonesia sekaligus menyerukan korupsi harus dibudidayakan. Ada dua hal yang tidak koheren yang dilakukan para penguasa di negeri ini. Di sinilah titik yang bertolak yang mereka selalu lakukan. Logika rasional tidak mungkin mampu menemukan kebenaran ketika seseorang melakukan hal yang berbeda pada saat bersamaan. Namun, karena keunikan paradigma berpikir kaum penguasa maka disintegritas ini bisa dilakukan di negeri tercinta kita, Indonesia. Mereka secara sadar melakukan praktik korupsi tanpa melihat nasib malang sebagian masyarakatnya. Jabatan, kekuasaan, serta uang telah menjadi nutrisi di tubuhnya sehingga menjadikan mereka bak mesin pencetak uang dan boneka yang haus kekuasaan.

Demi tujuan esensial suatu negara, maka praktik-praktik korupsi secara nyata yang makin menjauhi tujuan negara, harus segera diberantas. Dalam suatu entitas

⁸⁵ Muhammad Mustofa, *Kleptokrasi: Persekongkolan BirokratKorporasi sebagai. Polo White-Collar Crime di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010, him. 13-14. Periksa juga dalam (www.thamrin.wordpress: 8 Juni 2007)

pelaksanaan pemberantasan korupsi dibutuhkan sebuah alur dan jalan. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan tersebut memiliki garis koordinasi yang kuat sehingga mampu secara tepat mengakhiri cerita korupsi yang begitu masif di negeri ini. Dengan demikian, dibutuhkan suatu sistem hukum yang konsisten sebagai langkah awal pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Konsep Lawrence M. Friedman Tentang Sistem Hukum

Sebelum masuk ke pembahasan konsep sistem hukum Friedman, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu arti dari sistem itu sendiri. Sistem memiliki karakteristik tertentu, yaitu terdiri dari elemenelemen yang memiliki fungsi masing-masing, saling berhubungan, saling mendukung, dan saling mengikat. Kemudian, terhimpun dalam suatu wadah atau organisasi untuk mencapai tujuan sistem itu sendiri. Dari elemen-elemen tadi, sistem ini bergerak ke arah tujuan organisasi sesuai dengan visi. Terkait dengan hukum,

Subekti⁸⁶ berpendapat bahwa *"Suatu sistem adalah susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan"* Dalam mengoperasionalkan sistem tersebut tidak boleh terjadi suatu benturan fungsi antarbagian. Pun duplikasi peranan atau tumpang tindih (*over lapping*) yang berpotensi pada kerusakan sistem secara keseluruhan. Pendapat

⁸⁶ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm. 67.

dari B ter Haar Bzn⁸⁷ dalam bukunya "*beginselen*" en "*stelsel*" (*van het Adatrecht*) bahwa "*stelsel*" adalah sistem yang lazim kita maksud, sedangkan "*beginselen*" adalah asas-asas (*basic principles*) atau pondasi pendukung sistem. Diturunkan menjadi suatu aturan berbentuk koridor-koridor fungsi dan batasan-batasan antarbagian sebagai penyokong efektivitas berjalannya suatu sistem."

Idealnya setiap sistem bermateri beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Singkat kata bahwa asas tidak mungkin tidak dimiliki oleh tiap sistem. Maka dari itu, sifat sistem itu memiliki rambu-rambu struktural yang menentukan porsi dari tiap bagian terkait hubungan fungsional yang menyeluruh dan sistematis. Jadi dalam realitanya hukum menjadi sebuah sistem yang mampu kokoh berdiri jika didukung oleh elemen-elemen yang berfungsi optimal dan harmonis. Misalkan dalam hukum tata negara sebuah sistem pembagian kekuasaan yang disampaikan John Locke dan Montesquieu⁸⁸ bahwa mereka melihat tentang penyelenggaraan organisasi di Inggris. Mereka mengemukakan suatu pendapat bahwa tugas negara itu dapat dibagi dalam tiga kelompok kegiatan. Pendapat itu oleh Immanuel Kant⁸⁹ diberi nama *Trias Politica*. Pembagian tugas dilakukan atas dasar kekuasaan perundang-undangan (legislatif), kekuasaan penyelenggara (eksekutif), dan kekuasaan peradilan (yudikatif). Dengan demikian, dari kekuasaan tersebut menghasilkan fungsi dan tugas masing-masing lembaga tinggi negara yang nantinya memiliki kedudukan yang sama dan saling mengawasi dalam menjalankan kekuasaan

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 67.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 91.

⁸⁹ *Ibid*.

atau biasa dikenal dengan prinsip (checks and balances).

Berakar dari sejarah Indonesia, hukum adat menjadi suatu sistem hukum yang pertama dianut oleh masyarakat terdahulu. Sistem hukum adat yang sifatnya tidak tertulis menekankan pada kepercayaan dan pedoman-pedoman suci dari nenek moyang mereka. Hal ini menjadi acuan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Pemegang peranan penting dalam pelaksanaan sistem hukum adat ini adalah ketua adat yang memiliki wewenang untuk membuat suatu kebijakan yang nantinya akan dilakukan oleh masyarakat adat sebagai pola berkehidupan. Dengan kata lain, sistem hukum adat adalah satu-satu sistem hukum yang diberlakukan saat itu. Selanjutnya pada abad pertengahan, berdatang pertama kali bangsa asing yaitu bangsa Arab. Kedatangan bangsa Arab dimaksudkan untuk berdagang, selain itu menyebarkan ajaran agama Islam. Mereka mengenalkan agama Islam bagi mereka yang masih menganut ajaran agama leluhur. Dalam waktu yang relatif singkat, agama Islam mampu diterima oleh masyarakat karena ada hal yang bersesuaian antara agama Islam dan hukum-hukum adat yang berlaku. Kesesuaian hal tersebut saling bersinggungan mengenai moral dan etika. Dengan demikian, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam mampu bersinergi dan berlaku sebagai sistem hukum yang berbeda. Kemudian, rezim penjajahan belanda dimulai. Akibat kolonialisme Belanda, terjadi suatu penambahan dalam sistem hukum. Pada era penjajahan Belanda sistem hukum menjadi lebih formal karena corak sistem hukum Belanda menganut sistem hukum Eropa dengan istilah *Civil Law System*. Prinsip utama sistem hukum Eropa Daratan adalah kekuatan mengikat yang dimiliki oleh hukum karena dibentuk oleh peraturan-

peraturan yang berwujud undang-undang dan tersusun secara sistematis dalam sebuah kitab. Orientasi kepastian hukum yang menjadi prioritas utama dalam sistem hukum ini agar dalam pergaulan hidupnya, masyarakat mampu mengetahui ada aturan yang mengatur tindakan-tindakannya. Pada akhirnya Indonesia terjadi pluralitas hukum dalam sistem hukum Indonesia yang mengatur tata hidup masyarakat dalam waktu bersamaan.

Dalam tataran pembuatan undang-undang itu sendiri harus terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan kehendak dari masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang bertuliskan "*Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*". Amanat ini menginstruksikan bahwa setiap kebijakan, setiap aturan, dan setiap undang-undang harus bermuatan materi keinginan rakyat. Namun, dalam praktiknya pembuatan undang-undang oleh DPR tidak selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Anggota DPR sebagai wali seluruh rakyat Indonesia tidak merepresentasikan kehendak yang mereka wakikan, yaitu rakyat. Sebagai contoh Naskah Revisi UU KPK berisi poin-poin yang mengindikasikan pelemahan fungsi lembaga antirasuah tersebut antara lain, Pembentukan dewan pengawas KPK, wewenang KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), dan pengaturan wewenang penyadapan (dan penyitaan) yang memerlukan izin dewan pengawas.

Pelemahan tersebut sangat berpotensi pada menurunnya kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK sehingga Indonesia sekali lagi akan makin jauh dari tujuan konstitusinya. Pengkhianatan terhadap sebuah konstitusi salah

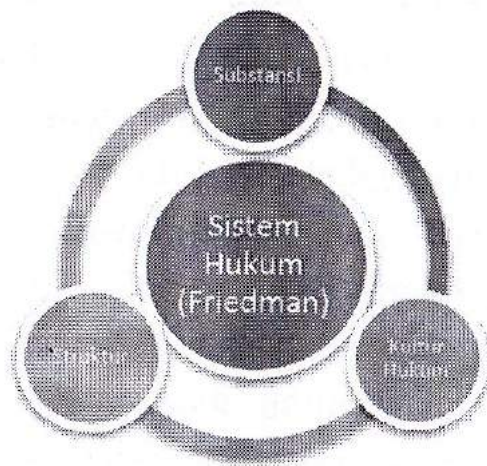
satu cikal bakal kerusakan sistem hukum suatu negara. Kecacatan tersebut disebabkan oleh tidak diindahkannya aturan dan pedoman bernegara yang dilakukan oleh sebuah bagian vital dari suatu sistem hukum dalam sebuah negara. Muara dari pengkhianatan ini nanti berbentuk penyalahgunaan wewenang kemudian berujung pada tindakan yang merugikan keuangan negara. Kerugian negara tercipta karena penggunaan dana yang tidak tepat sasaran atau dalam hal ini sengaja disalahgunakan yang berakhir pada tindakan koruptif.

Kerusakan-kerusakan fundamental yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mempunyai andil besar telah mengikis kekuatan suatu sistem hukum di Indonesia. Jika ketimpangan tadi berasal dari hulu, maka selanjutnya adalah mentaktisi kerusakan tersebut dengan revitalisasi sistem hukum di Indonesia. Lawrence M. Friedman⁹⁰ memaparkan sebuah konsep tentang sistem hukum yang telah diekstrak menjadi tiga komponen, yaitu:

- a. *struktur*, ialah keseluruhan pranata-pranata hukum termasuk aparaturnya, antara lain kepolisian beserta polisinya, Kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain;
- b. *substansi*, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
- c. *kultur hukum*, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan,

⁹⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori. Peradilan (Judicialpntdence) Terniasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 204.

cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.



Tiga komponen di atas menjadiseperangkat alat yang digunakan sistem hukum untuk mencapai tujuan hukum. *Pertama*, struktur dari sebuah sistem hukum sebagai penyelenggara penerapan suatu sistem hukum. Struktur ini nantinya menjadi pengantar terkait hal-hal yang substansial. Kemudian, struktur tadi menghasilkan lembaga-lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi masing-masing. Lembaga-lembaga inilah selaku eksekutor berkenaan dengan tata cara diberlakukannya sebuah sistem hukum. Aparatur-aparatur lembaga penegak hukum sebagai garda terdepan sekaligus penunjang utama tercapainya sistem hukum yang ideal. Agar sistem hukum mampu mencapai target yang ideal, pelaksanaan ini harus dilakukan berdasarkan pedoman tiap-tiap lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih terkait dengan pelaksanaan sistem hukum. Pedoman tersebut mutlak sebagai sesuatu yang sistematis dan terarah bagi lembaga-lembaga penegak hukum.

Kedua, sistem hukum yang menghasilkan keseluruhan aturan hukum yang substansial. Sebuah aturan seyogyanya tidak hanya untaian kalimat tertuang dalam secarik kertas kemudian dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, tetapi hal yang mendalam adalah makna implisit dari aturan tersebut. Atas dasar apa sajakah aturan tersebut diberlakukan, pertimbangan apa sajakah yang menetapkan aturan tersebut menjadi sebuah hukum positif. Misalnya terjadi seorang wanita usia kawin yang belum menikah melakukan hubungan badan dengan laki-laki usia kawin yang belum menikah dengan dasar suka sama suka. Lalu, wanita tersebut hamil dan di saat bersamaan laki-laki tersebut tidak dapat dikabari dan ditemui. Wanita ini kemudian menggugat laki-laki yang menghamilinya dengan alasan bahwa laki-laki tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Opsi terkait kasus ini menemui jalan buntu. Jika dibawa ke ranah pidana, maka hal tersebut tidak termasuk dalam kasus pemerkosaan karena berlandaskan keinginan keduanya dan jika dibawa ke ranah perdata, maka hal tersebut tidak diatur dalam KUHPer tentang pertanggungjawaban laki-laki yang menghamili seorang wanita pada usia kawin dan tidak menikah. Maka pengacara wanita ini menyusun gugatan dengan argumentasi menggunakan Pasal 16 UU No.4 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman "*Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa, mengadil, dan memutus perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas*".

Secara eksplisit jalan keluar dari masalah seperti di atas adalah hakim harus mampu menyelesaikan suatu masalah yang tidak termaktub dalam aturan hukum sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman berbunyi "*Hakim wajib*

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Ada dua hal secara implisit yang substansial terkait kasus ini. Pertama, seorang hakim diharapkan memiliki kecerdasan yang berkualitas dalam bentuk daya interpretasi untuk membuat suatu hukum. Kedua, materi pembentuk hukum ialah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pola hidup dan rasa adil dalam masyarakat menjadi hakikat sebuah aturan hukum.

Ketiga ialah kultur hukum sebagai salah satu komponen dalam sebuah sistem hukum. Friedman⁹¹ menjadi sosok yang tersohor mana kala memasukkan kultur hukum sebagai komponen pembentuk sistem hukum. Menurut Friedman, "Demi tuntutan untuk adanya istilah yang lebih baik, maka kita menamakan 'kekuatan-kekuatan sosial' sendiri adalah suatu abstraksi; di dalam setiap peristiwa, kekuatan-kekuatan sosial tersebut tidak bekerja secara langsung pada sistem hukum. Warga masyarakat memiliki kebutuhan dan membuat tuntutan; semua ini kadang-kadang menimbulkan proses hukum dan kadang-kadang tidak menimbulkan proses hukum, tergantung pada kultur yang mereka anut Nilai-nilai dan sikap-sikap dipertahankan oleh para pemimpin dan warga masyarakat di antara faktor-faktor ini, sejak perilaku mereka bergantung pada putusan tentang opsi mana yang digunakan atau yang tepat. Kultur hukum berkaitan dengan bagian-bagian dari kultur yaitu kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan cara berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial ke arah atau menjauhi hukum dan cara-cara khusus".

⁹¹ Ibid, hlm.227

Lebih lanjut lagi, Friedman⁹² menjelaskan *"Kita mendefinisikan kultur hukum sebagai 'sikap-sikap, nilai-nilai, dan pendapat-pendapat yang dianut masyarakat tentang hukum, sistem hukum, dan beragam bagiannya. Dengan didefinisikan seperti itu, kultur hukum itulah yang menentukan kapan, mengapa, dan di mana orang-orang menggunakan hukum, institusi hukum, atau proses hukum; dan kapan mereka menggunakan ins titusi-institusi lainnya, atau tidak melakukan apa pun. Dengan kata lain, faktor-faktor kultural merupakan suatu unsur esensial dalam mengubah suatu struktur statis dan suatu kumpulan norma-norma statis menjadi suatu kumpulan yang hidup. Menambahkan kultur hukum kepada gambaran ini adalah seperti memutar sebuah jam atau menghidupkan sebuah mesin. Kultur hukum itu menggerakkan segala sesuatunya."*

Sejauh pemahaman penulis, sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman mencapai hakikatnya apabila ketiga komponen tersebut tercakup dalam suatu sistem hukum. Realisasi dari unsur-unsur tadi berjalan kemudian terintegritas dalam tata hukum yang Baku namun mampu mengikuti kedinamisan pola hidup masyarakat. Struktur sebagai penyelenggara sistem hukum memberikan transparansi dalam ruang lingkup organisasi sistem hukum. Kemudian, terjadi sinergitas antarlembaga yang berujung pada harmonisasi penerapan sistem hukum pada suatu warga masyarakat. Selain itu, aturan-aturan yang diterapkan memegang teguh prinsip *"bukan manusia*

⁹² *Ibid, hlm. 228.*

*untuk hukum, melainkan hukum untuk manusia".*⁹³ Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa seperangkat aturan berorientasi pada substansi, bukan hal-hal prosedural. Hal ini kemudian akan kembali pada tujuan hukum, yaitu mewujudkan keadilan yang mampu dirasakan oleh masyarakat. Keharmonisan antara struktur dan substansi akan sepenuhnya mampu diterima oleh masyarakat yang akan menjadikannya sebuah kultur hukum yang sehat.

C. Penataan Sistem sebagai Langkah Awal Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini adalah diakuinya, diberlakukannya, dan ditaatinya tiga sistem hukum secara bersamaan. Fenomena tersebut tidak bisa dilepaskan dari sejarah hukum Indonesia dengan berbagai peristiwa masa lalu yang begitu berharga untuk diketahui. Secara faktual, tata hukum Indonesia yang mengatur pola kehidupan masyarakat, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Eropa Daratan. Dalam realitasnya, pluralitas ini membawa dampak positif dan negatif. Kemudahan yang diperoleh terkait pembaruan dan pembentukan hukum nasional yang mampu menggali dari berbagai sumber sistem-sistem hukum yang berlaku, sedangkan kekurangannya sendiri terletak pada pelaksanaannya, khususnya kualitas aparatur hukum yang mampu mewujudkan tujuan dari sistem hukum yang diidealkan.

Terkait dengan konsep sistem hukum menurut Friedman, penulis

⁹³ *Ibid, hlm. 236*

berpandangan bahwa keseluruhan pola yang kemudian dijadikan suatu kebiasaan dalam berkehidupan agar hukum tersebut mampu hidup di tengah-tengah masyarakat demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Dengan kata lain, seluruh komponen-komponen sistem hukum senantiasa berjalan beriringan sesuai fungsi-fungsinya untuk mengikuti dinamika hidup masyarakat. Lebih lanjut Achmad Ali ⁹⁴ menerangkan bahwa *"Dengan demikian, keberhasilan keberhasilan hukum (dalam makna struktur, substansi, dan kultur hukum), indikatornya adalah mampu tidaknya hukum mewujudkan "harmonisasi" di antara warga masyarakat, dan ketika harmonisasi telah terwujud, maka itu dianggap perwujudan dari ide keadilan, juga kedamaian senantiasa melahirkan kemanfaatan bagi masyarakat sebagai suatu totalitas"*. Pemahaman awal tentang sistem hukum yang dikonsepsikan oleh Friedman merupakan hal yang sangat krusial untuk mengetahui bahwa suatu instrumen hukum efektif jika komponen-komponennya mampu berintegrasi dalam penerapannya. Sedangkan, fakta terkait pluralitas sistem hukum di Indonesia menjadi pilar-pilar sekaligus menjadi sumber-sumber hukum yang sesuai dengan karakter bangsa kita. Dengan kata lain, tata sistem hukum yang menghimpun tiap unsur utama dan menyelaraskan pluralitas hukum diharapkan mampu menjadi perintis terhadap pemberantasan korupsi.

Kendala yang terjadi di Indonesia ialah suatu keadaan di mana struktur khususnya jajaran aparaturnya disinyalir melakukan praktik korupsi yang terkoordinir dan juga masif. Perilaku seperti ini menjadi suatu hal yang lazim dilakukan dari

⁹⁴ ibid

tingkatan paling bawah hingga ke petinggi-petinggi negara. Sebagai contoh ialah praktik nepotisme dalam institusi pendidikan. Pendidikan yang semestinya berorientasi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam artian meningkatkan potensi kognitif, membangun karakter afektif, dan mampu diimplementasikan berdasarkan penilaian psikomotorik malah diciderai oleh salah satu jenis rasuah. Pada sekolah negeri tingkat SMA diterapkan sistem penerimaan siswa melalui serangkaian tes. Namun, pada realitanya institusi ini tidak lepas dari cara penerimaan melalui sistem kekerabatan walaupun siswa tersebut tidak dinyatakan lolos tes penerimaan. Hakikat diadakannya serangkaian proses mencerdaskan kehidupan bangsa telah pudar ketika hal itu mulai tumbuh. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa fungsi-fungsi struktur yang disalahgunakan tadi kemudian menjadi kawan bagi kultur sehingga tercipta atmosfer ketidakjujuran yang berkepanjangan.

Berbicara tentang struktur sebagai salah satu alat penataan sistem, menjadi hal yang urgen untuk dikaji adalah pengendalian manajemen dan konfigurasi sistem. Dalam buku Surachmin dan Suhandi⁹⁵ memaparkan, *"Pada organisasi di mana pengendalian manajemennya lemah akan lebih banyak pegawai yang melakukan korupsi dibanding pada organisasi yang pengendalian manajemennya kuat. Seorang pegawai yang mengetahui bahwa sistem pengendalian manajemen pada organisasi di mana dia bekerja lemah, maka akan timbul kesempatan atau peluang baginya untuk melakukan korupsi"*. Hal ini terkait dengan kecermatan seorang pimpinan

⁹⁵ Surachmin dan Suhandi, *Strategi dan Teknik Korupsi: Mencegah untuk Mengetahui*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2013, hhn. 98.

sebagai bentuk kualitasnya dalam memimpin. Konsekuensi logis jika dalam suatu lembaga memiliki celah-celah yang berpotensi membuat kesalahan. Namun, tanggung jawab sebagai pemimpin mana kala mampu menjadi teladan dan mampu memberikan arahan insidentil maupun yang sudah dirancang (*by design*) agar dalam proses berjalannya suatu organisasi, kesalahan-kesalahan tersebut mampu diminimalisir. Maka dari itu, diperlukan suatu kebijakan supervisi oleh atasan terhadap bawahannya yang diklasifikasikan sebagai unsur manajemen sistem. Melalui kepemimpinan yang bijak celah-celah untuk melakukan korupsi dapat dikonversi menjadi hal-hal yang bersifat positif yang meningkat kinerja pegawai dan ruang lingkup kerja yang sehat.

Dalam suatu stuktur seyogyanya dilakukan serangkaian pengaturan yang meliputi kebijakan, batasan-batasan kewenangan, prosedur, perencanaan, pertanggungjawaban, *upgrading* pegawai, konsiliasi visi dan misi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, berikut adalah poin-poin penting yang dipaparkan oleh Surachmin dan Suhardi.⁹⁶

1. Batasan-batasan terkait kewenangan yang sesuai dengan porsi tiap-tiap jabatan dan tanggung jawab yang jelas. Wewenang yang melampaui batas sangat berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
2. Kebijakan dari atasan idealnya dibuat tertulis dan jelas. Keotentikan dari sebuah kebijakan tertulis lebih dijamin dibandingkan dengan kebijakan lisan. Jelas dalam artian transparansi suatu kebijakan yang diinformasikan kepada setiap personil

⁹⁶ Ibid, hlm.99

maupun pegawai pada flap tingkatan jabatan.

3. Perencanaan harus realistis, melibatkan atasan dan bawahan yang merupakan penjabaran fungsi tiap-tiap departemen. Pelaksanaan kegiatan tanpa kematangan konsep dan perencanaan berpotensi terjadi suatu penyalahgunaan kewenangan.
4. Prosedur yang sederhana, menghindari teknis kerja yang tumpang tindih, dikomunikasikan dengan baik dan benar oleh pihak terkait yang sesuai dengan arahan pimpinan, dan evaluasi secara berkala. Prosedur yang berbelit-belit dalam pelaksanaan suatu kegiatan sarat digunakan untuk tujuan pengalihan.
5. Pencacatan yang memiliki akuntabilitas dan kredibilitas, diselenggarakan secara akurat dan tepat waktu, sederhana dan konsisten, dipisahkan dari fungsi penguasaan dan penyimpanan. Pencacatan yang tidak akurat rawan terjadi korupsi pada suatu organisasi.
6. Pelaporan pertanggungjawaban berisikan fakta objektif, melampirkan arsip-arsip terkait, jelas, lengkap, dan tepat waktu. Mekanisme pelaporan yang tidak berjalan dengan baik dapat mendeteksi adanya kecurangan sesegera mungkin. Melalui suatu akses yang dapat memperlihatkan isi pelaporan kepada pihak lain akan meningkatkan transparansi suatu organisasi. Dengan demikian, kualitas pengawasan akan menjadi lebih baik.
7. Proses rekrutmen dan pemberhentian personil sesuai dengan ketentuan, terdapat standar-standar yang jelas, proses seleksi yang mengedepankan kredibilitas dan keabsahan data dan hasil tes per tahapan, terdapat apresiasi kinerja bagi personil yang bekerja sesuai target, dan pembinaan berkelanjutan dalam lingkup organisasi

baik kompetensi maupun karakter. Frustrasi muncul ketika ekspektasi tidak tercapai karena alasan tersebut bibit korupsi mulai muncul apalagi menyangkut "masalah perut".

8. Supervisi dan review *in tern* menggunakan metode dan instrumen yang tepat, adanya evaluasi terhadap kinerja menimbulkan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaannya agar kedepannya hal tersebut dapat diminimalisir se maksimal mungkin. Seorang pegawai menjadi korup ketika merasa tak ada yang mengawasinya.

Poin-poin ini yang menjadi keutamaansuatus truktur yang nanti akan melaksanakan fungsinya masing dalam pelaksanaan sistem hukum yang bebas dari korupsi. Khusus untuk poin ketujuh terkait rekrutmen yang perlu diberi perhatian lebih karena proses penerimaan yang akan menghasilkan regenerasi suatu organisasi. Maka calon personil wajib memenuhi syarat dan memiliki kapabilitas yang memadai untuk lobos dalam seleksi. Proses seleksi kemudian dilaksanakan dengan jujur, adil, dan transparan. Hal ini penting karena hulu suatu organisasi adalah penerimaannya agar hilirnya mengalir sesuai dengan yang diharapkan dan bermuara pada tercapainya visi dan misi organisasi.

Substansi yang informatif merupakan bagian penting dari sebuah aturan hukum. Dengan kata lain, ada makna yang tersirat dibalik pembuatan aturan tersebut. Kemudian pencapaian substansi dari pemberlakuan aturan itu dimanfestasikan dalam pola kehidupan. Misalnya, Pasal 362 KUHP tentang ancaman pidana bagi pencurian. Hal ini dimaksudkan untuk menekan tindakan pencurian dengan ancaman sanksi

berupa penjara maupun denda. Namun dalam realitanya, kasus pencurian tidak pernah tidak terjadi dalam kurun waktu 1 x 24 jam, khususnya di kota besar seperti Makassar. Ini artinya aturan-aturan yang disertai sanksi tidak bisa dijadikan patokan sebagai alat pengendali tingkah individu-individu. Senada dengan apa yang dikatakan Thomas Moore⁹⁷ (1478-1535), *"Dalam 25 tahun ada 72.000 pencuri digantung di daerah yang penduduknya tiga sampai empat juta orang saja, tetapi kejahatan terus merajalela."* Menurut Moore, penjatuhan hukuman maksimal pun tidak dapat membendung tindakan kejahatan. Yang harus dicari kemudian dihapuskan adalah sumber atau penyebab kejahatan tersebut. Sama halnya dengan korupsi, contoh pemberantasan korupsi oleh KPK, bertahun-tahun lamanya pemberantasan korupsi berjalan dengan baik, sekitar 439 kasus yang diselesaikan oleh KPK dari tahun 2004-2015. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kinerja KPK sebagai bentuk komitmen untuk memberantas korupsi. Juga karena hal itu apresiasi masyarakat datang silih berganti. Tetapi, pribahasa mati satu, tumbuh seribu berlaku pula pada kasus korupsi. Korupsi hingga hari ini masih diperangi dan Indonesia masih menjadi salah satu negara terkorup di dunia. Dengan kata lain, penyebab korupsi belum dapat dihapuskan artinya substansi dari UU PTPK belum mencapai *goalnya*.

Acuan penegak hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia yang paling sering digunakan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang dimaksud sebagai korupsi Undang-

⁹⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 10-11.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ialah:

(1) *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling ban yak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

(2) *Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat di jatuhkan.*

A. Pembahasan mengenai Pasal 2 ayat (1) Penggunaan frase "*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*"

Terdapat beberapa kata maupun frase yang menunjukkan karakteristik tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori delik formil. Kata "dapat" dalam pasal tersebut memungkinkan terjadinya atau tidak terjadinya suatu kerugian maupun perekonomian negara. Kata "dapat" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup hanya dengan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Maka dengan sendirinya yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah seluruh perbuatan, seluruh kegiatan, maupun seluruh perilaku yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara walaupun belum ada kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara.

Penjelasan lebih lanjut dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa *"Dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana."*

Berdasarkan penjelasan di atas, syarat seseorang dapat dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi adalah melakukan perbuatan memperkaya diri, orang lain, atau sekumpulan orang. Sekalipun jika pelaku terbukti adanya kerugian negara kemudian dikembalikan seutuhnya maka tetap akan dipidana dan menerima sanksi seperti ketentuan dalam pasal tersebut. Pendapat P.A.F Lamintang⁹⁸ sendiri ialah *"Pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut."*

Perlu diketahui bahwa adanya permohonan pengujian materil terhadap "dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan alasan bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil didasari oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusannya pada tanggal 24 Juli 2006

⁹⁸ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ed. 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 28.

Nomor 003/ PUU-IV/ 2006 dengan pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa:

Menimbang bahwa dengan memperhatikan seluruh argumen yang disampaikan oleh semua pihak sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 2 ayat

(1) UU PTPK, maka persoalan pokok yang harus dijawab adalah:

1. Apakah pengertian kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) bahwa dengan penambahan kata "dapat" tersebut menjadikan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) a quo menjadi rumusan delik formil;
2. Apakah dengan pengertian sebagaimana dijelaskan pada Butir I tersebut di atas, frasa "dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara", yang dapat diartikan baik kerugian yang nyata (actual loss) maupun hanya bersifat potential atau berupa kemungkinan kerugian (potential loss), merupakan unsur yang tidak perlu dibuktikan atau harus dibuktikan;

Menimbang bahwa kedua pernyataan tersebut akan dijawab dengan pemahaman bahwa kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut "merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara", akan tetapi hanya "dapat" menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau potential loss, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan. Kata "dapat" tersebut harus dinilai pengertiannya menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, yang menyatakan kata bahwa kata "dapat" tersebut sebelum frasa "merugikan Keuangan Negara atau

Perekonomian Negara", menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tersebut merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Karena itu Mahkamah dapat menerima penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang menyangkut kata "dapat" sebelum frasa "merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara".

Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak dapat selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut. Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakuka adalah sedemikian rupa bahwa Kerugian Negara telah dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (wederrechtelijk) telah terbukti. Karena, tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang a quo sebagai delik formil. Dengan demikian, kategori tindak pidana korupsi digolongkan sebagai delik forma di mana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, dan bukan

sebagai delik materiil, yang mensyaratkan akibat perbuatan berupa kerugian timbul tersebut harus telah terjadi. Kata "dapat" sebelum frasa "merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara", dapat dilihat dalam arti yang sama dengan kata "dapat" yang mendahului frasa "membahayakan keamanan orang atau barang atau Keselamatan Negara dalam keadaan perang", sebagaimana termuat dalam pasal 387 KUHP. Delik demikian dipandang terbukti, kalau unsur perbuatan pidana tersebut telah terpenuhi dan akibat yang dapat terjadi dari perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut, tidak perlu harus telah nyata terjadi.

Menimbang bahwa menurut Mahkamah hal demikian tidaklah menimbulkan ketidakpastian hukum (onrechtszekerheid) yang bertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Karena, keberadaan kata "dapat" sama sekali tidak menentukan faktor ada atau tidaknya kepastian hukum yang menyebabkan seseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya orang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata "dapat" dengan "merugikan Keuangan Negara" tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim; (1) nyata-nyata merugikan keuangan Negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang "belum nyata terjadi", tetapi dengan mempertimbangkan

keadaan khusus dan konkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu Kerugian Negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian Negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh para ahli dalam keuangan Negara, perekonomian negara serta ahli dalam analisis perbuatan seseorang dengan kerugian.

Menimbang bahwa adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara", kemudian mengqualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi. Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penentuan pidana, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian Negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma.

Menimbang dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa frasa "dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" tidaklah bertentangan

dengan ha katas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah di atas (conditionally constitutional).

Menimbang bahwa oleh karena kata "dapat" sebagaimana uraian pertimbangan yang dikemukakan di atas, tidak dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dan justru diperlukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi, maka permohonan Pemohon tentang hal itu tidak beralasan dan tidak dapat dikabulkan.

Dengan demikian, menurut penulis, Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK bahwa hal yang urgen adalah merangkai sebuah undang-undang yang mempermudah pemberantasan tindak pidana korupsi, namun tidak bertentangan dengan asas-asas yang ada. Karena, jika UU PTPK dikategorikan tindak pidana korupsi ketika ada kerugian, maka terjadi kesulitan dalam penentuan jumlah kerugian tedebit. Selain itu, substansi dari UU PTPK adalah memberantas korupsi sebelum ada kerugian, jadi ada sebuah langkah preventif dalam menjaga kebocoran-kebocoran kas negara.

B. Penjelasan mengenai frasa "secara melawan hukum"

Pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan *bahwa yang dimaksud "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil "maupun" dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam*

masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dari penjelasan ini dengan adanya kata "maupun" maka muncul dua ajaran melawan hukum secara alternatif :

- a. sifat melawan hukum formil;
- b. sifat melawan hukum materiil.

Sifat melawan hukum formil berdasarkan pendapat Simons⁹⁹ adalah *"Untuk dapat dipidana suatu perbuatan harus mencocoki rumusan delik dalam suatu ketentuan tertulis dalam undang-undang pidana. Jika sudah demikian tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu melawan hukum ataukah tidak."* Hal ini selaras dengan asas hukum pidana yang berbunyi *"Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali"*. Kemudian dirumuskan dalam KUHP yaitu Pasal 1 ayat (1), *"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."*

Sifat melawan hukum materiil menurut Roelan Saleh¹⁰⁰ adalah *"Menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis."* Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum materiil ditentukan oleh masyarakat apakah perbuatan tersebut tercela, tidak patut, atau pun bersalah. Perbuatan tersebut dapat dinyatakan bersalah jika dianggap telah merusak rasa

⁹⁹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 197.

¹⁰⁰ R. Wiyono, Op. Cit, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ed. 2*, hlm. 32.

keadilan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

C. Penjelasan mengenai "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

Sesuai dengan redaksi katanya, suatu perbuatan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi semakin kaya dan jenis-jenis dari perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Contohnya, menjual/ membeli, menandatangani kontrak, menjadi makelar dengan syarat perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

D. Penjelasan mengenai "merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"

Pengertian "merugikan" yaitu membuat rugi atau menjadikan rugi atau menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan "merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" bisa disinonimkan sebagai perbuatan yang menjadi ruginya keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, apa yang dimaksud "keuangan negara" sebagaimana dijelaskan pada penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam pengawasan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban BUMN/ BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal

negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud perekonomian negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ialah *kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.* Singkat kata, berdasarkan penjelasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa perekonomian negara keseluruhan kegiatan untuk memakmurkan meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat yang didukung oleh kebijakan pemerintah dan dalam pelaksanaannya mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku.

E. Pasal 2 ayat (2) "dalam keadaan tertentu"

Yang dimaksud sebagai "dalam keadaan tertentu" adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu jika:

a. tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi:

- Penanggulangan keadaan bahaya
- Bencana alam nasional

- Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas
- Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter

b. pengulangan tindak pidana korupsi

Aturan mengenai "keadaan bahaya" ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1960, sedang kerusuhan sosial dan ekonomi moneter belum memiliki peraturan perundang-undangan.. Tetapi hal demikian dapat ditetapkan dengan keputusan Presiden RI berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. sedangkan pengulangan tindak pidana korupsi dimaksudkan bahwa tindakan tersebut dilalcukan lebih dari satu kali.

Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar hukum pemberantasan korupsi memuat hal-hal yang penting untuk dibahas karena sesuai dengan amanat Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kemudian, penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sangat dibutuhkan karena tindak pidana korupsi mendapat perhatian khusus disebabkan akibat dari perbuatan ini sangat berdampak buruk bagi Indonesia khususnya masyarakat sebagai korban dari perbuatan ini.

Selanjutnya, terkait dengan kultur atau budaya dalam masyarakat, sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa korupsi telah menjadi kebiasaan atau sudah dianggap biasa oleh masyarakat. Hal yang miris ketika masyarakat juga ikut

melakukan praktik korupsi sebagaimana yang dipraktikkan oleh para penguasa yang lalim. Penguasa-penguasa ini sebagai individu yang mampu mengenyampingkan supremasi hukum dan kesepadaan dihadapan hukum. Para penguasa tadi menurut Edward A. Ross¹⁰¹ adalah *criminaloid*, yaitu "*Orang yang memperoleh kemakmuran dengan melakukan tindakan yang memalukan, tetapi belum merupakan tindakan yang dilarang oleh masyarakat. Sesungguhnya mereka bersalah menurut kacamata hukum, namun karena di mata masyarakat dan menurut dirinya sendiri adalah tidak bersalah, tindakannya tidak disebut sebagai kejahatan pembuat hukum data saja menyatakan tindakannya yang tidak benar tersebut sebagai kejahatan, namun karena moralitas berpihak padanya, mereka luput dari hukuman dan celaan*".

Kultur atau kebiasaan adalah sesuatu yang dilakukan secara tidak sadar dan dianggap adalah sesuatu yang benar. Pertanyaannya, apabila kultur korupsi dianggap sesuatu yang benar oleh masyarakat, apakah hal tersebut tidak merusak sebuah sistem hukum? Di berbagai literature salah satu penyebab korupsi yang adalah masyarakat itu sendiri. Menurut Soedarsono¹⁰², "*Dalam hubungan meluasnya korupsi di Indonesia, apabila milieu itu ditinjau lebih lanjut, yang perlu diselidiki ternyata bukan kekhususan milieu orang satu per satu, melainkan yang secara umum meliputi, dirasakan dan memengaruhi kita sennta orang*

¹⁰¹ Muhammad Mustofa, *Kleptokrasi: Persengkokolan Birokrat-Korporat sebagai Polo White-Collar Crime di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010 hlm. 38-39.

¹⁰² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm.17.

Indonesia. Dengan demikian, mungkin kita bisa menemukan sebab-sebab masyarakat kita dapat menelurkan korupsi sebagai way of life dari banyak orang, mengapa secara diam-diam di-tolereer, bukan oleh penguasa, tetapi oleh masyarakat sendiri. Kalau masyarakat umum mempunyai semangat antikorupsi seperti para mahasiswa pada waktu melakukan demonstrasi antikorupsi, inaka korupsi sungguh-sungguh tidak akan dikenal."

Para penguasa menggunakan ketidaktahuan masyarakat untuk memekarkan perilaku korupsi yang dilakukan di segala sendi-sendi kehidupan, akhirnya masyarakat yang menjadi korban terus-menerus dan lambat laun ikut melakukan tindak pidana korupsi. Misalnya, saat penilangan oleh polisi, masyarakat tanpa dia sadari bahwa memberikan uang kepada polisi untuk tidak diproses sesuai ketentuan hukum, telah melakukan tindakan suap. Ketika ketidaktahuan ini yang menjadi cikal bakal tindakan koruptif dibudidayakan, maka perlunya sosialisasi yang konsisten terkait bahaya korupsi.

Institusi pendidikan sebagai instrumen memiliki fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa diharapkan menjadi perintis pencegahan dan penanaman nilai anti korupsi kepada masyarakat khususnya bagi siswa maupun mahasiswa. Hal ini kemudian menjadi pegangan bagi kaum intelektual untuk menyebarluaskan ilmunya juga menanamkan nilai anti korupsi sebagai bentuk pencegahan tindakan koruptif di negeri. Kurikulum pembelajaran, sebisa mungkin, mencantumkan pelajaran mengenai pembentukan karakter dan penanaman moral sebagai pelajaran yang basisnya sama dengan mata pelajaran lain atau mata kuliah

lainnya. Tidak hanya dalam tataran institusi formal, pranata sosial pun termasuk keluarga harus mampu mendidik generasi muda bagaimana melakukan sesuatu dengan jujur dan mengajarkan apa manfaat utama dari kejujuran.

Adalah kewajiban bagi kita untuk menjaga harkat dan martabat suatu negara, adalah kewajiban kita untuk membangun negara ini ke arah yang lebih progresif, dan adalah kewajiban kita untuk memberantas korupsi karena korupsi kejahatan yang mengakibatkan banyak kesengsaraan, kemiskinan, dan kemelaratan. Adalah kewajiban kita untuk menciptakan atmosfer anti korupsi dalam berkehidupan agar lambat laun, oleh kebiasaan kita, korupsi dapat direduksi hingga mendekati titik nol.

D. Korupsi sebagai *Extra Ordinary Crime*

Extra Ordinary Crimes dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa disini adalah pelanggaran HAM berat. *Extra Ordinary Crimes* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia lain, telah disepakati secara internasional sebagai pelanggaran HAM berat yang berada dalam yuridiksi *International Criminal Court* dan *Statuta Roma*, mendapatkan hukuman seberat-beratnya termasuk hukuman mati bagi pelaku kejahatan tersebut. Yang termasuk dalam *Extra Ordinary Crimes* yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan

*perang, dan kejahatan agresi.*¹⁰³

Berdasarkan konsiderans poin kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa "*Bahwa tindak pidana korupsi selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.*" Dengan demikian, suatu kewajaran jika dalam UU Pemberantasan Korupsi juga memungkinkan seseorang koruptor dihukum mati dan bahwa hanya yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa yang dapat dipidana mati. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, "*Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan*

Jika ditilik lebih jauh lagi bahwa dampak dari tindak pidana korupsi yang bukan saja merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah menjadi pola kehidupan. Artinya, akibat korupsi yang kian luas jangkauan ruang lingkungannya maka dianggap telah hidup dan telah menjadi sebuah kebiasaan yang lazim. Dalam sambutan Artidjo Alkistar¹⁰⁴ menyampaikan bahwa "*Tindakan Para koruptor, menimbulkan iklim sosial predatory society atau masyarakat saling*

¹⁰³ Reno Dwiheryana, *Extraordinary Crime-Extraordinary Law*, http://www.kompasiana.com/santarosa/extraordinary-crimeextraordinary-law_55487d3eaf7e616e0a8b4593, diakses pada tanggal

¹⁰⁴ Aid, *Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime dan Tugas Yuridis Para Hakim*, <http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/component/content/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/323-korupsi-sebagai-extra-ordinary-crime-dan-tugas-yuridis-para-hakim> diakses pada tanggal 25 Februari 2016.

memangsa, karena tidak menghormati hukum dan kehilangan komitmen bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dalam kondisi yang demikian akan memunculkan ketidakpercayaan terhadap otoritas kekuasaan negara. Untuk itu, proses penegakan hukum pidana secara penal dan non-penal harus menjadi solusi autoritatif dalam penyelesaian korupsi politik yang terjadi dalam masyarakat."

Sedikit dari penulis menambahkan pandangan Artidjo ialah bahwa korupsi yang kian merajalela telah merusak individu terkait dengan mindset tentang korupsi itu sendiri. Sehingga tiap individu menganggap korupsi di Indonesia sangat sulit diatasi. Kemudian, karena keputusan tersebut tiap individu secara tidak langsung melakukan praktik korupsi dan pada akhirnya melebur di masyarakat yang selanjutnya menjadi kebiasaan yang lazim di masyarakat.

Sedangkan jika ditinjau dari segi yuridis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Hal ini dipaparkan dalam penjelasan umum, *"Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa."* Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan dan menjadi suatu landasan hukum perihal

pengkategorian tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa.

E. Efektivitas Hukum Sebagai Akibat Dari Penguatan Sistem Hukum

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pokok dari suatu sistem hukum yang ideal adalah seperti yang telah dikonsepkan oleh Friedman. Yakni ketika tiga elemen hukum, substansi aturan, struktur atau tatanan lembaga penegak hukum, serta kultur hukum yang ada dalam masyarakat menjadi satu kesatuan yang fungsional. Antara satu elemen hukum dengan elemen hukum yang lain tidak diperbolehkan saling mendominasi. Jika substansi mendominasi struktur dan kultur, maka dalam pelaksanaannya akan mengesampingkan aspek kemanfaatan. Jika struktur mendominasi maka tidak ada suatu kepastian dalam pelaksanaannya. Sebab apabila terjadi pelemahan pada substansi aturan, maka lembaga dan aktor penegak hukum akan bertindak sewenang-wenang dan cenderung otoriter. Jika kultur yang mendominasi maka dalam pelaksanaannya akan cenderung anarkis.

Jika bertolak dari realitas yang terjadi ditengah masyarakat di era reformasi ini, maka berbagai kebobrokan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemerintahan disebabkan oleh lemahnya sistem hukum. Kelemahan itu merupakan akibat dari tidak harmonisnya hubungan antara struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Dengan demikian efektivitas hukum gagal dicapai.

Reformasi 1998 telah berhasil membawa bangsa Indonesia keluar dari belenggu kediktatoran rezim orde baru. Jika dikontekskan dengan teori sistem dari Friedman, maka akan tampak bahwa, rezim diktator orde baru mengabaikan substansi

yang menjamin kepastian hukum, dan membelenggu masyarakat dengan mengabaikan hak asasi manusia. Namun setelah dilakukan reformasi, yang justru berubah hanyalah pada tataran struktur yang malah menjadi patologi dari sistem hukum Indonesia. Oleh karena pembenahan secara mutlak terjadi hanya pada tataran struktur, sedangkan pada tataran struktur dan kultur masih dalam keadaan yang tetap (*status quo*). Maka, suatu tatanan sosial yang otoriter, berubah menjadi suatu tatanan yang bebas, dan anarkis. Reformasi mereproduksi demokrasi, demokrasi yang dikultuskan melahirkan paradoks kebebasan. Kebebasan dimaknai dengan menjadikan segala bentuk aturan dan paksaan adalah hak bagi subjek hukum. Benar dan salah ditentukan melalui penilaian yang subjektif. Dengan demikian, tendensi ke arah anarkisme justru semakin terbuka lebar. Ini menandakan bahwa kultur di era reformasi lebih mendominasi struktur dan substansi.

Dengan adanya peluang seperti demikian itu, Para pemangku kekuasaan memanfaatkan kultur sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Kultur yang cenderung mengabaikan norma akan mengakibatkan kekacauan. Disinilah propaganda-propaganda penguasa mulai masuk dan menjadi patologi dalam masyarakat. Dengan demikian, ketika kultur mengabaikan substansi, maka yang terjadi adalah substansi dijadikan alat oleh penguasa untuk saling menerkam sesamanya, dimana kelompok dari elit politik yang paling banyak diuntungkan dari substansi itulah yang mampu menciptakan substansi hukum.

Efektivitas hukum hanya dapat diukur dengan sejauh mana suatu aturan hukum ditaati. Menurut H. C. Kelman, sedikitnya ada tiga bentuk ketaatan hukum.

Pertama, ketaatan ketaatan yang bersifat *compliance* yaitu jika seorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut karena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan secara terusmenerus. Kedua, ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika, seorang menaati aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. *Ketiga*, ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.¹⁰⁵

Jenis ketaatan hukum pertama menduduki peringkat paling bawah, sebab suatu ketaatan mustilah ada stimulusnya, yakni paksaan dari suatu sanksi yang keras. Tingkat ketaatan seperti ini terdapat pada era orde

baru dimana struktur hukum era itu mengintervensi masyarakat untuk taat terhadap hukum, namun sebaliknya para penegak hukum mengabaikan aturan hukum dan kultur hukum yang ada dalam masyarakat. Kemudian, jenis ketaatan yang kedua menduduki peringkat kedua, sebab ketaatan hadir karena adanya toleransi antar sesama. Dan jenis ketaatan yang terakhir menduduki peringkat pertama, sebab ketaatan lahir dari dorongan hati yang benar-benar murni. Dari ketiga jenis ketaatan ini terdapat satu kesatuan proses. Dimana jenis pertama mensyaratkan adanya sanksi yang keras, sehingga perlahan-lahan mendorong seseorang untuk taat terhadap hukum bukan lagi karena takut pada sanksinya, melainkan menjadi tekanan sosial yang mensyaratkan toleransi terhadap sesama. Dari tekanan-tekanan sosial inilah

¹⁰⁵ Ahmad Ali, *Menguak Teroi Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, vol.1 *Pemahaman Awal* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 348

perlahan-lahan akan timbul suatu kepedulian akan pentingnya suatu ketertiban, sehingga internalisasi aturan hukum tersebut mendorong individu atau kelompok untuk betul-betul tulus mentaati aturan hukum tersebut.

Dalam hal ini suatu efektivitas hukum hanya dapat tercapai apabila ada keterpaduan antara sistem hukum dengan tingkat ketaatan hukum oleh masyarakat. Dalam tataran struktur, idealnya suatu pejabat pembentuk hukum harus mampu menelaah semangat umum suatu kelompok masyarakat untuk membuat suatu aturan hukum. Seperti apa yang dikatakan Montesquieu dalam bukunya *The Spirit Of Laws*, " mengikuti semangat bangsa adalah tugas dari badan pembuat undang-undang, jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan; karena kita sama sekali tidak bisa bertindak dengan lebih baik kecuali kalau kita bertindak dengan bebas, dengan mengikuti kecenderungan alami kita".¹⁰⁶ Dengan demikian Montesquieu mensyaratkan pentingnya penggalian semangat umum oleh badan yang membuat aturan hukum, agar tercapai keseimbangan antara aturan hukum dan kultur hukum. Suatu bangsa dituntut untuk sebuah kebebasan, namun suatu kebebasan bukan berarti harus bertindak sesuka hati dan merugikan orang lain. Sehingga suatu kebebasan yang hakiki adalah bebas bertindak yang sesuai dengan aturan. Dalam tataran substansi aturan, suatu aturan hukum haruslah memiliki kekuatan mengikat dan memaksa. Sebuah paksaan seperti apa yang telah di katakan sebelumnya, mampu menciptakan suatu efektivitas hukum. Dengan sanksi yang keras suatu aturan hukum pasti akan

¹⁰⁶ Montesquieu, *The Sprit Of Law; Dasar-Dasar Hutu Hulcurn clan Ilmu Politik* (Bandung: Nusa Media, 2015), hal. 276-277.

mendorong masyarakat untuk taat terhadap aturan tersebut. Namun suatu sanksi dalam suatu aturan hukum juga mestilah berangkat dari suatu semangat umum sebagaimana yang dikatakan Montesquieu.

Dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi patologi bangsa Indonesia saat ini, penyebab semakin marak dan merajalelanya tindak pidana korupsi adalah disebabkan oleh model dan sistem hukum yang diterapkan kurang memiliki efektivitas dalam pelaksanaannya. Jika ingin merujuk pada konsep dan model hukum yang telah ditawarkan sebelumnya, maka haruslah ada usaha-usaha menuju pada hukum yang responsif. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, maka sangat dibutuhkan suatu sistem hukum yang kuat dan kokoh. Dengan adanya institusi yang menangani secara khusus kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, yaitu dengan adanya institusi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), ini membuktikan bahwa dalam tataran struktur telah mapan, namun sayangnya dalam tataran substansi aturan masih sangat lemah. Perlu ada sedikit suntikan khusus model hukum yang represif dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, namun demikian represif bukan berarti menghilangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam budaya bangsa. Represif dalam penindakan tindak pidana korupsi haruslah dipadukan dengan model hukum yang responsif, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan harmonis.

Pada tataran kultur seyogyanya suatu komunitas atau suatu bangsa dapat berhubungan antara satu dengan yang lain dengan cara yang harmonis. Suatu

keharmoisian membawa kita kepada sifat saling percaya dan toleransi. Jika suatu toleransi telah tercapai, maka efektivitas hukum juga seyogyanya bisa tercapai. Menurut Satjipto Rahardjo, "hukum berakar dari kehidupan sosial kultural suatu komunitas. Hukum membentuk (*shaping*) suatu komunitas dimana is bekerja dan pada waktu yang sama juga dibentuk (*shaped*) oleh komunitas tersebut. Dengan demikian cara bangsa-bangsa berhukum tidak berlangsung dalam ruang hampa tetapi sarat dengan nutrisi sosial kultural masyarakat tertentu".¹⁰⁷ Dengan demikian hubungan yang harmonis hanya dapat tercapai melalui internalisasi budaya yang berkembang dalam suatu komunitas sosial.

Ada tiga model hukum yang dapat digunakan untuk dapat mencapai suatu efektivitas hukum. Ketiga model hukum itu berasal dari gagasan Philippe Nonet dan Philip Selznick. Tiga model hukum itu adalah hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Dalam dinamika internal organisasi-organisasi sosial, terdapat suatu proses perkembangan yang mentransformasi suatu organisasi sosial satu menuju organisasi sosial lain. Tahap perkembangan itu dapat digambarkan melalui tiga model hukum tersebut. Dalam model hukum yang Philippe Nonet dan Philip Selznick ajukan, hukum represif "ada terlebih dahulu", dalam arti bahwa ia memecahkan persoalan mendasar dalam membangun tertib politik, suatu kondisi dimana tanpa adanya tertib hukum tersebut sistem hukum dan sistem politik tidak akan bisa bergerak kearah kondisi yang lebih tinggi. Hukum otonom mensyaratkan dan membangun diatas pencapaian itu, sebagaimana halnya hukum responsif membangun

¹⁰⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilnau Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 268

di atas landasan konstitusional yang lebih terbatas namun mendasar dari tahapan '*rule of law*'.¹⁰⁸

Berbagai kebobrokan sistem hukum yang terjadi di era reformasi sekarang ini diakibatkan karena tidak terpadunya sistem hukum yang mengakibatkan tidak adanya efektivitas hukum. Seyogyanya sistem hukum yang terdiri dari sub sistem struktur, substansi, dan kulutur hukum itu di rangkai dalam satu kesatuan fungsional, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berhubungan dengan harmonis. Reformasi 1998 melahirkan suatu struktur hukum yang kuat, namun kalah dalam substansi aturan dan kultur hukum. Suatu kebobrokan dalam sistem hukum mengakibatkan lumpuh dan cacatnya pelaksanaan pemerintahan dalam segala aspek. Salah satu bencana yang paling mengerikan dalam pelaksanaan pemerintahan Indonesia di era reformasi ini adalah semakin maraknya praktik korupsi. Semakin maraknya praktik korupsi di akibatkan karena kurang efektivnya substansi aturan yang mengatur hal-hal mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Akibat dari substansi yang lemah tersebut, penyakit ini justru menjangkit dalam tataran kultur, praktik korupsi justru dianggap sebagai hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Hilangnya taji hukum dalam substansi hukum justru akan membawa penyakit baru dalam tataran struktur dan kultur.

Apabila di kontekskan dengan teori sistem yang di ajukan oleh Friedman maka tiga model hukum yang di kemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick

¹⁰⁸ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusa Media, 2015, hlm. 29-30

itu merupakan bentuk tahapan dari suatu reformasi hukum. Dalam suatu model hukum, terdapat sistem hukum yang berbeda antara model hukum yang satu dengan model hukum yang lain. Dalam hal ini perbedaan-perbedaan tersebut terjadi oleh karena adanya perkembangan yang terjadi dalam sistem tersebut, sehingga terjadilah transformasi hukum.

Pada tahap awal, hukum represif ada dengan sistem hukum yang menitik beratkan pada tataran struktur, dengan tujuan menciptakan suatu tertib politik. Kemudian dalam tahap selanjutnya, setelah struktur telah mapan maka peran dari hukum otonom yang syarat akan substansi menyeimbangkan antara struktur yang telah mapan dan substansi hukum sehingga tercipta suatu keharmonisan dan tertib hukum. Selanjutnya, untuk menjaga agar struktur dan substansi tetap dalam kadar kewajaran maka hukum responsif mengharmoniskan hubungan-hubungan antara struktur, substansi, dan kultur hukum, sehingga terciptalah suatu tertib hukum yang mapan dan kokoh. Sehingga dalam hal ini antara konsep hukum dan model hukum yang ditawarkan bisa disintesaikan dan menjadi rujukan dalam hal pembangunan dan penguatan sistem hukum Indonesia. Dengan demikian dalam tataran yang ideal tersebut suatu efektivitas hukum dapat tercapai dalam suatu tertib hukum yang mapan dan kokoh.

BAB IV

MAHASISWA DENGAN FUNGSI PENCEGAHAN KORUPSI

A. Konsep Pergerakan Menuju Perubahan.

Pergerakan dari masa ke masa mahasiswa selalu menjadi tonggak pelopor menuju sebuah konsep perubahan yang diidamkan. Dari sudut pandang historis, konsep pergerakan mahasiswa atau pemuda dari masa pra kemerdekaan tak mampu di bendung. *Dimulai dari pergerakan yang di inisiasi oleh Bung Tomo (Sutomo) yang dikatakan dalam sejarah sebagai cikal Bakal semangat mahasiswa (kepemudaan) untuk bangkit dari belenggu sifat kedaerahannya. Tepat ditanggal 20 mei 1908 menjadi pucuk pergerakan semangat mahasiswa (Pemuda) dalam menyongsong perubahan.*¹⁰⁹

*Dari kebangkitan kaum terpelajar, mahasiswa, intelektual, dan aktivis pemuda itulah, munculnya generasi baru pemuda Indonesia yang memunculkan sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah itu dicetukan melalui kongres pemuda II yang berlangsung di Jakarta pada 26-28 Oktober 1928, dimotori oleh PPPI.*¹¹⁰ Dan dari 2 pergerakan itu semangat Intelektual muda semakin berani menabrak dinding kerasnya tembok penguasa yang pada saat itu masih dikuasai oleh para kaum kolonial Hindia Belanda. Kemerdekaan yang direbut bangsa Indonesia

¹⁰⁹ Pandji Pragiwaksono, *Berani Mengubah*, Yogyakarta:PT. Bentang Pustaka, 2013,hhn. 18.

¹¹⁰ FajlurrahmanJurdi,Me/awanKekuasaan,Yogyakarta:Rangkang Education,2015, hlm 55.

dari tangan penguasa, peran mahasiswa (pemuda) pun tak bisa di elakkan keberadaannya, sehari sebelum di proklamirkannya kemerdekaan, *para golongan pemudalah yang berperan aktif dengan semangat yang membara di dada guna tuk mendesak para kaum tua dalam merebut tongkat kekuasaan dari kolonialisme.*¹¹¹

Dari masa ke masa pergerakan mahasiswa (pemuda) menorehkan keberhasilan menurut masanya masing-masing

Pasca kemerdekaan mahasiswa yang di letakkan di pundaknya sebuah tanggungjawab besar sebagai intelektual muda dan sebagai salah satu elemen penting dalam pengawas berjalannya roda pemerintahan agar berjalan sesuai rule (aturan) yang ada. Pergerakan mahasiswa di nahkodai oleh salah satu dari mereka yaitu pemuda pemberani yang bernama Soe Hok Gie, yang dengan gigihnya menentang kekuasaan orde baru pada saat itu.

*Di ke dua puluh tahun perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang tepatnya 17 agustus 1969, pengantar redaksi kompas menulis sebagai berikut:*¹¹² *Tanpa kita sadari di bumf Indonesia kini telah tumbuh suatu lapisan baru, penzuda-pemuda, pemudi-pemudi Indonesia yang dilahirkan setelah tahun 1945 - Generasi kemerdekaan Indonesia.*¹¹³

Siapa manusia-manusia baru tersebut? Dengan tidal setia kepada tulisannya, yang berikut inilah yang dianggap pengalaman baru dari manusia baru, yaitu manusia dewasa setelah kemerdekaan.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² SoeHok Gie, *Catatan Seorang Demonstran*, Jakarta:LP3ES, 2011, hlm. 4.

¹¹³ *Ibid*, hlm.5

- Mereka bukan orang yang takjub melihat kaki langit baru, yang terkagum-kagum kepada Barat model Sutan Takdir Alisjahbana.
- Mereka bukan "pemuda bambu runcing"
- Mereka adalah generasi yang dididik dalam optimisme setelah penyerahan kedaulatan, dalam mitos-mitos tentang kemerdekaan dan harapan besar terhadap "kejayaan Indonesia dimasa depan"
- Mereka adalah generasi yang dibius oleh semangat "progresif revolusioner" model Soekarno.
- Tetapi terutama generasi inilah yang mengalami kehancuran cita-cita itu semuanya. Demoralisasi claim segala bidang kehancuran kepercayaan kepada generasi-generasi yang terdahulu¹¹⁴

Dimasa itu pertentangan antara kaum muda (mahasiswa) terus terjadi dikarenakan para Bapak Bangsa (the founding fathers) negeri kita seakan terlena dengan kekuasaan yang telah mereka duduki, sehingga konsep tujuan bernegara seakan melenceng dari yang telah ditetapkan. Yang berkuasa sekarang adalah orang-orang yang dibesarkan di zaman Hindia Belanda almarhum. Mereka adalah pejuang-pejuang kemerdekaan yang gigih. Lihatlah Soekarno, Hatta, Sjahrir, Ali dan sebagainya. Tetapi kini mereka telah mengkhianati apa yang diperjuangkan. Soekarno telah berkhianat terhadap kemerdekaan. Yamin telah memalsukan (atau masih dalam zaman romantik) sejarah Indonesia. Hatta tak berani menyatakan

¹¹⁴ Soe Hok Gie, *Generasi Yang Lahir Setelah Tahun Empat Limo*", Kompas, 17 Agustus 1969.

kebenaran (walaupun kadang-kadang ia menyatakan).¹¹⁵

Kita, generasi kita ditugaskan untuk memberantas generasi tua yang mengacau. Generasi kita yang menjadi hakim atas mereka yang dituduh koruptor-koruptor tua, seperti kitalah yang dijadikan generasi yang akan memakmurkan Indonesia.¹¹⁶ Berbagai macam gerakan yang salah satunya tercatat di dalam sejarah pergerakan mahasiswa (pemuda) Indonesia yang di inisiasi oleh Soe Hok Gie, seorang pria yang beretnis Tionghoa yang memiliki nasionalisme yang tak dipertanyakan lagi kecintaan dan kesetiaannya terhadap Negeri ini. Perjuangannya dalam melawan kekuasaan orde lama mencapai puncaknya ketika seluruh rezim Soekarno secara de facto pada tanggal 11 Maret 1966 runtuh.¹¹⁷ Catatan pergerakan mahasiswa tidak berakhir sampai di masa itu saja, mahasiswa tetap menjadi, pelopor pergerakan yang menentang tirani kekuasaan.

Di masa orde Baru, Soeharto sang tiran memulai pembangunan dengan mematuhi prinsip kapitalisme. Kuras seluruh kekayaan alam yang ada dan tiap protes hadapi saja dengan peluru. Papua hingga Aceh jadi tempat dimana dilegalkan alasannya ampuh: ada separatisme disana . Tak hanya itu, Jawa dipacu pembangunannya dengan industrialisasi. Muncul gelombang pekerja pabrik yang di upah dengan seadanya dan tidak diberi hak berorganisasi.¹¹⁸ Potret kejahatan

¹¹⁵ Soe Hok Gie, loc cit. 30 Maret 1962.

¹¹⁶ Ibid. 10 Desember 1959. Dia menyebutkan semua nama itu secara jelas-jelas, tetapi oleh redaksi nama itu tidak diumumkan.

¹¹⁷ Soe Hok Gie, *Op.cit*, hlm 12

¹¹⁸ Eko Prasetyo, *Bangkitlah Gerakan Mahasiswa*, Malang: Intrans Publishing, 2015, hlm. 33-34.

penguasa terpraktikkan dimana-mana. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sudah menjadi hal yang lumrah adanya. Sejumlah keluarga dari penguasa pada waktu itu menduduki jabatan strategis di negeri ini yang semakin membuka kran penguasa untuk memperkaya diri.

*Perlawanan terhadap penguasa di bungkam, semua media harus bertekuk lutut di bawah sensor Menteri Penerangan dengan kalimat saktinya, "atas instruksi Bapak Presiden". Kalau ada media yang membandel, langsung diberedel dan di tutup. Yang berani menentang dan melakukan perlawanan akan dihilangkan bahkan kemungkinan besar dibunuh.*¹¹⁹

*Pada tanggal 12 mei 1998, ketika harga BBM dinaikkan dan protes bermunculan dari Para mahasiswa. Atas nama stabilitas dan keamanan, tajamnya peluru aparat telah membunuh empat aktivis Trisakti.*¹²⁰ Pergolakan terus terjadi dan perlawanan dari penguasa pun semakin beringas. Hak Asasi manusia seakan hanya menjadi lembaran-lembaran kosong yang berserakan di jalan. Wibawa hukum tumpul oleh kekuasaan. Alat negara seperti Polisi, dan Tentara diperalat tuk melawan anak negeri yang tak berdosa dan hanya berjuang untuk melawan ketidakadilan, kebungkaman, dan tirani penguasa. Hingga tibalah pada titik klimaks pergerakan dan berhasil meruntuhkan hegemoni kekuasaan yang otoriter.

Perjalanan kehidupan bernegara Indonesia sudah cukup panjang mulai dari otak-atik sistem dan bentuk kenegaraannya untuk menemukan sebuah formulasi yang

¹¹⁹ Pandji Pragiwaksono, *Berani Mengubah*, Yogyakarta:PT. Bentang Pustaka, 2013, hlm. 23

¹²⁰ Ibid. hal 24

tepat untuk digunakan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Pengkhianatan terhadap ibu pertiwi oleh para penguasa yang mengatasnamakan kesucian suara rakyat memiliki dinamika tersendiri sesuai dengan eranya masing-masing. Begitupun dinamisasi pergerakan dan pergolakan mahasiswa yang memiliki periode dan metodenya tersendiri. Dinamika pergerakan mahasiswa memiliki corak tersendiri di dalam melawan kekuasaan (macht) yang memiliki corak kepemimpinannya masing-masing.

Ada beberapa konsep pergerakan sosial yang diantaranya, *Gerakan Massa*, yaitu salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan secara kolektif oleh sekelompok orang atau kumpulan individu yang mengikatkan diri pada kesamaan pandangan terhadap rezim tertentu.¹²¹ selain gerakan massa, juga di bahas tentang gerakan politik. Pada prinsipnya, dimana tujuannya adalah meminta atau menuntut para pengambil kebijakan agar - baik pentimpin politik, pemimpin agama, pengusaha dalam industri kapitalis - dapat mengubah kebijakannya guna memberikan efek kesejahteraan kepada pihak yang menentang.¹²² selain itu ada yang disebut dengan gerakan kultural, sebuah tuntutan kebudayaan atau sebuah perubahan kebudayaan dalam masyarakat, baik secara evolutif maupun reformatif.¹²³ dan gerakan keagamaan juga merupakan salah satu bentuk gerakan sosial, karena dalam kasus ini, perubahan-perubahan yang terjadi dalam gerakan keagamaan tidak saja terkait dengan semangat teologis, tetapi juga "citra diri" kemanusiaan yang melekat

¹²¹ Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit.*, hlm. 230

¹²² *Ibid*, hlm. 230-231

¹²³ *Ibid*, hlm. 231

*bersama agama-agama yang melakukan perubahan.*¹²⁴

Terkadang kita terjebak di dalam euforia dan romantisme pergerakan para pendahulu kita di dalam meruntuhkan rezim yang mereka hadapi mulai dari pra kemerdekaan hingga di masa runtuhnya orde baru. Pergerakan mahasiswa tidak harus di terjemahkan dengan metode meneriakkan kebenaran dan keadilan di jalan. Konsep itu menurut penulis merupakan cara konvensional yang perlu transformasi di dalamnya. Kita di tuntut untuk menciptakan sebuah pergerakan yang inovatif sebagai intelek muda dan berusaha tetap menjaga salah satu peran dan fungsi kita sebagai mahasiswa yaitu *Guardian of Value*.¹²⁵

Di masa pembungkaman tuk bersua, kuantitas massa yang masif menjadi salah satu metode dalam memaksimalkan gerakan yang disebut sebagai gerakan Massa. Pergerakan ini dipandang efektif ketika kebebasan berpendapat di kebiri oleh penguasa.

Namun, konsep pergerakan yang represif dengan melakukan demonstrasi di jalan kini kurang relevan jika hanya dijadikan satu-satunya solusi dalam menyampaikan aspirasi dan meluapkan kemarahan kita terhadap tirani kekuasaan yang mengimplikasikan kejahatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terpraktikkan. Sebagaimana yang dikatakan Lord Acton bahwa *power tend to corrupts and absolute power to corrupt absolutely* (kekuasaan cenderung untuk

¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Guardian of value merupakan salah satu fungsi mahasiswa. Mahasiswa sebagai *Guardian of Value* berarti mahasiswa berperan sebagai penjaga nilai-nilai di masyarakat. (<https://geowana.wordpress.com/2008/08/10/peran-fungsi-posisi-mahasiswa/>)

disalahgunakan dan kekuasaan yang mutlak disalahgunakan secara mutlak)¹²⁶ karena memang kekuasaan cenderung di selewengkan apalagi ketika sudah melenggang hingga 32 tahun lamanya seperti yang terjadi pada masa orde baru.

Konsep Pergerakan di tiap-tiap periodisasi perlu menjadi bahan kajian bersama. Dimana, kini sederat kejadian memilukan begitu menyayat hati, kemurnian pergerakan mahasiswa ternodai dengan adanya oknum-oknum yang dengan sengaja menunggangi pergerakan mahasiswa dengan kepentingan politisnya. Dan terjadi disorientasi pergerakan mahasiswa.

*Herakleitos menyatakan bahwa hidup ini pamtharei, artinya bergerak. Manusia dan masyarakat sebagai himpunan dari individu itu juga bergerak.*¹²⁷ begitupun gerakan mahasiswa. Memiliki dinamisasi dari tiap periodenya. memanfaatkan era kemajuan teknologi yang terjadi saat ini, dapat menjadi salah satu senjata utama di dalam melakukan demonstrasi di era modern ini. Di dukung juga dengan lahirnya undang-undang yang menjamin kebebasan pers dan juga semakin dijaminnya hak kebebasan berpendapat. Itu semua dapat dijadikan alat dalam mengkritik dan melakukan perlawanan terhadap penguasa. Dan masih banyak cara intelektual lainnya yang dapat ditempuh yang diantaranya melakukan gerakan intelektual yang produktif seperti membuat buku sebagai aktualisasi kita sebagai mahasiswa yang notabenenya intelektual muda di masyarakat.

¹²⁶ Yopi Gunawan. dick, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung:PT. Rafika Aditama, 2015,111m 56.

¹²⁷ M. Soebagio. dkk,*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*,Jakarta :CV. Akademika Pressindo, 1987, hlm. 51

Segala bentuk pergerakan dapat di desain seintelektual mungkin, sehingga dapat melakukan kontribusi besar di dalam pergerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini yang semakin akut. Dalam mendesain sebuah pergerakan harus dengan memikirkan efektifitas pergerakan yang terukur, sehingga tidak menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat yang notabenenya di perjuangkan haknya.

B. Pengembalian Fungsi Mahasiswa untuk Mencegah Korupsi.

Mahasiswa merupakan seorang individu yang dilekatkan kepadanya predikat dan di embangi tugas sebagai kaum intelektual yang mampu menyebarkan virus literasi dan kultur intelek kepada masyarakat. *Mahasiswa di dalam undang-undang no. 12 tahun 2012 di definisikan, yaitu peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.*¹²⁸ Dan di dalam perkembangannya drngan melihat dinamisasi pergerakan mahasiswa dari masa ke masa. Sehingga secara konsepsi lahirlah berbagai perspektif dan berdasarkan *konsepsi dasar tridarma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan Pengabdian.*¹²⁹ Maka di bebaskanlah berbagai peran dan fungsi mahasiswa tidak hanya sebagai peserta didik yang berada pada jenjang pendidikan tinggi semata. Muncul berbagai perspektif sebagai transformasi nilai yang akan di turunkan ke generasi berikutnya secara kesinambungan.

Di dalam dinamikanya peran dan fungsi mahasiswa sebagai berikut:

1. Sebagai Agent of change (agen perubahan)

¹²⁸ UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

¹²⁹ Pasal 1 ayat (9) UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Mahasiswa sebagai Agent of Change, Artinya adalah mahasiswa sebagai agen dari suatu perubahan. Lalu kini masalah kembali muncul, "Kenapa harus ada perubahan?". Untuk menjawab pertanyaan itu maxi kita pandang kondisi bangsa saat ini. Menurut saya kondisi bangsa saat ini jauh sekali dari kondisi ideal, dimana banyak sekali penyakit-penyakit masyarakat yang menghinggap hati bangsa ini, mulai dari pejabat-pejabat atas hingga bawah, dan tentunya tertular pula kepada banyak rakyatnya. Sudah seharusnya kita melakukan terhadap hal ini. Lalu alasan selanjutnya mengapa kita harus melakukan perubahan adalah karena perubahan itu sendiri merupakan harga mutlak dan pasti akan terjadi walaupun kita diam. Bila kita diam secara tidak sadar kita telah berkontribusi dalam melakukan perubahan, namun tentunya perubahan yang terjadi akan berbeda dengan ideologi yang kita anut dan kita anggap benar.¹³⁰

2. Sebagai iron stock (generasi pelanjut)

Mahasiswa dapat menjadi Iron Stock, yaitu mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Intinya mahasiswa itu merupakan aset, cadangan, harapan bangsa untuk masa depan. Tercakup dapat dipungkiri bahwa seluruh organisasi yang ada akan bersi fat mengalir, yaitu ditandai dengan pergantian kekuasaan dari golongan tua ke golongan muda, oleh karena itu kaderisasi harus dilakukan terus-menerus. Dunia kampus dan

¹³⁰ <https://geowana.wordpress.com/2008/08/10/peranfungsi-posisi-mahasiswa/> Sebagai iron stock (Generasi pelanjut)

*kemahasiswaannya merupakan momentum kaderisasi yang sangat sayang bila tidak dimanfaatkan bagi mereka yang memiliki kesempatan.*¹³¹

3. *sebagai Guardian of value (penjaga nilai)*

*Mahasiswa sebagai Guardian of Value berarti mahasiswa berperan sebagai penjaga nilai-nilai di masyarakat. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, "Nilai seperti apa yang harus dijaga ??". Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus melihat mahasiswa sebagai insan akademis yang selalu berpikir ilmiah dalam mencari kebenaran. Kita harus memulainya dari hal tersebut karena bila kita renungkan kembali sifat nilai yang harus dijaga tersebut haruslah mutlak kebenarannya sehingga mahasiswa diwajibkan menjaganya.*¹³²

4. *Sebagai social of control (pengontrol social)*

Mahasiswa diupayakan agar mampu mengkritik, memberi saran dan memberi solusi jika keadaan social bangsa sudah tidak sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa, memiliki kepekaan, kepedulian, dan kontribusi nyata terhadap masyarakat sekitar tentang kondisi yang teraktual. Asumsi yang kita harapkan dengan perubahan kondisi social masyarakat tentu akan berimbas pada perubahan bangsa. Intinya mahasiswa diharapkan memiliki sense of belonging yang tinggi sehingga mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Tugas inilah yang dapat menjadikan dirinya sebagai harapan bangsa, yaitu menjadi orang yang senantiasa mencari solusi berbagai problem yang sedang menyelimuti

¹³¹ Ibid

¹³² Ibid

mereka.¹³³

Dari serangkaian peran dan fungsi di atas mahasiswa sebagai kaum intelektual yang di di lekatkan di pundaknya berbagai tanggung jawab dalam menuntun bangsa ini ke arah yang lebih baik. Mahasiswa harus berposisi sebagai pengawas dan juga dapat sebagai mitra kerja pemerintah. Jika pemerintah yang notabenenya representasi masyarakat, mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat.

Dan Sebagai kaum intelektual pelanjut tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini, masyarakat manaruh harapan besar kepada para mahasiswa dengan nilai-nilai keidelismeannya dalam memberikan kontribusi terhadap negara. Para penyelenggara negara juga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan keseimbangan guna tuk mencapai tujuan bersama. Konsep pengawasan sangat dibutuhkan agar tidak terjadi tirani kekuasaan. *Pengawasan pada dasarnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (das sein) dengan hasil yang diinginkan (das sollen), yang dilakukan dalam rangka melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan manajemen.*¹³⁴ Selain sebagai pengawas mahasiswa harus juga pro aktif dalam menyosialisasikan hak-hak yang dimiliki warga negara agar warga negara juga mengetahui apa yang seharusnya dimiliki di dalam pemerintahan guna tuk meningkatkan partisipasinya dalam mewujudkan gerakan civil society¹³⁵

¹³³ <http://catatanaktivismuda.blogspot.co.id/2013/08/peranfungsi-mahasiswa-pfm.html>

¹³⁴ Titik Triwulan Tutik, dkk, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hulcum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2011, hlm. 447

¹³⁵ *Civil society* didefinisikan sebagai sektor non-negara suatu masyarakat. Luthfi. J.

di Indonesia.

Dan Jika merefleksi perjalanan bangsa ini sejak zaman orde baru sampai reformasi sekarang ini, masih sangat minim kebijakan pemerintah yang pro rakyat seperti yang di tuntutan pada reformasi di tahun 1998 silam. Terutama di bidang penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. *Ada 6 tuntutan reformasi yang di teriakkan di tahun 1998 oleh para mahasiswa, yaitu : 1. Supremasi hukum. 2. pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). 3. Pengadilan man tan presiden Soeharto dan para kroninya. 4. Amandemen LILID 1945. 5. Pencabutan dwifungsi ABRI. 6. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya.*¹³⁶

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu tuntutan reformasi yang sampai saat ini masih di pertanyakan keseriusan pemerintah dalam penanganannya. Terlebih lagi munculnya upaya pemerintah dan para legislator untuk melakukan revisi UU KPK yang berujung pada upaya pelemahan lembaga anti rasuah tersebut. Jadi, mahasiswa harus kembali berperan dalam mengawal perealisasi ketujuh tuntutan reformasi tersebut. Terutama di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena sangatsarat akan kepentingan para elit politik dan sangat berpotensi terjadinya konspirasi dari setiap penanganan kasusnya.

Peran dan fungsi mahasiswa masih sangat di butuhkan dalam mengawal

pembangunan di negeri ini. dan berbagai permasalahan hari ini masih begitu, kompleks dan banyak memandang agenda reformasi di tahun 1998 gagal dalam perwujudannya. Korupsi masih begitu merajalela dimana-mana. Penegakan hukum masih begitu "murah" untuk di beli oleh kaum pemodal. Itu dikarenakan masih kurangnya tingkat kekonsistensian kita sebagai agen perubahan, pengontrol sosial, penjaga moral. Guna tuk menciptakan generasi penerus negeri ini. Selain sebagai pengawas dari setiap tindakan pemerintah. mahasiswa juga harus mengamalkan atau mengaktualisasikan peran dan fungsinya terdahulu di dalam dirinya. Tanamkan nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran dalam diri. Karena mahasiswa memiliki kedudukan khusus di masyarakat sebagai panutan. jadi, mahasiswa harus menampilkan diri juga sebagai panutan yang memang pantas untuk di panuti sebagai salah satu wujud menyosialisasikan nilai-nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran di masyarakat. guna pencegahan korupsi di masyarakat.

C. Membangun Mahasiswa Dari Sifat Hedonisme

Mahasiswa sebagai elemen penting dalam komposisi kelompok masyarakat, tidak dapat dipungkiri memiliki peranan penting dalam dinamika sosial yang terjadi. Mahasiswa adalah sekelompok pemuda yang mendapatkan posisi dan peran yang begitu strategis berkat karunia intelektualitas yang terdapat pada dirinya, kedudukan ini yang menjadikan kelompok ini menjadi sebuah elemen yang amat sangat mempengaruhi setiap gejolak perubahan sosial. Dalam struktur sosial pun mereka berada pada posisi *middle class* dimana hakikatnya mereka tidak terpolarisasi oleh

jenis kepentingan apapun sehingga padanya melekat sebuah tuntutan untuk dapat menjadi patron dalam perubahan sosial.

Kedudukan mahasiswa sebagai agen perubahan tentunya menuntut sebuah kompetensi paripurna sebagai perangkat dalam menjalankan fungsinya sebagai *Agent of Change*. Kepandaian intelektual, kecerdasan psikomotorik, keahlian dalam membuat keputusan dan kekokohan karakter yang berintegritas adalah factor-faktor penting yang haruslah terangkum dalam diri seorang mahasiswa sebagai individu yang memangku beban dan tanggung jawab di atas.

Sayangnya, kita mendapati sebuah realita yang amat ironis dewasa ini. Betapa kita melihat para pemuda atau mahasiswa terjerumus dalam sebuah pola hidup yang cenderung hedonis. Kemajuan serta perkembangan teknologi yang merambah millennium ini seolah menjadi pisau bermata dua, meningkatkan derajat kehidupan manusia di satu sisi, dan mengisolasi ruang-ruang public di sisi lainnya. Mahasiswa pun tidak luput dari serangan tersebut, arus globalisasi menghantarkan sebuah pola baru bagi kehidupan mahasiswa yang kita kenal belakangan ini. Ada sebuah zona nyaman yang menjebak mahasiswa untuk terperangkap di dalamnya, dimana konsep pergerakan yang menjadi ruh dari status mahasiswa seolah kehilangan tajinya. Mereka lebih mudah didapati berada di tempat tongkrongan-tongkrongan elit, berpesta foya dengan teman-teman sebaya, menghabiskan malam untuk berhura-hura dan serangkaian kegiatan hedon lainnya yang amat mencemaskan perkembangan mahasiswa itu sendiri. Ruang-ruang akademis di kampus seolah lupa harus menghasilkan kader yang seperti apa saat ini, dikungkung oleh kesenangan akan

materi yang amat melenakan

1. Karakter Manusia Terpupuk Sejak Kecil

Sebenarnya kita patut untuk mengecek system pendidikan yang telah kita anut selama ini. Ini adalah elemen penting yang perlu dipahami dalam memaknai bagaimana karakter manusia Indonesia bisa terbentuk. Pola perkembangan manusia sejak kecil memang amat sangat memengaruhi bagaimana karakter mereka pada saat dewasa nantinya, menurut Berk, perkembangan lebih mengacu pada perubahan karakteristik yang khas dari gejala-gejala psikologis kearah yang lebih maju. Para ahli psikologi pada umumnya menunjuk pada pengertian perkembangan sebagai sesuatu yang bersifat progresif dan menyebabkan tercapainya kemampuan dan karakter psikis yang baru. Perubahan kemampuan dan karakteristik psikis sebagai basil dari perubahan dan kesiapan struktur biologis sering dikenal dengan istilah "kematanganri"¹³⁷

Kematangan inilah sebenarnya yang di harapkan mampu diproduksi oleh system pendidikan kita. Pola yang sebenarnya absen jika kita melihat alur pendidikan yang dibangun oleh pemerintah kita. Tolak ukur pendidikan kita saat ini justru dititik beratkan pada unsure kognitif belaka, sehingga ada kesan bahwa system pendidikan kita saat ini justru tak lebih dari sekedar pabrik penghasil robot, kita lupa memanusiakan para peserta didik.

Pendidikan karakter merupakan hal yang sama urgentnya dengan

¹³⁷ Muhammad Ali & Muhammad Asrori, *Psikologi Rernaja: Perkenthangan Peserta Didik*, Jakarta: Media Grafika, 2010, hlm. 11

peningkatan kemampuan kognitif, sebab unsure inilah yang kemudian mendudukkan bagaimana model manusia Indonesia tercipta. Jangan heran apabila kita melihat para pemuda kita saat ini terperangkap oleh model hidup hedonistic ala barat, sebab kita lupa untuk membangun sebuah mentalitas sejati dalam system pendidikan kita. Inilah yang kita tanamkan sejak kecil pada generasi muda Indonesia.

Sehingga jika kita melihat realitas kekinian, dimana para mahasiswa justru terlihat lebih sibuk dalam urusan penampilan belaka ketimbang memperkaya khazanah pengetahuan, itu jelas dapat kita identifikasi dari bagaimana model karakter yang ditanamkan pada mereka sejak kecil. Kebutuhan terhadap penghargaan eksistensi diri tampaknya sudah memainkan peran yang dominan dalam paradigma mahasiswa saat ini, sayangnya pemenuhan itu kemudian dibelokkan pada model pemenuhan yang cenderung materialistik. Mereka mengampulasi kepekaan sosial yang harusnya menjadi ciri utama seseorang yang bergelar mahasiswa. Inilah ironinya !

2. Memahami Hakikat dan Fungsi Mahasiswa

Seperti yang telah kita bahas di awal, bahwa tanggung jawab seorang mahasiswa sebenarnya jauh lebih luas daripada sekedar penuntut ilmu di ruang kelas. Ia memiliki tanggung jawab moral dalam membangun kesejahteraan sosial. Kepentingan dan keberpihakan mahasiswa haruslah selaras dengan suara keluh-kesah yang menjadi rintihan masyarakat. Sebagai patron dalam setiap perubahan sosial sebenarnya kita mudah saja mengidentifikasi seseorang sebagai mahasiswa,

lihat saja orang-orang yang vocal dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.

Sebagai jembatan dalam struktur sosial, antara masyarakat dengan rezim, mahasiswa haruslah memiliki daya sensitifitas yang baik, agar mampu mengidentifikasi setiap gejala dan upaya yang berpotensi merugikan masyarakat. Siklus inilah yang kemudian menjadikan posisi mahasiswa begitu strategis, mereka haruslah menjadi mitra bagi masyarakat dan di sisi lain menjadi oposisi yang sehat bagi jalannya pemerintahan yang berdaulat. Pola inilah yang kemudian menjadi tumpuan ketika kita mengharapkan terjadinya roda bernegara yang sehat. Mahasiswa adalah elemen pentingnya.

Polarisasi kepentingan yang bergejolak di negeri ini haruslah mampu difilter oleh mahasiswa sebagai benteng penyangga kepentingan masyarakat. Mahasiswa haruslah mampu menjadi garda terdepan yang menginisiasi setiap gerakan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Pola ini kemudian haruslah menjadi daya pikat mahasiswa, sebab sekali saja mahasiswa kehilangan kepercayaan dari masyarakat, maka sirnalah separuh ruh dari pergerakan mahasiswa itu sendiri.

Berangkat dari seluruh tanggung jawab dan peran tersebut, maka sudah saatnya kita bangun dari tidur panjang ini. Gejolak negeri ini sudah memanggil para mahasiswa untuk turun tangan. Menjadi messiah yang siap menjadi penyelamat atas seluruh polemik yang membungkam rakyat kita. Sudah saatnya gejala apatisme ini kita singkirkan, kita tidak hidup pada sebuah ruang hampa untuk memenuhi seluruh gejolak syahwat kita akan kesenangan terhadap benda-

benda, dengarlah, rakyat merintih!

Memekakkan nyanyian paling sendu atas seluruh derita yang mereka terima. Bangunlah kawan, sudah saatnya generasi kita unjuk diri atas seluruh sengkarut negeri ini !

3. Membangunkan Mahasiswa dari Sifat Hedonisme

Bukanlah teori, tapi perbuatanlah yang mengubah dunia –

Muso

Saat ini mahasiswa dikecam akibat gejala apatisisme yang membudaya, kita seolah berada pada dunia yang terpisah daripada masyarakat . Padahal, seluruh harapan dan tuntutan masyarakat tak lain ditujukan kepada mahasiswa sebagai pionir utama. Kita banyak mendapati kecaman itu terlontar dari para aktivis-aktivis senior. Bahwasanya pola hidup mahasiswa saat ini terkesan terlalu metroseksual, hanya memperhatikan tetek bengek penampilan belak*. Betapa menyedihkannya jika kita melihat bahwa mahasiswa seolah-olah membiarkan rakyat untuk berjuang sendirian . Untaian syair dari Maya Angelou mungkin bisa sedikit menyentak kita; perasaan apa yang ada dalam dirimu semasa berada di kampus? Sudahkah pengetahuan yang kau peroleh membawamu dalam rasa empati, keberaruan yang kuat dan kemauan untuk berpetualang². Setidaknya kita paham bahwa ilmu-ilmu yang kita dapatkan di kampus tidaklah bertujuan hanya semata-mata penunjang catatan akademis melainkan sebagai perangkat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Mahasiswa hari ini telah dituntut untuk bisa secepatnya menemukan

marwahnya kembali Bersatu padu dengan masyarakat demi membangun kesejahteraan sosial yang lebih memadai. Beberapa poin perlu diperhatikan agar semangat juang mahasiswa dapat berkobar kembali. Mereka perlu memahami kembali orientasi dari perjuangan yang selama ini digelorakan oleh seorang mahasiswa. Sesuai yang pernah dipaparkan Baharuddin Lopa, bahwa perjuangan mahasiswa adalah bentuk perjuangan yang suci, dimana perjuangan mereka bagaikan air bah yang mengalir dan akan terus mengalir sampai ke muara atau sampai cita-cita perjuangannya tercapai. *"Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya"* (Ar-Raad, ayat 11)¹³⁸

D. Pentingnya Lembaga Kemahasiswaan Yang Berorientasi Pada Tindak Pidana Korupsi

"Hanya ada dua pilihan seorang manusia: menjadi idealis atau apatis."

(Soe Hok Gie)

Kalimat di atas seharusnya mewakili dari prinsip, semangat dan komitmen para pemuda negeri ini. Pemuda yang mengingat bahwa sejarah umat manusia adalah gerak perjuangan untuk hidup dan membangun peradaban. Keberadaban yang berdasar atas penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebudayaan. Kebudayaan, tak lain adalah ekspresi dari akal budi, pengetahuan dan kreatifitas manusia.¹³⁹ Memasung ikhtiar dan kreatifitas manusia, sama saja dengan membunuh

¹³⁸ Aninditodkk, *Menggusur Status Quo*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998. hlm. 253

¹³⁹ Maman Suratman, *Kesaksian Kisah Perlawanan Mahasiswa UTY*, Yogyakarta : Human-liberty, 2015, hlm xiii.

semangat kebudayaan sekaligus menghancurkan benih-benih kemajuan.

Di dunia pendidikan yang berada pada level tertinggi, yaitu Mahasiswa yang merupakan "*agent of change*" dituntut untuk dapat melakukan perubahan baik itu dari dalam diri maupun lingkup yang lebih luas lagi. Mahasiswa yang diharapkan mampu menjadi insan yang lebih bermanfaat untuk insan yang lainnya tentu perlu waktu masa transisi dari siswa menjadi tingkatan yang lebih tinggi lagi. Tahap transisi dari siswa menjadi mahasiswa membutuhkan wadah untuk mengolah diri menuju pemuda yang lebih matang dari sebelumnya. Hal inilah yang menjadi peran penting untuk kampus dalam menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri bagi didikannya. Maka dari itu lahirlah, lembaga kemahasiswaan yang dikelola oleh mahasiswa, dalam rangka mengembangkan dirinya. Lembaga Kemahasiswaan mempunyai fungsi dan peran sebagai wahana untuk membina persaudaraan dan sikap intelektual mahasiswa serta menjadi satu-satunya wadah untuk menyalurkan aspirasi yang bertanggungjawab yang hidup dikalangan mahasiswa untuk mewujudkan tujuan Perguruan Tinggi.¹⁴⁰

Tidak banyak mahasiswa yang betul-betul mengerti mengenai korupsi. Korupsi yang umumnya diketahui adalah hanya sekedar mengambil uang masyarakat, namun tidak banyak yang memahami variasi-variasi korupsi yang semakin modern. Oleh karena itu, Lembaga khusus bagi mahasiswa yang berorientasi pada tindak pidana korupsi dinilai perlu untuk diadakan bagi seluruh kampus di Indonesia sebagai

¹⁴⁰ Kudubun Elly Esra, *Fungsi dan Peran Lembaga Kemahasiswaan*, 2011, diakses dari <http://ellykudubun.wordpress.com/2011/09/23/fungsi-peran-lembaga-kemahasiswaan/>, pada tanggal 09 Maret 2016.

bekal sekaligus pendidikan bagi setiap mahasiswa untuk melawan dan memberantas tindak pidana korupsi. Wadah ini tentunya bukan sekedar perkumpulan simbolistik belaka, yang menawarkan perlawanan terhadap korupsi sebagai embel-embel retorik semata. Perjuangan melawan korupsi hari ini sudahlah sedemikian massif, sehingga seluruh elemen dan struktur masyarakat turut bertanggung jawab dalam melakukan upaya perlawanan terhadap korupsi.

Apalagi dengan realita yang mengungkapkan bahwa gejala apatisme sudah tampak sedemikian, membudaya di kalangan mahasiswa saat ini, kepekaan sosial yang menjadi ciri khas dari mahasiswa seolah hilang digerus budaya hedonisme yang melenakan, sehingga kehadiran akan sebuah lembaga kemahasiswaan yang berorientasi terhadap pemberantasan korupsi dianggap merupakan suatu hal yang sifatnya sangat urgen, dimana lembaga ini haruslah menjadi patron bagi mahasiswa untuk dapat kembali mengobarkan semangat juang para kaum-kaum intelektual seperti mahasiswa.

Dalam sejarah panjang peradaban umat manusia, kita selalu disajikan cerita-cerita mengenai peran kaum-kaum intelektual yang senantiasa menjadi tokoh dalam pencerahan peradaban bangsa-bangsa. Kehadiran kaum intelektual ini selalu menjadi penting bersebab kemampuan daya nalar dan kritisisme mereka menjadi senjata utama dalam menentang segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh rezim. Kebutuhan akan sebuah model pergerakan yang paripurna dan komprehensif dari para kaum intelektual ini sendiri membutuhkan wadah yang amat menunjang demi menyuarkan setiap aspirasi masyarakat. Inilah urgensi kehadiran lembaga

kemahasiswaan yang berorientasi pada pemberantasan korupsi.

Gerakan dari kampus itu tidak lain dalam rangka reformasi dan mencari jalan keluar dari krisis yang secara tersistem telah merusak kerangka bernegara kita. Keterlibatan kaum intelektual ini diharapkan tidak terbatas dalam aksi pemikiran semata tetapi juga menuntut sebuah pergerakan akan sebuah perubahan sesuai dengan alur-alur yang mungkin bisa dilakukan oleh mereka. Inilah tantangan dan hambatan lembaga kemahasiswaan saat ini, stagnasi dalam model pergerakan hari ini tidak lain merupakan akibat lumpuhnya daya kritisisme yang terolah pada pribadi mahasiswa itu sendiri, ditambah lagi dinamika korupsi yang sudah semakin mengakar menyebabkan seolah terjadi justifikasi sosial terhadap segala praktek dan upaya korup yang sedemikian massif. Keberanian dan empati sudah tecerabut daripada atribut kemahasiswaan hari ini, sehingga keberadaan lembaga ini diharapkan menjadi wadah yang secara konstruktif dapat membangun daya kritisisme dan kepekaan sosial para mahasiswa.

Menelisik kemauan seseorang untuk berhimpun bersama dalam sebuah lembaga tentunya didorong oleh motivasi-motivasi tertentu, pada dasarnya ada tiga karakteristik pokok motivasi yaitu, usaha, kemauan yang kuat, serta arah dan tujuan tertentu.¹⁴¹ Menyadari bahwa keberadaan lembaga anti korupsi ini eksis saja sudah memberi angin segar bahwa masih ada orang-orang yang memang memiliki motivasi mendasar untuk melakukan perjuangan dalam bidang perlawanan terhadap korupsi, sebab ketika orang-orang berkumpul dalam wadah sebuah lembaga maka ada

¹⁴¹ Sopiah, *PerilakuOrganisasional*, Yogyakarta: ANDI, 2008, hhn. 169

komitmen organisasional yang hendak mereka capai sebagai motivasi untuk berlembaga. Dan realita yang menggambarkan bahwa kita sedang berada dalam system bernegara yang amat koruptif, menyadarkan kita bahwa semangat pergerakan melawan korupsi sudah harus tersusun secara sistematis dalam seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.

Sehingga keberadaan lembaga kemahasiswaan yang berorientasi terhadap tindak pidana korupsi merupakan salah satu komponen penting dalam upaya melanggengkan perlawanan terhadap tindak pidana korupsi, mereka adalah wadah yang secara sistematis dapat menyuarakan segala bentuk idealism dan aspirasi masyarakat secara konstan. Namun, patut untuk diperhatikan, dengan segala unsure kepentingan yang disandang oleh lembaga ini maka tentu model pergerakan yang independen haruslah menjadi ciri utamanya, segala bentuk intervensi yang mungkin dapat menyergap.

E. Tuntutan Lembaga Mahasiswa Abad Ini

Kondisi dan realita yang tampak dalam situasi nasional saat ini, terlebih mengenai soal korupsi yang sudah semakin mengakar dan sistematis mengharuskan adanya perlawanan yang juga tersusun secara komprehensif. Keberadaan lembaga mahasiswa yang diharapkan menjadi patron dalam pergerakan sosial, terutama dalam upaya melawan korupsi membawa sebuah tuntutan yang murni dalam membawa idealisme mahasiswa dalam mengobarkan semangat perlawanan. Konsep gerakan mahasiswa yang terangkum dalam semangat lembaga anti korupsi, haruslah

mencerminkan sebuah model pergerakan yang paripurna dan komprehensif. Dimana pemaknaan paling tinggi daripada konsep pergerakan yang diusung haruslah menjamin sinergitas daripada visi tri darma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Sinergitas berjenjang daripada visi tri darma perguruan tinggi ini sebenarnya merupakan konsep yang holistic yang dapat dijabarkan dalam melakukan sebuah gerakan sosial. Pendidikan yang dimaksud adalah bagaimana system pendidikan kita dalam lembaga kemahasiswaan mampu memproduksi kader yang memahami visi berlembaga yang menjadi orientasi. Sedangkan dalam poin penelitian, kita diajarkan untuk mengelola sebuah isu secara objektif, sehingga wacana yang didengungkan merupakan sebuah isu factual yang telah dikaji secara mendalam. Poin puncaknya terdapat pada pengabdian, inilah konsep aplikatif yang harus dijabarkan dalam model pergerakan yang diusung oleh lembaga mahasiswa. Dalam perlawanan terhadap korupsi, lembaga yang berorientasi terhadap tindak pidana korupsi haruslah merupakan sebuah lembaga yang memiliki sinergitas berjenjang dalam mengusung perlawanan terhadap korupsi.

Lembaga ini, sebuah role model yang tidak sekedar menjadi patron dalam menginisiasi perlawanan terhadap korupsi, lebih daripada itu lembaga ini juga haruslah memproduksi kader-kader yang memiliki integritas serta mampu mengajarkan keteladanan. Sebab pola yang paling efektif dalam menghambat virus koruptif adalah dengan penguatan karakter dan integritas individu, oleh karena itu mahasiswa haruslah menjadi duta terbaik yang mampu menampilkan sosok paling berkualitas dalam menyuarakan perlawanan terhadap korupsi. Lembaga mahasiswa

haruslah menjadi pabrik terbaik untuk itu.

Oleh karena eksistensi dalam upaya melawan korupsi haruslah terus dilanggengkan, maka keberadaan lembaga yang berorientasi dalam upaya melawan korupsi haruslah mampu menjadi sub system yang menjadi factor penunjang aparat penegak hukum. Ini harus menjadi factor yang selalu diperhatikan sebab untuk menjadikan pergerakan yang massif, maka keterlibatan seluruh komponen masyarakat adalah titik utamanya, di sinilah lembaga kemahasiswaan memainkan perannya.

BAB V

KORUPSI SEBAGAI AKIBAT KURANGNYA PENDIDIKAN MORAL DAN ETIKA

A. Pendidikan Moral Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi

Pendidikan merupakan hal yang sedang ditingkatkan dan diemban oleh bangsa Indonesia guna menghasilkan para insan terpelajar yang mampu mengkomprehensifkan keadaan baik dalam dunia kerja maupun persaingan global. Walau Kementerian Pendidikan Indonesia sedang giat mengembangkan proses dan sistem pendidikan yang ada, baik dalam taraf pendidikan formal maupun informal pada jajarannya. Namun keadaan ini berbanding terbalik dengan tujuan yang diharapkan bangsa Indonesia, dikarenakan pendidikan yang dilaksanakan tidak berbasis pada pengembangan karakter dari orang yang menerima pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan di Indonesia hanya berjalan di tempat pada pemberian ilmu secara teoritis, tanpa memerhatikan dampak kedepannya.¹⁴²

Berbicara mengenai pendidikan bukan hanya bertujuan untuk menciptakan manusia yang cerdas, tetapi pendidikan juga bertujuan disamping untuk mencerdaskan serta melahirkan pula Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak, beretika dan bermoral. Sebelum membahas mengenai " Korupsi Sebagai Akibat Kurangnya Pendidikan Moral dan Etika," terlebih dahulu perlu dibahas mengenai

¹⁴² Anonim, *Keadaan Pendidikan Indonesia Saat Ini*, Jakarta:Koran Antara, At available <http://www.antaraneews.com/berita/467070/> mendikbud--pendidikan-indonesia-dalam-kondisi-gawat-darurat, diakses pada 17 Maret 2016.

moral dan etika yang sepatutnya terkandung dalam sistem pendidikan di era yang global kini.

Moral sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *mores* kata jamak dari *mos* yang berarti adat kebiasaan, dan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan susila. Moral adalah hal-hal yang sesuai dengan ide-ide umum yang diterima tentang tindakan manusia, yang membedakan baik dan buruknya suatu hal. Sedangkan etika itu berasal dari bahasa Yunani dari kata *ethos* yang berarti watakkesusilaan atau adat. Dalam ilmu filsafat, etika disebut sebagai ilmu yang menyelidiki dan memahami antara hal yang baik dan buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui akal pikiran manusia.

Hal-hal baik ataupun yang buruk ini terletak pada landasan moral dan etika itu sendiri, pada etika penilaian hal baik dan buruk terletak pada akal pikiran, sedangkan pada konsep moral, hal-hal yang dianggap baik dan buruk terletak dan terkonsentrasi terhadap nilai-nilai dalam masyarakat. Membahas mengenai moral dan etika inilah yang sangat kecil bentuk pengimplementasiannya dalam dunia pendidikan, menjadi salah satu penyebab adanya perilaku korupsi yang bukan terjadi pada kalangan elit negara saja, tetapi juga dalam kehidupan pada umumnya di masyarakat Indonesia. Ini pun memicu perilaku korupsi bukan lagi menjadi hal yang tabu dalam masyarakat di zaman ini.

Fakta yang terjadi, sistem pendidikan di negara berkembang ini memang telah mengesampingkan yang namanya pembentukan moral dan etika kepada insan pelajar, yang seharusnya pendidikan menjadi sarana dan prasarana yang mampu menciptakan

SDM yang bermoral, mandiri, berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan moral merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan bangsa ini, terlebih lagi jika melihat dari sudut pandang banyaknya perilaku korupsi yang telah terjadi selama ini.

Korupsi tidak semata-mata dilakukan bukan dari kalangan orang-orang yang tidak mampu, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ingin mengejar, mempertahankan, meningkatkan jabatan dan materinya. Sehingga tidak heran jika prinsip "Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin" ini terjadi pada bangsa kita yang notabenenya memiliki banyak kekayaan alam, dimana seharusnya dapat dioptimalkan demi kemakmuran seluruh rakyatnya, bukan tanpa berkutat pada segelintir orang (penguasa). Problematika inilah yang menimbulkan pertanyaan besar mengenai penyebab hal-hal ini dapat terjadi di bangsa yang terkenal sebagai negara kaya akan alamnya dan multikultural, yang perlu dengan segera diatasi oleh *Stakeholder* yang ada.

Penyebab pertama kian maraknya kasus tindak korupsi di bangsa ini, karena diawali dengan sistem pendidikan di Indonesia terlalu terfokus untuk mencerdaskan bangsa dan mengesampingkan moral dan etika. Indonesia terfokus pada segala hal yang ditentukan dengan "nilai", maksudnya nilai menjadi patokan kecerdasan dan tahap seseorang dikatakan sebagai insane terpelajar tanpa memperhatikan perilaku atau tingkah laku dari subjek pendidikan tersebut. Tanpa memperhatikan proses bagaimana memperoleh "nilai" tersebut. Paradigma yang tercipta pada pendidikan saat ini dengan mencapai "nilai" yang bagus akan mempermudah segalanya.

Keadaan ini mempermudah mendapatkan pekerjaan sebagai contohnya. Sehingga orang-orang berlomba-lomba memperoleh hal tersebut bahkan dengan cara-cara yang tidak jujur untuk mendapatkan "nilai" yang bagus tersebut. Padahal yang terpenting adalah cara atau proses mendapatkannya. Bahkan "nilai" tidak mejamin kecerdasan seseorang dan bagaimana seseorang tersebut mampu mandiri menghadapi dunia yang sebenarnya. Anak bangsa mengalami ketakutan, bahwa jika mereka tidak mendapatkan "nilai" yang menjadi patokan tersebut mereka sama sekali tidak dihargai, sama sekali tidak berarti padahal ini bukan lah yang utama. Kalau mereka mendapatkan hal tersebut dengan cara-cara curang yah sama saja hasilnya dengan nol besar. Hal-hal ini lah perilaku ketidak jujuran yang membuat timbulnya awal dari perilaku korupsi yang membuat bobroknya etika moral dan bangsa ini.

Sistem yang perlu diubah sekarang ini yaitu menghilangkan paradigma negaif bahwa "hasil" "nilai" merupakan hal yang utama. Karena hal tersebutlah yang membuat ketidakpedulian dalam melakukan kejujuran. Hal yang perlu diubah selanjutnya yaitu memberikan pendidikan berkarakter pada ruang lingkup keluarga yang merupakan lingkup paling kecil, memberikan pendidikan agama sejak dini agar ada batasan batasan dari tingkah laku yang dapat dikontrol. Kemudian pemerintah tidak menjadikan nilai sebagai patokan yang utama, tetap nilai menjadi patokan akan tetapi "nilai" bukan menjadi hal utama tapi kejujuran dalam memperoleh nilai tersebut, memberikan kesempatan dan pada lembaga-lembaga pendidikan jika belum ada yang dapat memperoleh target dapat diberikan konseling dan pembelajaran yang lebih intens agar kesemuanya dapat tercapai, menambah jadwal pelajaran agama pada

sekolah-sekolah agar dapat menanamkan wujud dari sila pertama dan dapat mewujudkan cita-cita dari konstitusi kita mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. Pengajaran Moral Dan Etika Sebagai Bentuk Penguatan Karakter Bangsa

Memasuki era globalisasi, pengajaran etika dan moral menjadi urgen sebagai bentuk penguatan karakter bangsa. Dimana Moralitas mengandung arti sopan santun dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan. Bertingkah laku baik, bagi peserta didik seharusnya terwujud dalam seluruh pola kehidupan yang berarah kepada keluarga, guru dan teman. Sedangkan Makna atau arti etika lebih mengarah pada tindakan yang sadar dan disengaja. Istilah etika ditinjau dari segi makna atau arti, hampir sama dengan moral, tetapi dalam pemakaian ilmiah, moral biasanya hanya menyangkut kebaikan atau keburukan secara lahiriah atau kelihatan dari apa yang sebenarnya terjadi. Jadi etika adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai hasil yang tegas berdasarkan analisa dan akal budi yang menyangkut pemikiran sistematis tentang kelakuan, motivasi dan keadaan batin yang menyadarinya.

Di Indonesia pendidikan moral telah ada dalam setiap jenjang pendidikan. Di Sekolah Dasar perkembangan pendidikan moral tak pernah beranjak dari nilai-nilai luhur yang ada dalam tatanan moral bangsa Indonesia yang termaktub jelas dalam Pancasila sebagai dasar Negara. Pendidikan Moral Pancasila, yang sejak dari pendidikan dasar telah diajarkan tentu memiliki tujuan yang sangat mulia, tiada lain untuk membentuk anak negeri sebagai individu yang beragama, memiliki rasa

kemanusiaan, tenggang rasa demi persatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah untuk kerakyatan serta berkeadilan hakiki.

Apabila suatu bangsa dihuni oleh manusia yang bermoral dan bermartabat, maka pastilah kehidupan serta peradaban dalam bangsa tersebut akan berjalan mulus. Yang nantinya akan membawa diri bangsa kepada kehidupan yang jauh dari keterpurukan, kemiskinan dan krisis moral yang berkepanjangan. Ketika kita memperbincangkan kualitas moral pada anak-anak bangsa Indonesia sendiri mungkin kita patut untuk bersedih, mengapa demikian? Karena dengan maraknya kasus-kasus yang telah mewarnai bangsa ini mencerminkan bahwasanya bangsa kita ini telah mengalami degradasi kualitas moral yang sangat memperihatinkan. Mulai dari kasus tawuran remaja, kasus narkoba dan minuman keras, kasus hamil di luar nikah dan praktik aborsi, kasus pornoaksi dan porno grafi, hingga kasus korupsi dan suap yang dilakukan oleh para pejabat tinggi negara yang seharusnya menjadi panutan bagi para rakyatnya. Semua ini menunjukkan bahwa kondisi moral bangsa ini terutama generasi muda sudah mulai mengalami degradasi moral sehingga perlu mendapat perhatian, karena generasi muda merupakan inventaris bangsa yang harus kita jaga, dimana generasi muda sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya berperan dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia.

Dilihat dari sikap, banyak generasi muda yang tingkah lakunya tidak kenal sopan santun dan cenderung cuek tidak ada rasa peduli terhadap lingkungan. Karena globalisasi menganut kebebasan dan keterbukaan sehingga mereka bertindak sesuka hati mereka. Contoh riilnya adanya geng motor generasi muda yang melakukan

tindakan kekerasan yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat. Fenomena lain yang mencoreng citra pelajar dan lembaga pendidikan adalah maraknya 'gang pelajar' dan 'gang motor'. Perilaku mereka bahkan seringkali menjurus pada tindak kekerasan (*bullying*) yang meresahkan masyarakat dan bahkan tindakan kriminal seperti pemalakan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Semua perilaku negatif di kalangan pelajar dan mahasiswa tersebut atas, jelas menunjukkan kerapuhan karakter yang cukup parah yang salah satunya disebabkan oleh tidak optimalnya pengembangan karakter di lembaga pendidikan di samping karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung.

Di kalangan pelajar dan mahasiswa penggerusan moral ini tidak kalah memprihatinkan. Kebiasaan 'mencontek' pada saat ulangan atau ujian masih dilakukan. Keinginan lulus dengan cara mudah dan tanpa kerja keras pada saat ujian nasional menyebabkan mereka berusaha mencari jawaban dengan cara tidak beretika. Mereka mencari 'bocoran jawaban' dari berbagai sumber yang tidak jelas. Apalagi jika keinginan lulus dengan mudah ini bersifat institusional karena direayasa atau dikondisikan oleh pimpinan sekolah dan guru secara sistemik.

Dari cara berpakaian banyak generasi muda generasi muda kita yang berdandan seperti selebritis yang cenderung ke budaya Barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim bahan yang memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak kelihatan. Pada hal cara berpakaian tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Tak ketinggalan gaya rambut mereka dicat beraneka warna. Pendek kata orang lebih suka jika menjadi orang lain dengan cara menutupi identitasnya.

Tidak banyak generasi muda yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa.

Teknologi internet merupakan teknologi yang memberikan informasi tanpa batas dan dapat diakses oleh siapa saja. Apa lagi bagi generasi muda internet sudah menjadi santapan mereka sehari-hari. Jika digunakan secara semestinya tentu kita memperoleh manfaat yang berguna. Tetapi jika tidak, kita akan mendapat kerugian. Dan sekarang ini, banyak pelajar dan mahasiswa yang menggunakan tidak semestinya. Bukan hanya internet saja, ada lagi pegangan wajib mereka yaitu handphone. Rasa sosial terhadap masyarakat menjadi tidak ada karena mereka lebih memilih sibuk dengan menggunakan handphone.

Jika pengaruh-pengaruh di atas dibiarkan, mau apa jadinya generasi muda tersebut? Moral generasi bangsa menjadi rusak, timbul tindakan anarkis antara golongan muda. Hubungannya dengan nilai nasionalisme akan berkurang karena tidak ada rasa cinta terhadap budaya bangsa sendiri dan rasa peduli terhadap masyarakat. Padahal generasi muda adalah penerus masa depan bangsa.

Maka melihat berbagai permasalahan tersebut, jawabannya adalah perbaikan pendidikan. Pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan bangsa, baik sebagai pengembang dan peningkat produktivitas nasional maupun sebagai pembentuk karakter bangsa. Sejatinya definisi dari pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dan berbudi pekerti luhur.

Pentingnya menempatkan pendidikan sebagai dasar pembentukan dan pengembangan kualitas bangsa, adalah komitmen bersama dalam memajukan Indonesia yang maju. Kualitas pendidikan adalah satu dari beberapa tolak ukur kemajuan pendidikan yang harus terus ditingkatkan.

C. Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Berbasis Moral Dan Etika

Pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan bangsa, baik sebagai pengembang dan peningkat produktivitas nasional maupun sebagai pembentuk karakter bangsa. Sejatinnya definisi dari pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dan berbudi pekerti luhur.

Pendidikan merupakan wadah dalam menyempurnakan perkembangan zaman yang menjadi faktor pengaruh, bantuan psikis maupun idealistis serta perlindungan terhadap generasi-generasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pandangan sosiologis, pendidikan dapat menjadi sarana untuk pengembangan pola pikir dan perilaku anak pada tahap ketiga setelah lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya, yang lebih berbentuk formal. Dalam hal ini, lebih tertuju pada pendewasaan anak itu sendiri agar mampu membedakan baik atau buruknya tindakan yang dilakukannya.¹⁴³ Antara pendidikan di keluarga, sekolah, dan masyarakat

¹⁴³ Anonim, 2014, "Pengertian Pendidikan", academia.edu, diakses pada 29 Februari 2016 puku113.20

terdapat saling keterkaitan. Disatu sisi karena pendidikan telah melekat pada kehidupan manusia sejak hadir dimuka bumf. Awal pendidikan dimulai dari keluarga. Dalam keluarga peran orang tua sangat penting. Orang Tua (Ayah dan ibu) harus saling membangun kerja sama yang baik untuk mendidik anaknya.

Orang tua bertanggung jawab penuh atas si anak dengan peran ibu lebih banyak. Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan. Baik dan buruknya pendidikan ibu terhadap anak-anaknya berpengaruh besar terhadap perkembangan dan watak anaknya dikemudian hari. Namun peran seorang ayah juga tidak kalah penting, seorang ayah memiliki ketegasan yang lebih besar dibanding seorang ibu, karena itu peran ayah sangat besar dalam menghasilkan anak-anak yang disiplin. Pada usia dini orang tua sebaiknya memberikan pengajaran dan perhatian yang ekstra untuk menciptakan ikatan emosional antara anak dan orang tua. Jadi untuk membawa anak kepada kedewasaan, orang tua harus memberi contoh yang baik karena anak suka mengimitasi kepada orang tuanya. Pendidikan yang diberikan dari keluarga adalah bekal untuk menuju ke pendidikan formal yaitu sekolah, sekolah menurut KBBI adalah bangunan atau lembaga untuk belajar mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran.¹⁴⁴ Bisa dibaca dalam pengertian tersebut banyak terdapat interaksi anak yang terjadi di sekolah, baik itu antara guru (pendidik) dengan murid (anak didik) maupun interaksi antara murid dengan murid. Para guru sebagai pendidik, dengan wibawanya dalam pergaulan membawa murid sebagai anak didik ke arah kedewasaan.

¹⁴⁴ <http://kbbi.web.id/sekolah> diakses pada tanggal 1 Maret 2016 pukul 20.45

Memanfaatkan/menggunakan pergaulan sehari-hari dalam pendidikan adalah cara yang paling baik dan efektif dalam pembentukan pribadi dan dengan cara ini pula maka hilanglah jurang pemisah antara guru dengan murid.¹⁴⁵ Proses menerima dan memberi pelajaran harus berjalan efektif dan efisien agar murid mampu mencerna bahan pelajaran dan tujuan pendidikan tercapai. Pendidik juga membimbing dan membantu minat para anak didiknya agar dapat mencapai pengembangan yang optimal. Interaksi antara murid dengan murid lain juga memengaruhi pendewasaan anak. Dikarenakan masa-masa sekolah anak mudah terpengaruh oleh teman sebayanya yang berada dalam lingkup sekolah.

Pentingnya menempatkan pendidikan sebagai dasar pembentukan dan pengembangan kualitas bangsa, adalah komitmen bersama dalam memajukan Indonesia yang maju. Kualitas pendidikan adalah satu dari beberapa tolak ukur kemajuan pendidikan yang harus terus ditingkatkan. Melirik fakta dan kondisi pendidikan Indonesia hari ini, ironi, ketika *Education For All (EFA) Global Monitoring Report*, 2011 menempatkan kualitas pendidikan kita di posisi ke-69 dari 127 Negara di dunia.

Fakta tersebut menimbulkan salah satu indikasi bahwa pelajar sebagai generasi penerus yang diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik pada dunia pendidikan, nyatanya pun jauh dari harapan. Perilaku menabrak etika, moral dan hukum dari yang ringan sampai yang berat masih kerap diperlihatkan pelajar,

¹⁴⁵ Prof.Dr.H.Abdullah Idi, M.Ed., *Sosiologi Pendidikan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.91.

mulai dari terlibat tawuran, *free sex*, penggunaan obat-obatan terlarang, kolusi, nepotisme, manipulasi sampai pada tindakan kriminal lainnya. Nilai-nilai moral dan luhur dari Pancasila sudah tidak lagi dijadikan pedoman. Sistem dan pedoman pendidikan hanya dilakukan sebatas formalitas. Banyaknya persoalan yang muncul diidentifikasi bersumber dari gagalnya pendidikan dalam menyuatkan nilai-nilai moral terhadap peserta didiknya.

Dewasa ini, bangsa kita tengah dihadapkan pada permasalahan degradasi moral dan krisis jati diri yang tentu saja membutuhkan penanganan darurat. Generasi muda seperti kehilangan ruh dari nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama dan falsafah Negara kita. Adapun nilai-nilai itu antara lain, semangat nasionalisme, gotong royong, sopan santun, berbudi pekerti, disiplin, saling menghormati, menghargai, jujur, patriotik, pekerja keras, dan lain sebagainya. Realita ini tentu saja membuat sistem pendidikan kita patut berbenah diri.

Kurikulum salah satu instrumen pemerintah untuk memajukan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, dimulai dari Kurikulum 1968 hingga kini kurikulum 2013. Kurikulum yang berisi rancangan belajar kepada siswa dalam satu periode jenjang pendidikan. Yang diharapkan pada siswa agar mencapai tujuan rancangan belajar tersebut sesuai dengan ketentuan periode kurikulum itu sendiri. Namun, peran guru dalam kurikulum sangat dibutuhkan agar menopang siswa hingga mencapai tujuan yang dimaksud. Guru yang dibutuhkan ialah guru yang memiliki kesiapan untuk membimbing siswa-siswi dalam memahami buku-buku sesuai kurikulum yang berlaku. Tidak hanya itu, untuk berkontribusi dalam pencapaian

tujuan kurikulum tersebut guru selayaknya lebih memperhatikan moral dan mental peserta didik, dikarenakan Indonesia sedang mengalami kemerosotan moral.

Revitalisasi kurikulum pendidikan menjadi urgen ketika melihat wajah pendidikan Indonesia saat ini. Revitalisasi sendiri mengandung arti penguatan kembali. Penguatan kembali yang dimaksudkan adalah penguatan kurikulum pendidikan yang berbasis moral dan etika. Hal ini sangat diperlukan mengingat kondisi pendidikan yang telah dipaparkan penulis sebelumnya. Dengan adanya revitalisasi pendidikan yang berbasis moral dan etika akan menciptakan pelajar-pelajar yang tentu saja merupakan pemegang tongkat estafet kepemimpinan Indonesia dimasa mendatang tidak hanya cerdas secara intelektual namun memiliki akhlak dan etika yang baik. Revitalisasi kurikulum pendidikan berbasis moral dan etika diharapkan mampu mencetak generasi yang memiliki nilai-nilai moral seperti kesopanan, loyalitas, budi pekerti yang baik, terkhusus nilai kejujuran.

Kejujuran merupakan sikap yang sangat penting dimiliki para pelajar sebagai generasi penerus. Mari melihat sejenak, betapa krisis kejujuran telah meracuni setiap sendi-sendi pemerintahan negeri ini. Selama tahun pertama 2015, ICW memantau 308 kasus dengan 590 orang tersangka. Total potensi kerugian negara dari kasus-kasus ini mencapai 1,2 triliun rupiah dan potensi suap sebesar 457,3 miliar rupiah. Kasus-kasus tersebut paling banyak ditangani oleh Kejaksaan sebanyak 211 kasus (potensi kerugian negara 815 miliar rupiah dan potensi suap 550 juta rupiah). Disusul Kepolisian yang menangani 86 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 310 miliar serta nilai suap sebesar Rp 72 juta). Terakhir, KPK menangani 11

kasus (potensi kerugian negara 106 miliar rupiah dan potensi suap 395 miliar rupiah).¹⁴⁶ Korupsi telah menjadi momok tersendiri yang tak kunjung ditemukan solusinya. Revitalisasi kurikulum berbasis moral dan etika adalah langkah tepat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan diatas.

Revitalisasi kurikulum pendidikan berbasis moral dan etika dapat berupa penguatan nilai-nilai moral dan etika. Misalnya, dalam proses belajar mengajar, guru tidak hanya menuntut pengajaran secara formalitas melainkan harus memberikan sentuhan nilai-nilai etika dan moral kepada siswanya. Hal-hal yang sederhana dapat dilakukan sebagai implementasi revitalisasi kurikulum pendidikan berbasis moral dan etika. Memberi nasihat kepada siswa bagaimana pentingnya kejujuran dan nilai-nilai moral lainnya. Tidak hanya itu, langkah lain yang dapat diambil adalah menyuguhkan siswa dengan video yang memiliki nilai edukasi moral dan etika. Selain lebih kreatif, langkah ini tentu saja akan menarik minat siswa dan memudahkan siswa dalam mengimplementasikan apa yang ia lihat.

Dalam melakukan revitalisasi kurikulum pendidikan berbasis moral dan etika tentu saja dibutuhkan inovasi-inovasi pembelajaran baik dari segi materi belajar, media belajar maupun sarana dan prasaran belajar. Sehingga, tujuan revitalisasi kurikulum pendidikan yakni melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi memiliki integritas dan budi pekerti yang baik dapat terwujud.

¹⁴⁶ Anonim. 2015. *Tren Pemberantasan Korupsi Semester I 2015*. Bulletin Mingguan Anti-Korupsi Edisi 14-18 September 2015. (online) [http:// www.antikorupsi.org/ id/ content/bulletin-mingguan-anti-korupsi-14-18-september-2015](http://www.antikorupsi.org/id/content/bulletin-mingguan-anti-korupsi-14-18-september-2015) , diakses pada tanggal 13 Maret 2016 pada pukul 14.41

BAB VI

KORUPSI SEBAGAI MUSUH BERSAMA

"Mari kita bangunkan diri yang telah ditidurkan selama ini. Kita terlalu lelap dengan alunan nada syair dusta dan pembodohan. Bangkitdaritimbangan para pendusta. Memperjuangkan hak-hak yang kian tak terpenuhi, dirampas bahkan dikhianati. Sebuah perjuangan memang butuh pengorbanan. Pengorbanan untuk melawan para penyanyi jabatan."

(Alvira Aslam)

Tidak akan mungkin ada keadilan yang sama jika dalam proses pengadilan, sosok-sosok yang terlibat di dalamnya masih bergantung pada sejumlah uang. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁴⁷ Mengenai budaya hukum sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan yang ditetapkan dan sebaik apapun substansi hukum namun tanpa dukungan oleh orang-orang yang tidak berbudaya hukum, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif.

Budaya hukum merupakan sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang

¹⁴⁷ Dede Andreas, 2015, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, dedeandreas.blogspot.cold/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html?m=1, diakses pada tanggal 14 Maret 2015.

terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.¹⁴⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya yang menjadikan masyarakat itu adil adalah kultur dari masyarakat itu sendiri, apakah masyarakat mau menerima dan bersikap adil atau menolak keadilan itu sendiri.

Berbicara mengenai pendidikan bukan hanya bertujuan untuk menciptakan manusia yang cerdas tapi pendidikan juga bertujuan di samping untuk mencerdaskan tetapi melahirkan pula Sumber Daya Manusia yang berakhlak, beretika dan bermoral. Sebelum membahas mengenai "Korupsi Sebagai Akibat Kurangnya Pendidikan Moral dan Etika". Perlu kita ketahui dulu apa itu moral dan apa itu etika.

Moral sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *mores* kata jamak dari *mos* yang berarti adat kebiasaan. Dan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan susila. Moral adalah hal-hal yang sesuai dengan ide-ide umum yang diterima tentang tindakan manusia, yang membedakan baik dan buruknya suatu hal. Sedangkan etika itu berasal dari bahasa Yunani dari kata *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat. Dalam filsafat etika disebut sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui akal pikiran.

Antara moral dan etika adalah terletak pada sumber yang dijadikan patokan menentukan hal-hal yang baik dan buruk. Pada etika penilaian hal baik dan buruk

¹⁴⁸ M.Marwan & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Surabaya:Reality Publisher, hlm:113.

terletak pada akal pikiran, sedangkan pada moral terletak pada hal-hal yang dianggap baik dan buruk yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat.

Kembali lagi pada topik akibat dari kurangnya pendidikan moral dan etika yang mengakibatkan perilaku korupsi. Pendidikan di Indonesia selama ini mengesampingkan pendidikan moral dan etika. Seharusnya pendidikan kita mampu menciptakan sumber daya manusia yang bermoral, mandiri, berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan moral merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan bangsa kita ini, terlebih lagi kalau kita melihat dari sudut pandang banyaknya perilaku korupsi yang terjadi. Korupsi tidak semata-mata dilakukan bukan dari kalangan orang-orang yang tidak mampu tetapi orang-orang yang memiliki jabatan dan wewenang yang rakus akan materi. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin, inilah yang terjadi pada bangsa kita sekarang ini. Pertanyaannya kemudian apa yang salah dari kita bangsa Indonesia tercinta ini?

Pertama-tama kita terlalu terfokus untuk mencerdaskan bangsa dan mengesampingkan moral dan etika. Indonesia begitu fokusnya memperhatikan semuanya dengan "nilai " yang menjadi patokan kecerdasan. Tanpa memperhatikan proses bagaimana memperoleh "nilai" tersebut. Paradigma yang tercipta pada pendidikan kita saat ini dengan mencapai "nilai" yang bagus akan mempermudah segalanya. Mempermudah mendapatkan pekerjaan sebagai contohnya. Sehingga orang-orang berlomba-lomba memperoleh hal tersebut bahkan dengan cara-cara yang tidak jujur untuk mendapatkan "nilai" yang bagus tersebut. Padahal yang yang

terpenting adalah cara atau proses iya mendapatkannya. Bahkan "nilai" tidak menjamin kecerdasan seseorang dan bagaimana seseorang tersebut mampu mandiri menghadapi dunia yang sebenarnya. Anak bangsa mengalami ketakutan, bahwa jika mereka tidak mendapatkan "nilai" yang menjadi patokan tersebut mereka sama sekali tidak dihargai, sama sekali tidak berarti padahal ini bukan lah yang utama. Kalau mereka mendapatkan hal tersebut dengan cara-cara curang yah sama saja hasilnya dengan nol besar. Hal-hal ini lah perilaku ketidak jujuran yang membuat timbulnya awal dari perilaku korupsi yang membuat bobroknya etika moral dan bangsa ini.

Sistem yang perlu diubah sekarang ini yaitu menghilangkan paradigma negatif bahwa "hasil" "nilai" merupakan hal yang utama. Karena hal tersebutlah yang membuat ketidakpedulian dalam melakukan kejujuran. Hal yang perlu diubah selanjutnya yaitu memberikan pendidikan berkarakter pada ruang lingkup keluarga yang merupakan lingkup paling kecil, memberikan pendidikan agama sejak dini agar ada batasan batasan dari tingkah laku yang dapat dikontrol. Kemudian pemerintah tidak menjadikan nilai sebagai patokan yang utama, tetap nilai menjadi patokan akan tetapi "nilai" bukan menjadi hal utama tapi kejujuran dalam memperoleh nilai tersebut, memberikan kesempatan dan pada lembaga-lembaga pendidikan jika belum ada yang dapat memperoleh target dapat diberikan konseling dan pembelajaran yang lebih intens agar kesemuanya dapat tercapai dan dapat mewujudkan cita-cita dari konstitusi kita mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tidak ada kalah ataupun menang dalam memperoleh keadilan melainkan cara memperoleh keadilanlah yang berbeda-beda. Korupsi merupakan salah satu contoh

pelanggaran dalam memperoleh keadilan. Beberapa pengertian korupsi menurut para pakar sekaligus ahli hukum telah dijelaskan pada bab awal dari buku ini. Namun hanya dengan mengetahui dan mengenal korupsi tidak cukup tanpa adanya perlawanan untuk memberantasnya. Memberantas korupsi pun tidak cukup jika hanya satu, dua atau tiga orang yang bertindak. Negara ini memerlukan pergerakan sebagai bentuk perlawanan dari masyarakat. Bentuk perlawanan dari berbagai golongan akademisi, praktisi, pemuda-pemudi hingga golongan masyarakat yang lainnya. Bentuk perlawanan bisa dilakukan melalui tulisan, orasi dan sebagainya. Namun yang terpenting dalam melakukan perlawanan ialah penyatuan niat, pandangan serta tekad bersama.

*...Kita harus kembali ke sikap yang bukan memikirkan hasil. Kita harus berbuat. Karena, tanpa berbuat, dunia akan hancur. Perbuatan itu sendiri bermakna.*¹⁴⁹ (Goenawan Mohamad)

Berbuat dapat diartikan sebagai tindakan nyata. Tindakan yang dilakukan atas dasar kesatuan dan kesamaan nasib untuk menentang penindasan. Untuk menentang penindasan dibu tuhan dukungan dan kesatuan dari berbagai golongan masyarakat. Berikut ini penulis lampirkan beberapa pandangan para akademisi, mahasiswa, praktisi, serta penggiat tindak pidana korupsi :

¹⁴⁹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kaftan Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Group, hlm:225.

A. Korupsi Sebagai Musuh Bersama

Risbar Berlian Bachri (DPRD Provinsi Sulawesi Barat)

Korupsi adalah sebuah penyakit moral, sebuah penyimpangan psikologis yang bisa saja terjadi pada setiap orang meskipun tak ada niat tapi ada kesempatan. Korupsi juga suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan suatu bangsa dan negara, dan bukan hanya merugikan bangsa dan negara juga sangat merugikan komunitas-komunitas atau kelompokkelompok organisasi kecil dalam kehidupan sehari-hari kita. Korupsi seperti parasit yang terus menggeorogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat. Parasit adalah hewan renik yang dapat menurunkan produktivitas makhluk hidup yang ditumpangnya. Parasit menggunakan jaringan organisme untuk kebutuhan nutrisi mereka sampai orang yang di tumpangnya meninggal karena kehilangan jaringan atau nutrisi yang di butuhkan. Seperti itulah kejahatan korupsi dapat mengakibatkan masyarakat meninggal dunia disebabkan faktor kemiskinan akibat sektor pertumbuhan ekonomi melemah dan rusak, kesenjangan ekonomi terjadi ketika masyarakat miskin harus membayar proporsi yang lebih besar dari penghasilan mereka untuk menyuap. Pelaku kejahatan korupsi menghisap uang rakyat untuk kebutuhan nutrisi pribadi dan kelompoknya. Negara terkorup terkadang sulit *move on* dari kemiskinan dan kebodohan, juga cenderung jalan ditempat, sewaktu negara lain sudah maju dan berkembang, negara terkorup masih saja jalan di tempat. Korupsi juga menjadi pelajaran moral buruk bagi generasi-generasi anak bangsa berikutnya.

Korupsi juga adalah suatu kejahatan sistematis dalam artian sistematis yaitu dilakukan secara bersama-sama terkadang dalam praktiknya sangat erat dilakukan oleh yang berkuasa yang punya posisi penting atau posisi strategis didalam lembaga-lembaga negara ataupun organisasi. Tidak heran kitapun selalu dipertontonkan melalui media televisi, media sosial dan cetak, korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Itu dibuktikan ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu mentersangkakan pelaku kejahatan korupsi dengan menyeret nama-nama lain dalam kasus yang sama, bahkan dalam kasus yang sama kadang menyeret tiga sampai lima nama. Jika pelaku korupsi tersebut dari penguasa atau punya peranan penting dalam suatu lembaga yang seolah-olah tidak memandang rupiah, tak heran selalu saja pundi-pundi rupiah yang dikorupsi sangat cukup besar, tapi bukan berarti jika tidak memegang posisi strategis dalam lembaga tidak melakukan korupsi, tetap saja melakukan, tapi dalam jumlah yang lebih kecil disebabkan tak punya otoritas penuh dalam pengambilan keputusan akhir. Besar ataupun kecil tetap saja dikatakan korupsi.

Perkembangan dalam dunia kriminologi adalah saat memperlihatkan bahwa kejahatan korupsi bukan hanya dilakukan oleh mereka yang berstatus ekonomi rendah, berkulit hitam atau berkaitan dengan faktor fisik lainnya, atau tidak memiliki jabatan dengan kata lain kejahatan korupsi hanya terjadi jika pelaku adalah mereka yang berada dikelas bawah dalam hierarki sosial.Kejahatan korupsi saat ini marak dilakukan oleh seseorang yang memiliki status dan kehormatan yang tinggi dan berhubungan dengan pekerjaannya, korporasi atau badan hukum lainnya (*white collar*

crime). Suntherland memberikan definisi atas *white collar crime* sebagai orang dari kelas sosial ekonomi tinggi yang melakukan pelanggaran- pelanggaran terhadap hukum yang di buat untuk mengatur pekerjaaannya.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Lahirnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa angin segar untuk proses pemberantasan pelaku korupsi di Indonesia. Itu dibuktikan banyaknya pelaku korupsi yang tertangkap setiap tahunnya. Organisasi anti korupsi, *Corruption Perseptions Index* (CPI). Organisasi anti korupsi ini setiap tahun mengeluarkan laporan korupsi global. Dari 28 negara dikawasan Asia Pasifik, sebagian besarnya mendapat peringkat yang buruk. 18 negara mendapat skor dibawah 40 dari seluruhnya 100 skor. Angka 0 berarti terkorup dan 100 berarti paling bersih. Indonesia mendapat skor 34, naik dari tahun lalu jadi 32. Indonesia kini menduduki peringkat 107, bersama-sama dengan Argentina. Dari seluruhnya 174 negara yang diperiksa.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terganggu dan upaya pemberantasan korupsi selalu ingin dilemahkan, contoh misalnya kasus Cecak vs Buaya jilid 1 dan jilid 2, revisi undang-undang KPK yang terus dipaksakan untuk memangkas kewenangan KPK, disebabkan penguasa dan pejabat tinggi terus menggunakan kekuasaanya untuk memperkaya diri dan kelompoknya dengan cara mencuri dana publik yaitu dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan menyogok untuk mendapatkan proses tender dan sumber dana lainnnya.

Pemikir muslim ternama yang hidup diabad ke 14, Ibnu Khaldun, menilai penting adanya rasa kebersamaan, serta senasib dan sepenanggungan atau disebutnya sebagai *ashabiyah* sebagai penjamin kelangsungan sebuah negara. Hilangnya *ashabiyah* itu akan melahirkan antara lain perilaku korupsi.

Khaldun mengamati jatuh bangunnya kesultanan dan men alis kesimpulannya dalam buku *The Muqaddimah* (muqaddimah), Ibnu Khaldun menulis pada awal berdirinya kesultanan ada perasaan *ashabiyah* yang kuat karena pemimpin dan masyarakat sama-sama berjuang mendirikan negara. Lalu seiring bergantinya generasi dan datangnya kemakmuran, *ashabiyah* hilang dan diganti mengejar kemewahan dan kenikmatan hidup.

Kemewahan hidup tidaklah mudah dicapai karena membutuhkan biaya besar. Maka kata Khaldun, muncullah korupsi karena orang berusaha mengejar kemewahan dengan cara-cara yang tidak benar. Jika pejabat di pemerintahan juga mengejar kemewahan itu, maka mereka tak lagi memperhatikan kebutuhan sehari-hari masyarakatnya, maka muncullah kemiskinan dan kesulitan ekonomi di masyarakat.

Tanda tanda sebuah pemerintahan yang korupsi adalah yang proyek pembangunannya tidak ada kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kalau sudah sampai tahap ini, orang harus mulai cemas dengan masa depan negaranya.

Jika *ashabiyah* atau perasaan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakatnya untuk mengejar tujuan bersama, maka negara bisa terhidar dari korupsi dan bisa sejahtera untuk waktu yang panjang. Jika tidak, maka negara akan

hancur oleh perilaku korupsi."Jika korupsi sudah merusak karakter dan keagamaan seseorang, rasa kemanusiaannya sudah hilang, maka dia tidak ada bedanya dengan binatang" kata Khaldun.

B. Korupsi Sebagai Musuh Bersama

Muhadar (Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Unhas) Mengenai korupsi ini dilihat dari berbagai aspek . karena korupsi yang marak sekarang terjadi ini bukan dari kalangan yang ekonominya rendah. Kalau kita lihat pelaku-pelaku korupsi ini pejabat-pejabat yang berkecukupan. Jadi faktor ekonomi bukanlah lagi menjadi faktor. Sekarang pelaku korupsi itu ibarat dapat di indikasikan mengalami psikologi yang patut dipertanyakan, faktor selanjutnya yaitu keinginan memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat, selanjutnya faktor kebudayaan yang tidak bisa lepas dari masyarakat contohnya upeti-upeti yang sejak zaman kerajaan hingga sekarang sering dilakukan. Dan menjadi kebiasaan dan dianggap lumrah, padahal upeti-upeti seperti itu juga merupakan bentuk korupsi tanpa kita sadari. Jadi bukan hanya koruptor-koruptor itu yang berperan tapi masyarakat juga memiliki peran.

Oleh sebab itu untuk memberantas korupsi dengan bekerjasama dari semua elemen masyarakat, mempertegas penyeleksian abdi negara, bahkan kalau bisa abdi negara itu turun ke jalan melihat kondisi masyarakat. Masyarakat harus lebih selektif memilih pemimpin jangan karena adanya money politic sebelumnya sehingga pemimpin yang berduit yang dipilih. Tetapi harus jelas latar belakangnya, sepaik terjangnya, integritas terhadap bangsa dan negara.

C. Mencabut Akar Korupsi

Aswar Hasan (Dosen Komunikasi Fisip Unhas dan Ketua KPID Sul-Sel)

"Ketika VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) didirikan pada 1602, praktik korupsi sudah terjadi. VOC adalah perserikatan dagang Belanda yang beroperasi di Hindia Belanda (Nusantara-Indonesia) yang banyak mempekerjakan orang Indonesia (khususnya kaum bangsawan dan bekerja sama dengan para raja-raja, khususnya di tanah Jawa). VOC meraup keuntungan yang melimpah. Namun akhirnya bangkrut dan bubar pada 1799 karena banyak pegawainya melakukan korupsi".

Thomas Stamford Raffles (1781-1826) dalam tulisannya: *The History of Java*, melaporkan bahwa hancurnya kekuasaan Belanda (VOC) karena korupsi. Hal itu kemudian berimplikasi terwarisinya praktik korupsi di Nusantara secara lebih luas. Dalam pada itu, Clive Day dalam tulisannya: *The Dutch in Java* mengatakan, bahwa VOC telah memberi contoh buruk (korupsi) karena para pegawai kompeni (VOC Belanda) digaji rendah, sehingga terjadi praktik suap (sogok) dari kaum priyai Jawa dan para pedagang Tiongkok karena ingin eksis sebagai bangsawan dan untung sebagai pedagang.

Praktik korupsi yang dilakukan oleh para pegawai kompeni, seolah dimaklumi. Sementara itu, hukum tak melarang atau mencegahnya sebagai perbuatan terlarang, sehingga membudaya. Korupsi pun merajalela, hingga VOC runtuh. Namun setelah VOC bubar, kebiasaan korupsi bukannya ikut hilang, malahan semakin menjadi-jadi, sebagaimana dilaporkan oleh Raffles.

Kalau ditelusuri lebih mendalam maka ada tiga kategori korupsi yang selama ini terjadi di Indonesia. *Pertama*, korupsi terjadi karena desakan kebutuhan (*corruption caused by the need*). Korupsi jenis ini banyak terjadi di kalangan aparat rendah yang bergaji rendah. Mereka terpaksa korupsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Kedua*, korupsi karena sistem yang lemah dan bercelah (*corruption caused by the system*). Kebocoran anggaran negara melalui korupsi karena memang dimungkinkan oleh aturan dan sistem. *Ketiga*, korupsi karena keserakahan (*corruption caused by the greed*). Jenis korupsi inilah yang sangat berbahaya, karena dilakukan secara tidak tanggung-tanggung, terencana, sistematis, dan terstruktur.

Jika dipersingkat, maka penyebabnya kita temukan dalam tiga kategori, yaitu pertama, kategori politik. Kedua, kategori hukum. Ketiga, kategori budaya. Dalam pada itu, untuk keluar dari belitan dan jeratan praktik korupsi yang sudah menggurita itu, maka urgent untuk melahirkan generasi anti korupsi melalui pendidikan yang mencita-citakan negara yang bersih dan bermartabat, berdasarkan nilai-nilai agama, nasionalisme, dan moral budaya yang suci.

Generasi baru ini, harus memiliki karakter yang kuat untuk mencabut akar korupsi yang sudah menggurita itu. Untuk itu mereka harus mempunyai ciri-ciri berupa: *Pertama*, mengedepankan kejujuran berbasis keyakinan pada agama. *Kedua*, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara (nasionalisme sejati) sehingga tidak akan menorbakan negara demi kepentingan pribadi dan golongan. *Ketiga*, menganut prinsip transparansi dan akuntabel dalam bekerja, serta menjunjung tinggi partisipasi masyarakat. *Keempat*, menjunjung profesionalisme, objektivitas dan

independensi. Bekerja keras secara tulus dan istiqamah, demi kejayaan bangsa dan negara. (Dikutip dari koran *Fajar* edisi 9, maret, 2016)

D. Korupsi dan Penghianatan Konstitusi

Faisal (Pegiat Hukum Progresif, Dosen Universitas Bangka Belitung). Dalam banyak tulisan di harian surat kabar kejahatan korupsi merupakan topik yang hampir tidak terlewatkan mendapat komentar bahkan kritik. Tak jarang pula korupsi menjadi komoditas yang strategic dalam meruncingkan rivalitas berpolitik. Barangkali kita terpaksa harus bersepakat, walaupun korupsi menjadi sesuatu yang bernuansa politik "*politisasi*" tapi tetap saja tidak dapat mengubah watak tamak sebagai ancaman terhadap kehidupan sosial dewasa ini.

Korupsi tidak lagi dipahami sebagai kejahatan konvensional biasa, bahkan ia ingin disebut sebagai kejahatan luar biasa dan memiliki watak jahat menuju *hiperkriminalitas*. Sebagaimana pernah dijelaskan oleh Baudrillard dalam bukunya *The Perfect Crime* (1992), kejahatan menjadi hiper ketika ia melampaui realitas (hukum, moralitas, akal sehat dan budaya), dan terdapat watak jahat yang berkembang sedemikian rupa menuju tingkatan yang sempurna.

Bilamana kita bercermin pada landasan filosofis konstitusi, bahwa bangsa ini ingin sampai pada tujuan kemerdekaan yang mana sejahtera, cerdas, damai, berkeadilan sosial dalam kehidupan. Hal itu merupakan harga mati dalam menjaga martabat bangsa serta menjaga keutuhan nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa. Jika demikian tak ada kata toleransi terhadap kejahatan korupsi, sebab ia secara

perlahan-lahan akan mengkerdikan semangat berbangsa dan bernegara. Bahkan tidak hanya itu, perilaku korupsi sebenarnya secara tidak sadar membelenggu konstitusi yang ingin membahagiakan rakyatnya untuk merdeka, sejahtera, cerdas, damai dan berkeadilan sosial. Lantas tidak berlebihan bila koruptor disebut sebagai penghianat konstitusi, sebab mereka telah berupaya sepakat untuk tidak bersepakat menjalankan kekuasaannya secara tidak konstitusional.

Tak dapat dipungkiri, bahwa pangkal **kejahatan** korupsi bersumber dari kekuasaan yang inkonstitusional. Sebab kekuasaan dijalankan tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Artinya, lingkaran setan kejahatan korupsi penuh kedekilan kekuasaan yang tamak bahkan tak tau malu.

Kekuasaan yang korupsi berusaha memodifikasi dirinya untuk lebih sempurna melalui akumulasi modal "uang" yang diperoleh ketika berada di arena kekuasaannya. Dengan begitu segala hal dapat ditukar dan diatur dengan berbagai atribut-atribut kekuasaan yang kosong nurani dan hanya menghisap uang rakyat untuk mengukuhkan kekuasaannya.

Koruptor menjalankan perannya di lingkungan mereka yang sarat manipulatif. Mereka berusaha mengontrol diri seperti penampilan, keadaan fisik, dan perilaku aktual dan gerak agar perilaku menyimpang yang mereka jalani tidak dapat diketahui oleh lingkungan mereka. Karena mereka mengerti kedudukan yang melekat pada dirinya semata-mata demi melayani kepentingan publik. Tapi kemudian koruptor dimana pun sama saja, selalu memanipulasi kepentingan publik menjadi domain kepentingan pribadi.

Dengan begitu sang koruptor tak jarang dapat berperan Banda, bisa berwatak baik dan buruk. Berperilaku "baik" merupakan prasyarat mutlak untuk mendapatkan jabatan publik yang dikehendakinya. Baik itu melalui legitimasi politik, pendidikan, sosial, ekonomi yang dikemas sedemikian rupa, agar tampil sebagai sosok yang berhati peduli atau memiliki integritas pengabdian jujur, bersih dan berani. Jangan terkecoh, itu hanya tipu muslihat tuntutan peran agar dapat melanggengkan tujuan awal menduduki posisi jabatan publik.

Bangun Gerakan Anti Korupsi

Untuk meninggalkan kemiskinan, kebodohan, ketidaksejahteraan dan ketidakadilan, maka hal yang mesti dilakukan saat ini ialah hanya satu, mari bersama katakan koruptor sebagai penghianat konstitusi dan bersatu untuk melawan korupsi merupakan gerakan yang tak dapat ditawar lagi. Walaupun hal ini cukup sulit, bahkan terkesan lucu ditengah gurita korupsi telah mewabah kemana-mana.

Bukan berarti tak percaya dengan gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh aparat hukum saat ini, tapi menegakkan kehidupan anti korupsi tidak bisa dilakukan dengan kesadaran palsu. Dimana kesadaran tidak saja berada di pundak mereka. Akan tetapi kesadaran itu hadir dalam arena yang saling terpahami, melalui dimensi komunikasi partisipatoris. Maksud memahami disini bukan direayasa untuk saling paham atas kekuasaan yang korupsi, sehingga rakyat sebagai kelas yang didominasi menjadi toleran terhadap perilaku koruptor.

Barangkali upaya anti korupsi tidak bisa diperbincangkan pada arena hukum saja, atau menjadi topik jualan para aktor politik. Sebuah tindakan anti korupsi harus bermukim dalam kesadaran sosiologis masyarakatnya.

Sebelum kesadaran anti korupsi menjadi sangat palsu, ada baiknya kita mengubah pandangan mengenai kesadaran anti korupsi itu. Bahwa, kesadaran anti korupsi harus berasal dari nalar pikir rakyatnya, yang berhubungan dengan hidup dan budi pekerti baik, seperti kejujuran, bisa dipercaya, tanggungjawab, dan pengendalian diri.

Mungkin sulit jika kita berharap ada kesadaran seperti itu dibalik kekuasaan yang ada saat ini. Sementara kekuasaan telah terinfeksi dengan perilaku korupsi akut. Maka rakyat harus selalu curiga agar tidak dipalsukan kesadarannya. Sebab korupsi tidak saja dipahami dalam bentuknya sebagai kejahatan luar biasa, lebih daripada itu bahwa korupsi adalah penghianatan terhadap konstitusi.

Subjek Radikal vs Penghianat Konstitusi

Koruptor adalah penghianat konstitusi. Sosok penghianat pastilah licik, segala upaya akan dilakukan. Sulit untuk menghindari tudingan jika upaya pelemahan KPK yang sudah dilakukan berulang kali adalah serangan balik dari kelicikan para koruptor. Mulai dari kriminalisasi, penarikan penyidik KPK, dan revisi Undang-Undang KPK yang sedang diributkan saat ini.

Menghadapi watak jahat penghianat konstitusi hanya dapat dilakukan dengan perlawanan KPK yang progresif dan gerakan aliansi masyarakat sipil anti korupsi.

Tentu itu semua, harus didorong oleh subjek radikal. Subjek radikal disini adalah penegak hukum di KPK dan aktivis, akademisi, tokoh agama, budayawan, mahasiswa, dan eksponen bangsa yang peduli atas penyelamatan agenda anti korupsi.

Subjek radikal yang direkonstruksi oleh Slavoj Zizek akan menjadi penting ketika kita sadar bahwa subjek akan selalu berada pada situasi yang dialektis. Konsekuensi ini mesti mendapat perhatian, mengingat Zizek melihat gejala tidak saja menjanjikan kenikmatan dalam fantasi subjek (radikal dan subjektivitas), tapi sekaligus juga penderitaan pada waktu yang sama. Bahkan subjek akan selalu terbelah di antara yang simbolik, real dan imaginasi. Dalam lebih padat, Zizek menyebutnya subjek histeris dimana dirinya terbelah dalam dialektika hasrat dan keinginan.

Ranah dialektis akan mendorong subjek radikal berada pada super-egonya, ia absolut pada tujuan dan keyakinan fundamental. Keyakinan untuk melawan pengkhianat konstitusi demi tercapainya agenda pemberantasan korupsi. Tekanan dan arus perlawanan terhadapnya justru semakin menjadi kenikmatan yang sempurna, ketika ia dituntun oleh nurani yang baik.

Subjek radikal mengabdikan pada fundamental hukum yaitu, "hidup baik adalah dasar hukum yang baik". Optimisme merajut peradaban hukum yang berkeadilan, bila didasarkan dengan asas besar dalam ber hukum "hukum untuk manusia" demi sesuatu yang berarti yaitu kesediaan untuk hidup yang baik. Subjek radikal tak dapat dikatakan dialektis apalagi progresif bila ia tidak tertanam perilaku yang baik.

Subjek radikal tidak terjun bebas begitu saja, ia hadir dengan jati dirinya untuk memperbaiki keadaan sesulit apapun. Dalam saat yang bersamaan subjek radikal akan berhadapan dengan sistem, birokrasi, protokoler, prosedur, kekuasaan dan kemungkinan konvensional lainnya yang telah mapan menjadi serimonial yang berkelanjutan.

Sementara subjek radikal menjadi harapan dari ketidakpastian situasi yang membelenggu subjek dalam memeluk keadilan. Untuk menembus itu semua, tak cukup hanya melihat keadaan dan berpasrah diri, dengan berbekal pada fundamental hukum yang baik, jujur, berani dan setia pada filsafat berfikir hukum untuk manusia, maka subjek radikal akan "membongkar" itu semua melalui fantasi yang loyal terhadap nilai keadilan, kebenaran dan kejujuran.

Kami tidak percaya melepaskan diri dari jeratan korupsi dapat dilakukan oleh cara-cara yang konvensional. Maka anda semua, termasuk didalamnya KPK sudah harus merekonstruksi diri dan gerakan menuju subjek radikal agar terwujudnya agenda penyelamatan bangsa dan menempatkan konstitusi sebagai tujuan dalam melawan para penghianat konstitusi tersebut (koruptor).

E. Korupsi Sebagai Musuh Bersama

Fadhil Situmorang (Jaksa, Kejaksaan Negeri Mamasa).

Akhir-akhir ini ada fenomena yang sangat miris terjadi di negara tercinta kita Indonesia . fenomena itu tidak lain adalah korupsi. Korupsi ini bagaikan penyakit berbahaya yang tumbuh dan semakin berkembang di Indonesia mulai dari anggota

DPR, PNS, Bupati, Walikota, Gubernur dll. Entah apa yang menyebabkannya sehingga hal ini membuat masyarakat resah dan sangat membenci korupsi, masyarakat telah lelah dengan perilaku Abdi Negara ini yang korupsi yang merugikan bangsa. Mencuri uang rakyat padahal kesejahteraan ntuk rakyat itulah hal yang amat sangat penting dan merupaka cita-cita bangsa yang telah tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum" .

Akibat kebencian terhadap korupsi itu maka masyarakat sangat memushi yang namanya korupsi dan sangat mendukung lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang akhir-akhir ini bak pahlawan yang menyelamatkan yang sangat diharapkan masyarakat. Tapi tentu itu belum cukup adanya KPK bahkan mesih tetap saja ada yang namanya korupsi itu.

Mulai dari masyarakat, akademisi, praktisi, dan mahasiswa pro terhadap pemberantasan korupsi yang memang sangat meresahkan. Berikut beberapa pendapat dari kalangan, akademisi, masyarakat, praktisi dan mahasiwa mengenai **"Korupsi Sebagai Musuh Bersama"**

Pendapat Praktisi Hukum : "Korupsi sebagai musuh bersama karena mayoritas akibat dari tindak pidana ini mengebiri upaya pesejahteraan unuk masyarakat banyak. Tanpa kita sadari bahwa perekonomian semakin sulit karena korupsi. Uang pembangunan sarana dan prasarana di korup. Sehingga hasilnya masyarakat ak memperoleh maanfaat dari itu akses menjadi sulit. Biaya produksi menjadi mahal. Pemilik kewenangan berani mematok harga untuk menyalahgunakan

kewenangan".

F. Sturkturalisasi Pemberantasan Korupsi.

Muhammad Anshar (Aktivis Kampus)

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) merupakan salah satu menifestasi kesadaran masyarakat indonesia terhadap bahaya korupsi, karena pada dasarnya korupsi memiliki implikasi yang signifikan terhadap keberlangsungan Negara, secara historickal kita dapat melihat beberapa fakta keruntuhan sebuah Negara diakibatkan oleh tindakan korupsi, runtuhnya pemerintahan Tsar di Prancis salah satu penyebabnya adalah korupsi yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, begitupun dengan VOC, dan Sistem Tanam Paksa(STP) juga runtuh diakibatkan oleh meruyaknya korupsi yang dilakukan oleh segelintir orang, fakta tersebut menguatkan asumsi bahwa tindakan korupsi/ mengambil uang negara dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok merupakan petaka yang akan meruntuhkan segi-segi kebangsaan.

Penulis melihat, pemberantasan korupsi memerlukan instrument yang memiliki kapabilitas serta integritas yang tinggi, oleh karena itu penulis menilai bahwa terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) merupakan terobosan baru dalam reformasi penegakan hukum dan juga penulis menilai bahwa eksistensi dari lembaga tersebut merupakan wujud dari perkembangan kesadaran masyarakat indonesia dalam rangka melawan kejahatan korupsi. Beberapa terobosan yang diwujudkan oleh lembaga tersebut sejak berdirinya hingga beberapa dekade

merepresentasikan amanah dari masyarakat itu sendiri, hal tersebut dapat dilihat dari kinerjanya, beberapa petinggi Negara disandra dan dijebloskan dalam bui penderitaan. Namun akhir-akhir ini kita menyaksikan di berbagai media, fenomena-fenomena yang membuat hati kita terhenyak, bagaimana KPK diombang-ambingkan oleh kepentingan politik praktis, hal ini menjadi hipotesa awal bagi penulis bahwa pemberantasan korupsi telah mengalami disorientasi, serta telah keluar dari komitmen awal terhadap pemberantasan korupsi.

Pemberantasan korupsi sudah tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada pemberantasan yang bersifat struktural (lembaga Negara), artinya bahwa beberapa elemen harus segera diaktifkan. kita harus melihat beberapa contoh Negara yang telah mendapat apresiasi internasional dalam pemberantasan korupsi, seperti Tiofigkok, serta melakukan duplikasi terhadap system yang diterapkan dalam Negara mereka sehingga mereka berhasil menekan laju korupsi. Dalam konteks sekarang ini penulis lebih percaya penanganan korupsi lebih ditekankan pada upaya preventif daripada represif, artinya bahwa upaya represiv dilakukan oleh lembaga yang memiliki keweangan atributif, namun yang menjadi soal, beberapa lembaga tersebut masih sangat sarat dengan tindakan-tindakan yang membuka peluang terjadinya korupsi.

Oleh karena itu Penguatan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan hal yang esensial ketika, mengingat ungkapan dari Bung Karno, bahwa *"kita bernegara bukan untuk sewindu saja, tapi kita bernegara untuk selamanya"* ungkapan ini merupakan salah satu dasar bagi setiap generasi untuk melawan segala hal-hal yang mengancam eksistensi Negara, KPK sebagai lembaga

Supervisi dari beberapa lembaga penegak hukum dimana wewenang yang dimilikinya adalah wewenang atribusi, tentu sangat diperlukan dalam Negara yang tingkat korupsinya masih menempati posisi yang memilukan.

Kita perlu menyadari secara bersama bahwa, Indonesia masih dalam proses pendewasaan serta pematangan system, oleh karena itu maka, tidak bisa kita pungkiri bahwa praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan masih sering kita temukan praktik-praktik yang berbau orde baru, oleh karena itu perlu kiranya untuk beberapa elemen melakukan rekonstruksi dari beberapa aspek, yakni:

1. *Regenerasi*

Regenerasi merupakan hukum alam, yang satu diganti dengan yang lain, hal tersebut pada prinsipnya harus mendapat perhatian yang serius, artinya bahwa generasi penerus bangsa haruslah diperhatikan dengan baik, jika kita berkomitmen untuk menyudahi praktik-praktik yang cukup memalukan tersebut, namun beberapa decade ini penulis menilai bahwa perhatian terhadap generasi penerus bangsa masih sangat lemah, kita bisa lihat melalui pendidikan Formal (Sekolah) yang masih cenderung bersandar pada kurikulum yang materialistik, artinya bahwa para siswa/mahasiswa ditekan untuk mendapat prestasi yang cenderung formalistic/ materialistik.

2. *Organisasi*

Organisasi sebagai wadah individu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, artinya bahwa organisasi, baik organisasi kemahasiswaan intra/ekstra maupun organisasi kemasyarakatan memiliki peran yang cukup

signifikan terhadap pembentukan karakter seorang individu yang bergelut didalamnya, namun lagi-lagi sebagian besar dari organisasi tersebut mengalami disorientasi, walaupun pada dasarnya penulis menyadari bahwa organisasi harus dilihat dari ideologi yang dianut, namun penulis merasa bahwa pada prinsipnya organisasi dibentuk berdasar pada tujuan yang mulia, yakni untuk mewujudkan *Civil Society(masyarakat madani)* hal ini didasari dengan pengalaman penulis dalam beberapa organisasi kemahasiswaan yang pernah penulis amati, bahwa sebagian organisasi kemahasiswaan/ kemasyarakatan memiliki kecenderungan untuk berkompromi dengan kekuasaan yang korup.

3. *Reformasi Birokrasi*

Reformasi birokrasi merupakan satu hal yang cukup berpengaruh dalam proses pelayanan publik yang menekankan pada produktifitas pelayanan publik yang berdasar pada prinsip *Aqual Justice Under The Law*, namun dalam kajian sosilogi hukum andigium "*siapa dulu bapaknya*" menjadi realitas yang menyakitkan, begitupun dengan strata sosial, akan berpengaruh terhadap pelayan publik itu sendiri, hal ini penulis melihat masih sering terjadi pada pelayan publik di berbagai daerah di indonesia, praktik KKN masih sangat masif dilakukan oleh aparatus pemerintahan.

4. *System Partai Politik*

Partai politik merupakan salah satu syarat Negara yang menganut prinsip demokrasi, indonesia sebagai satu Negara yang menganut asas demokrasi, maka partai politik merupakan keniscayaan yang tidak bisa dibantah serta

diganggu eksistensinya, namun dalam beberapa dekade terkait dengan partai politik telah banyak menuai kritikan dari berbagai elemen, penulis melihat hal tersebut merupakan hal yang cukup wajar, karena penulis menganggap bahwa partai politik memiliki peran penting dalam menentukan arah dan wajah dari setiap kebijakan untuk menjadi standar dalam menjalankan setiap system pemerintahan(asas *legalitas*). Namun pada kenyataanya banyak kader dari partai politik itu sendiri yang tersandra oleh kasus korupsi oleh sebab itu penulis meyakini pemberantasan korupsi akan semakin maksimal jika elemen masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pemberantasan korupsi tersebut dengan berbagai upaya, diantaranya :

1. pendidikan kritis anti korupsi.
2. pendidikan demokrasi.

G. Korupsi Tak Kunjung Padam¹⁵⁰

Refleksi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Dimuat di Majalah Kauman DPP IMM. Muhammad Solihin S¹⁵¹ (Kepala Sekolah Madrasah Anti Korupsi Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan)

Korupsi telah berhasil merusak, menguras energi, membuat gaduh perjalanan panjang bangsa Indonesia. Memberantasnya merupakan satu bagian tersendiri yang begitu kompleks. Kacamata hitam yang paling buram, maka disana terlihat

¹⁵⁰ Dimuat di Majalah Kauman DPP IMM.

¹⁵¹ (muhammadsolihin98@yahoo.co.id) 081343999281

pemandangan yang menakutkan dalam memberantas korupsi. Lemahnya memberantas korupsi di Indonesia tergambar melalui data Corruption Perception Index (CPI) 2014, dirilis secara global oleh Transparency International menempatkan Indonesia sebagai negara dengan level korupsi yang tinggi.

Dalam CPI 2014, Indonesia menempati posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan skor 34 dari Skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Gambaran ambisi kotor para koruptor yang masih saja menggelisahkan rakyat Indonesia, dapat kita lihat dari beberapa kasus yang sempat menghebohkan negeri ini, Pertama Jaksa Urip Tri Gunawan dengan jabatan eselon III, menerima uang suap sebesar Rp 6,6 miliar. Kedua, Gayus Tambunan dan pegawai pajak golongan rendah (III-A) menggelapkan Keuangan Pajak lebih dari Rp100 miliar, namun mereka terhindar dari hukuman yang berat.

Praktik korupsi di Indonesia sudah diambang batas imajinasi kolektif bangsa, penyakit sosial ini sudah parah dan mengakar dalam Jiwa Sang Koruptor. Mereka seolah tidak takut dan bahkan merasa aman dalam melancarkan misinya. Tahun 2015 yang kita juluki sebagai tahun politik gaduh diwarnai dengan dinamika proses pemilihan Presiden ke-tujuh RI, dan proses pemilihan serentak di hampir 269 an pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Pemberantasan korupsi diujung kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga diawal pemerintahan Presiden Joko Widodo juga sangat menarik untuk diperhatikan.

Secara umum pada tahun 2015 dapat dikemukakan beberapa hal yang menarik untuk diperhatikan. Pertama, tidak ada peraturan perundangan Baru yang sudah

disahkan oleh pemerintah dan DPR ditujukan dan berkaitan dengan tindak pidana korupsi tetapi ada wacana yang cukup intensif untuk merevisi UU KPK, KUHP, KUHAP yang kemudian didesak dan dimasukkan dalam program legislasi nasional tahun 2015; Kedua, kasus-kasus yang dapat digolongkan sebagai big fishes yang ditangani KPK. Kesemuanya itu dapat menunjukkan derajat lingkup persoalan korupsi yang merasuk dalam sistem kekuasaan; Ketiga, dinamika yang sangat intensif antara Kabareskrim dengan KPK, seolah mengulang dinamika Cicak VS Buaya tapi tindak kriminalisasi yang terjadi justru terkesan tidak diselesaikan secara cepat oleh Presiden.

Sebenarnya Indonesia sempat mengalami fenomena yang monumental dalam pemberantasan korupsi khususnya dalam perspektif penindakan antara tahun 2013-2015. Dasar alasan yang menjadi justifikasinya adalah: Sekitar 16 kasus yang dihasilkan dari operasi tangkap tangan dimana para tersangka mempunyai Tatar belakang pejabat yang sangat luas dan beragam, mulai dari Ketua Mahkamah Konstitusi, Kalangan parlemen yang meliputi Ketua DPRD, anggota DPR sampai anggota DPRD serta ada juga Ketua partai. Dari kalangan peradilan meliputi Wakil Ketua Pengadilan dan hakim, Senior lawyer terkenal hingga panitera, Kepala Kejaksaan Negeri hingga anggota kepolisian; Dari kalangan eksekutif, mulai dari Gubernur sampai Bupati hingga kepala dinas serta kalangan perpajakan dan swasta.

Adapun pihak-pihak yang diproses KPK bukanlah orang biasa, mereka mempunyai posisi jabatan yang sangat tinggi dan strategic di berbagai lembaga negara maupun posisi yang terhormat di bidang ekonomi dan profesi. Selain itu,

persidangan Tipikor telah memeriksa dan memutus perkara yang sangat menarik perhatian publik, mulai dari kasus Bank Century yang menyidangkan Budi Mulya dalam kapasitas sebagai Deputy Gubernur BI hingga beberapa Ketua Partai besar di Indonesia. Disamping itu, pelemahan terhadap KPK juga tidak terhindarkan. Ada begitu banyak penilaian yang menyimpulkan terjadinya pembiaran terhadap "ketegangan" yang terjadi antara lembaga kepolisian dan KPK. Tidak ada kebijakan yang bisa menjadi "pemutus" sehingga sinergitas dapat dirajut kembali. Bahkan, dipandang, tindakan kriminalisasi terus terjadi begitu intensif seolah mendapatkan dukungan dari pemerintahan.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pemberantasan korupsi tak kunjung tegak, korupsi tak kunjung padam. Dinamika yang begitu intensif dalam penanganan kasus-kasus korupsi sepanjang tahun 2015 mempertontonkan perlawanan keras para koruptor terhadap KPK yang ditandai dengan kriminalisasi pimpinan KPK dan pelemahan KPK melalui semangat revisi UU KPK yang sangat menggebu-gebu.

Presiden sebagai kuasa tertinggi dalam penyelesaian berbagai konflik patutnya mampu secara tegas mengambil langkah, namun nyatanya peran itu tidak dimainkan dengan baik, presiden terkesan plin-plan dan tidak tegas. Akhirnya ketegangan terus bermunculan dengan derajat problematik yang luas dan mendalam. Suara rakyat yang terus bergemuruh meneriakkan protes dan tuntutan "Tank Mandat Rakyat" menjadi sebuah gambaran bahwa pemberantasan korupsi tak kunjung tegak, korupsi tak kunjung padam.

Meskipun demikian, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti. 2016 menjadi tahun penting untuk menjawab kegelisahan rakyat Indonesia. Wajah baru KPK yang dipimpin oleh Agus Raharjo mewarisi 5 kasus besar sebagai kado tahun baru, diantaranya kasus Bank Century, E-KTP, BLBI, ALKES, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Perang melawan koruptor akan berlanjut dan terus berlanjut, meskipun korupsi tak kunjung pandam.

Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita muak dengan koruptor, kita tidak sepakat dengan korupsi. salah satunya dengan terus melakukan kampanye anti korupsi. Upaya pemberantasan korupsi harus kita kerjakan secara berjamaah yang artinya melibatkan semua unsure terkait yang berkepentingan untuk melihat Indonesia tanpa korupsi. Lebih konkritnya upaya itu bisa berupa upaya pencegahan (preventif), upaya penindakan (kuratif), upaya edukasi masyarakat/ mahasiswa, dan upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Untuk melakukan pencegahan, hal utama yang harus disadari bahwa Jiwa nasionalisme yang mulai luntur menjadi sebuah ancaman, sehingga harus ditumbuhkan lagi dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan Negara melalui pendidikan dan pembinaan agama. Sejak dini sikap jujur harus ditanamkan bagi generasi Indonesia di semua level usia. Kantin kejujuran contohnya yang setiap hari melengkapi aktivitas di kantor KPK adalah sebuah contoh bahwa sesungguhnya masih ada harapan membangun Indonesia jujur. Pola hidup sederhana juga menjadi cara ampuh untuk mencega korupsi, disiplin dalam menjalankan tugas Negara dan tentunya harus dibarengi dengan system control yang efisien. Menciptakan aparatur

pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi itu akan mengurangi penggunaan anggaran yang berlebihan. Gemuknya struktur lembaga Negara belum tentu efektif dalam menjalankan tugas pemerintah, sehingga perlu reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jabatan di bawahnya.

Upaya Penindakan bagi mereka yang terbukti korupsi harus lebih ditingkatkan lagi, kinerja KPK yang telah menindak beberapa orang penting di negeri ini harusnya dipertahankan, jangan kemudian langkah penindakan itu diabaikan dengan dalih upaya pencegahan harus diutamakan. Keduanya harus berjalan beriringan. Penguatan Struktur hukum menjadi kunci utama dalam penindakan dan tentunya harus ditopang dengan penguatan substansi atau regulasi hukum. Struktur hukum yang dimaksud adalah lembaga berwenang dalam melakukan penindakan. Integritas, kualitas, dan intensitas pimpinan KPK dalam melakukan respon penindakan, menjadi bahan bakar utama dalam melakukan gebrakan, agar KPK kembali menjadi episentrum dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa juga sangat penting untuk memberantas perilaku korupsi. Masyarakat/ Mahasiswa tidak boleh apatis dan acuh tak acuh. Kita memiliki tanggungjawab yang sama untuk melakukan partisipasi politik dan control sosial terkait dengan kepentingan publik. Setiap kebijakan dari pemerintah mulai dari tingkat desa hingga tingkat pusat/ nasional harus tetap kita kawal. Membuka wawasan dan pemahaman yang luas tentang penyelenggaraan pemerintah Negara dan aspek-aspek hukumnya menjadi sesuatu yang harus kita

lakukan. Kita adalah subjek pembangunan, kita harus aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.

Membangun jejaring gerakan anti korupsi berbasis komunitas dan bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat akan memperkuat perlawanan kita pada koruptor. Indonesia Corruption Watch misalnya adalah sebuah LSM yang fokus melakukan gerakan anti korupsi. Pemuda Muhammadiyah dengan gerakan berjamaah melawan korupsi dan mandrasah anti korupsi, Transparency International (TI) dengan publikasi tahunannya dalam bentuk Laporan Korupsi Global.

Perlawanan harus terus digalang, karena Indonesia masih sangat memprihatinkan karena ulah koruptor. Tidak ada kata berhenti untuk melawan korupsi karena pemberantan korupsi tak kunjung tegak, korupsi tak kunjung padam.

H. Korupsi Musuh Kita Bersama

Moch. Fauzan Zarkasi (Ketua Garda Tipikor Periode 2014-2015)

Manusia Indonesia telah sepakat bernegara dalam balutan di bawah Ikrar Pancasila. "Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya, untuk Indonesia Raya..." begitu lah lagu kebangsaan di senandungkan. Layaknya sebuah gombalan nafsu yang disenandungkan oleh pemuda labil dalam menjalani pertempuran menemukan kepercayaan wanita agar dapat takluk di bawah janji nafsu yang telah diikrarkan. Dan negara subur, hingga Pulau Taman Firclaus menjadi jargon yang disematkan kepada wilayah Indonesia karena secara historis negara inilah yang memiliki

kekayaan alam tiada habisnya, seolaholah Tuhan menjadikan Indonesia menjadi anak bungsu yang dimanjakan dengan anugerah dan keberkahan yang amat luar biasa.

Tapi dalil telah mengungkapkan bahwa terkadang apa yang baik bagimu, bisa jadi buruk menurut Tuhan-Mu, dan apa yang buruk buatmu, bisa jadi baik menurut Tuhan-Mu. Tanggung jawab yang besar seniscayanya wajib menemukan pemimpin yang siap mengemban amanah dalam menghadapi risiko yang besar. Dari Kerajaan Hindu, Buddha, hingga Kerajaan Islam mengiringi langkah perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Seakan kita telah paham dengan sepi nilai luhur religius yang dibangun dalam jiwa bangsa Indonesia tapi ternyata kita telah mereduksi takdir.

Masa Kerajaan telah mengajarkan nilai luhur bahwa keberhasilan sebuah kerajaan ketika mampu berekspansi ke wilayah kerajaan lain, adapun masa penjajahan telah mengajarkan siapa yang berkawan mesra dengan seorang kolonial, maka ialah orang yang terpandang. Benang-benang sejarah inilah yang kemudian mendasari lahirnya tenunan pemahaman kepentingan pribadi lah di atas segala-galanya.

Masa Kemerdekaan telah meletakkan Pancasila dalam bingkai hukum bernegara. Layaknya sebuah bercak noda di atas tenunan individualism, sekali sikat, jiwa gotong-royong pun hilang. Sejarah telah mengajarkan berabad-abad bagaimana berperilaku individualism dan pragmatism sedangkan Indonesia barulah merdeka selama 70 tahun. Ini menjadi bahan renungan kita bersama.

Kita tidak ingin korupsi diistilahkan sebagai "budaya" bangsa. Akan tetapi, KBBI telah menggambarkan bahwa apa yang terjadi berulang-ulang dalam suatu

wilayah maka hal itu dapatlah dikatakan budaya. Lantas, bijaklah kita untuk menyadari bahwa kita sendirilah yang membentuk "budaya" korupsi disandingkan dengan Indonesia. Dari persoalan nyontek, salam tempel, titip absen, hingga menghormati seseorang berdasarkan tingkat materi yang dimiliki merupakan benang benang halus yang semakin memperlebar tenunan individualism dan pragmatism.

Gerakan Paripurna dalam pemberantasan korupsi haruslah lahir dari mereka yang telah selesai memimpin diri nya sendiri. Kita tidak boleh terus berdiam diri dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada lembaga anti rasuah semata. Tindakan dan naluri pemberantasan korupsi secara kolektif di masyarakat mampu memberikan dorongan moral dan meningkatkan optimisme bangsa. Mulailah komitmen pemberantasan korupsi dari diri sendiri agar anak cucu kita mampu merasakan kesejahteraan di kemudian hari. Janganlah putus asa, dan memaksakan kehendak untuk segera merasakan dampak perubahan secepat mungkin. Karena kalau kalian tidak mampu sabar dan komitmen dalam pemberantasan korupsi dikarenakan menginginkan dampak kesejahteraan sedini mungkin, maka pesannya sudah jelas kalian masih terjebak dalam TENUNAN PRAGMATISME!

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Muhammad & Muhammad Asrori. 2010. *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Media Grafika.
- A. Schumpter, Joseph. 2013. *Capitalism, Socialism and Democracy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. cetakan pertama. diterjemahkan oleh : Teguh Wahyu Utomo
- Akram, M, 2011, *Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Atas Dasar Perintah Jabatan Yang Sah*. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tidak Diterbitkan. 2011.
- Andito Dkk. 1998. *Menggusur Status Quo; Esai-esai Perjalanan Mahasiswa, Cendekiawan, dan Kelas Menengah Indonesia Dalam Menegakkan Demokratisasi dan Reformasi Di masa Orde Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Baswir, Revrison, 2006, *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik. "Proyeksi Penduduk Indonesia Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010". 24 Februari 2016. <https://bps.go.id>
- Chaeruddin, dkk, 2008, *Strategis Pencegahan dan Pengakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Cet.I*, Bandung: Refika Aditama.
- Djamali, Abdoel. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fatah, Eep Syaifulloh, 2004. *Mencintai Indonesia Dengan Amal: Refleksi Atas Fase Awal Demokrasi* Jakarta: Republika.
- Gie, Soe Hok. 1969. *Generasi Yang Lahir Setelah Tahun Empat Lima*. Kompas. 17 Agustus
- Gie, Soe Hok. 2011. *Catatan Seorang Demonstran*. Jakarta: LP3ES.

- Gunawan. Yopi dkk.2015. *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung:PT. Rafika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2008. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hariyono, 2014,*Ideologi Pancasila "Roh Progresif Nasionalisme Indonesia"*, Malang: Intrans Publishing.
- H.Abdullah. 2011. *Sosiologi Pendidikan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ilmar, Aminuddin. 2012. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta:Kencana. Cetakan pertama.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2015. *Melawan Kekuasaan*. Yogyakarta:Rangrang Education.
- L Binawan,A1-Andang, 2006,*Korupsi Kemanusiaan: Menafsirkan Korupsi Dalam Masyarakat*, Jakarta: Kompas.
- Librayanto, Romi. 2010. *Ilmu Negara*. Makassar: Refleksi Pustaka.
- Lopa, Baharuddin, 2001,*Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas.
- Lubis, M. Solly. 1982. *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.
- Magnis-Suseno, Franz.2010. *Arus Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Cetakan Kedelapan.
- Makawimbang, Hernold Ferry. 2015. *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*. Yogyakarta: Thafamedia.
- Manan, Abdul, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Mustofa, Muhammad. 2010. *Kleptokrasi: Persekongkolan Birokrat-Korporasi sebagai Pola White-Collar Crime di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi; Dan Sosiologi Klasik Sampai perkembangan Terakhir Postmodern; Edisi kedelapan* 201.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Rais, M. Amien, 1999, *Menyingkap korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia*, Jogjakarta: Aditya Media.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007.
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik & Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Soebagio, Muhammaddkk. 1987. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta :CV. Akademika Pressindo.
- Soehino. 1986. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Sopiah. 2008. *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: ANDI.
- Sujata, Antonius, 2000, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Djambatan.
- Suratman, Maman. 2015. *Kesaksian Kisah Perlawanan Mahasiswa UTY*. Yogyakarta: Human-Liberty.
- Surachmin dan Suhandi. 2013. *Strategi dan Teknik Korupsi: Mencegah untuk Mengetahui*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Tjaya, Hidya, dan J. Sudarminta, 2005, *Menggagas Manusia Sebagai Penafsir*, Jogjakarta: Kanisius.
- Trijono, Lambang. 2007. *Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konfli*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pragiwaksono, Pandji. 2013. *Berani Mengubah*. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka.
- Prasetyo, Eko. 2015. *Bangkitlah Gerakan Mahasiswa*. Malang: Intrans Publishing.
- Prodjohmidjojo, Martiman, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Clam Delik Korupsi*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Tutik, Titik Triwulan dkk. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Weber, Max. 2015. *Etika Pro testan dan Semangat Kapitalism*. Yogyakarta: Narasi. Cetakan Pertama. Diterjemahkan oleh : Yusup Priasudiarja.

Wiyono, R.2009.*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ed. 2.*Jakarta: Sinar Grafika.

Zastrouw, Al, 1988, *Reformasi Pemikiran: Respon Kontemplatif dalam Persoalan Kehidupan*, Jogjakarta: LKPSM.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

MEDIA MASA DAN INTERNET

Aid. *Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime dan Tugas Yuridis Para Hakim*. 25 Februari 2016. bawas.mahkamahagung.go.id/portal/component/content/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/323-korupsi-sebagai-extra-ordinary-crime-dan-tugas-yuridis-para-hakim.

Anonim,2014, "Pengertian Pendidikan" . academia.edu. diakses pada 29 Februari 2016 pukul 13.20 <http://kbbi.web.id/sekolah> diakses pada tanggal 1 Maret 2016 pukul 20.45

Anonim. 2015. *Tren Pemberantasan Korupsi Semester I 2015*. Buletin Mingguan Anti Korupsi Edisi 14-18 September 2015. (online)<http://www.antikorupsi.org/id/content/buletin-mingguan-antikorupsi14-18september-2015> , diakses pada tanggal 13 Maret 2016 pada pukul 14.41

Anonim, *Keadaan Pendidikan Indonesia Saat Ini*, Jakarta:Koran Antara, At available <http://www.antaranews.com/berita/467070/mendikbud-pendidikan-indonesia-dalam-kondisi-gawatdarurat>, diakses pada 17 Maret 2016.

Esra, Kudubun Elly. *Fungsi dan Peran Lembaga Kemahasiswaan*.09 Maret 2016. <http://elлыкudubun.wordpress.com/2011/09/23/fungsi-peranlembaga-kemahasiswaan/>.

Dwiheryana, Reno. *Extraordinary Crime - Extraordinary Law*. 25 Februari 2016. http://www.kompasiana.com/santarosa/extraordinary-crimeextraordinary-law_55487d3eaf7e616e0a8b4593.

Purmana, Geowana Yuka. "Peran Fungsi dan Posisi Mahasiswa". 14 Maret 2016.<https://geowana.wordpress.com/2008/08/10/peran-fungsi-posisi-mahasiswa/>.

Nugroho, Azis. "Perandan Fungsi Mahasiswa" <http://catatanaktivismuda.blogspot.co.id/2013/08/peran-fungsi-mahasiswa-pfm.html>

MPR. "Zulkifli : Indonesia Menghadapi Persoalan Keadilan Yang Sangat Pelik". 24 Februari 2016. https://mpr.go.id/posts/zulkifli_indonesia_menghadapi_persoalan_keadilan_yang_sangat_pelik

Suseno, Andrian. "Soekarno: Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri" 23 Februari 2016. <https://andrian-suseno.blogspot.com/2013/09/soekarno-perjuanganku-lebihmudah.html?m=1>

Wikipedia. "Daftar Negara Menurut Jumlah Penduduk". 24 Februari 2016. https://id.wikipedia/wiki/daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk.

Wikipedia. "Suku Bangsa Di Indonesia". 24 Februari 2016. https://id.wikipedia/wiki/daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk.

Wikipedia. "Sumber Daya Alam". 23 Februari 2016. https://id.wikipedia.org/wiki/sumber_daya_alam.

Indeks

A

absolut 14, 178
abuse of power 5
Accountability 5
Agent of change 126
Agent of Change 47, 126, 131
akumulasi modal 38, 175
alienasi sosial 37
Anthony Giddens 50
anti-globalisasi 38
aristokrat 14
Aristoteles 2, 26

B

bangsa asing 41, 43, 76

C

Carl J. Friesrich 3
civil society 15, 129
conspiracy theory 34
corruptio 2
corruptus 2
cultural capital 50

D

David J. Olson 2
Discretion 5

E

economic capital 50
eksploitasi ekonomi 37
elit elit politik 9
epistemologi 15

F

formalitas 19, 23, 157, 159

G

globalis 10
globalisasi 38, 51, 52, 132,
149, 151
good governane 15
grand corruption 7
group psychology 11
Guardian of value 123, 127

H

Hegemoni 51, 56, 57

I

ideologi 45, 51, 56, 126, 184
Immanuel Wallerstein 38
imperialisme 37
inkulsif 15
intervensi 35, 64, 141
intimidasi 6
iron stock 127

J

Jacob van Klaveren 3
Jhon A. Gridiner 2
John Locke 26

K

kapitalis 24, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 34, 35, 36, 37, 38,
44, 48, 58, 63, 64, 122
Kapitalis vii, 23, 27, 34, 47
kapitalisme 33, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 47, 48,
61, 120
keadaan sosial 27, 127
kebenaran psikologis 17
kebutuhan sosial 38
kelas sosial 23, 168
kolonialisme budaya 53
komitmen sosial 21
konklusi 18
konotasi negatif 37
konsensus 69
konsultasi 87
konspirasi 34, 35, 130
konspirator 34
konsumtif 55, 58
korporasi 5, 7, 38, 91, 95, 100,
168
korupsi vi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 20, 21, 54,
58, 59, 72, 73, 74, 78,
85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96,
98, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 112,
113, 115, 125, 129, 130,
131, 138, 139, 140, 141,

142, 143, 146, 147, 148,
151, 159, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 197, 199, 212,
213, 214

kultur hukum 79, 82, 83, 84,
85, 108, 109, 111, 112,
115, 116

L

legitimasi 3, 175

M

magnum opus Das 37
manipulasi 6, 56, 157
Marxis Richard D. Wolff 38
mental inlander 13
modernis 10
monopoli 37
Monopoly 5
moralitas 11, 16, 17, 103, 174
Moral Value 47

N

nasionalisme 10, 120, 153,
157, 173, 190

O

objektif 12, 19, 88, 142, 214
oligarki 37, 54, 59, 61, 73
oligopoli 37
ornamen 19

P

paradoks 52, 53, 58, 109
pemberantasan korupsi vi, 15,
17, 18, 21, 74, 78, 85,
90, 102, 125, 139, 140,
169, 178, 180, 181, 182,
185, 187, 188, 189, 191,
194
penyakit demokrasi 4
penyuapan 2, 3, 6
perekonomian negara 5, 6, 7,
91, 92, 97, 100, 101,
106
perilaku masyarakat 6, 16
petty corruption 7
plural 10
Pola pikir 19
politik 3, 6, 9, 12, 13, 34, 35,
37, 45, 46, 49, 51, 53,
54, 56, 58, 61, 62, 63,
64, 107, 110, 114, 116,
122, 130, 173, 174, 175,
176, 182, 185, 187, 191,
213
Propaganda vii, 47, 53, 55,
206, 209, 216
prosedural 9, 84

R

representasi 6, 128

S

sanksi etika 33
sejarah 2, 11, 34, 36, 49, 64,
72, 76, 84, 117, 120,
137, 139, 192, 193
social capital 50

Social Control 47

social of control 127

sosial 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18,
20, 21, 22, 23, 26, 27,
29, 34, 37, 38, 47, 49,
50, 51, 52, 53, 55, 60,
62, 65, 67, 70, 82, 98,
102, 105, 106, 107, 108,
109, 111, 113, 114, 122,
123, 127, 128, 130, 131,
134, 137, 139, 140, 142,
153, 167, 168, 170, 174,
175, 184, 186, 191

standar kehidupan 33

struktural 21, 56, 72, 75, 182

subyektivitas 17

T

Theodera M. Smith, 3

tingkah laku 19, 148, 149, 162,
164

tradisonalis 10

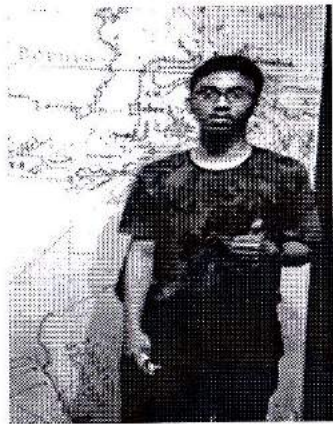
W

Wertheim 14

BIODATA PENULIS



Hamzah Halim adalah pengajar pada Fakultas Hukum universitas Hasanuddin. Menulis buku antara lain: *Persekongkolan Rezim Politik Lokal Studi Atas Relasi Eksekutif dengan Legislatif Daerah*, (2009); *Politik Hukum Pertanahan Konsepsi Teoritik Menuju Artikulasi Empirik* (2009); *Cara Praktis Menyusun dan Membuat Peraturan Perundang-undangan* (2009); *Memahami Legal Audit dan Legal Opinion*, (2015). Penulis juga menjadi editor berbagai buku hukum dan Menulis Beberapa artikel di Jurnal Ilmiah ilmu Hukum. Penulis mendalami berbagai panduan praktis mengenai penyusunan berbagai peraturan dan psikologi hukum.



A.Muh. Agil Mahasin, lahir di Makassar pada tanggal 14 Juni 1995. Menyelesaikan pendidikan dasar di SD Islam Athirah Bukit Baruga tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Islam Athirah pada tahun 2010, lalu melanjutkan pendidikan di SMA Ar-Rohmah Malang. Saat ini tengah menjalankan studi strata 1 di Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin. Pada saat SMA menjadi Ketua OSIS SMA A-Rohmah Malang, lalu aktif bergelut di organisasi pecinta alam SMA Ar-Rohmah, saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (Garda Tipikor), Koordinator Internal Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata (AMPUH) juga sempat aktif sebagai Wakil Menteri Advokasi di Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2015/2016, Menjadi salah satu inisiator organisasi Anti Korupsi se-Indonesia.

Motto : "Kepuasan tidak merujuk pada bilangan pencapaian, melainkan pada keyakinan yang mengantarkan diri pada proses yang mendewasakan"



Imannul Yakin lahir di Dompu pada tanggal 7, Juli, 1995, menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 3 Dompu pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di SMPN 2 Dompu pada tahun 2010, lalu melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Dompu pada tahun 2013. Saat ini tengah melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin. Sementara menjabat sebagai koordinator Advokasi dan Monitoring Garda Tipikor FH-UH

Motto: "Jika diam adalah emas, maka aksi nyata melampaui emasnya diam."



Musthakim Algozaly, lahir di Soroako, 28 Januari 1995. Menyelesaikan SD YPS Lawewu Soroako pada tahun 2007. Kemudian, melanjutkan pendidikan SMP YPS Singkole dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMA YPS Soroako dan lulus pada tahun 2013. Sementara kuliah di Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum angkatan 2014. Pada saat SMA aktif sebagai pengurus OSIS dan Ketua Ekstrakurikuler Sepak Bola. Saat ini aktif sebagai Wakil Koordinator Isu dan Propaganda Garda Tipikor 2015/2016 FH-UH, anggota UKM Sepak Bola FH-UH, mengikuti Bastra HMI yang diadakan Komisariat FKM-UH, aktif sebagai Tenaga Tutor Bimbingan Belajar JILC. *Motto: "Hasil ternikmat bermateri perjuangan yang hebat."*



Annisa Fadhilah Rosadi, lahir di Ujung Pandang , 04 September 1995. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Mangkura I Makassar pada tahun 2008, lalu melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 03 Makassar dan lulus pada tahun 2011. Kemudian, melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 02 Makassar dan lulus pada tahun 2014. Sementara menempuh Pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas HAsanuddin angkatan 2014. Pada saat SMA menjadi Ketua Site.Com periode 2012-2013, dan

menjabat sebagai sekretaris umum OSIS periode 2012-2013. Saat ini aktif di ALSA LC Unhas sebagai secretary of manager MootCourt Department periode 2015-2016, Koordinator Dana dan Usaha Garda Tipikor Fakultas Hukum Unhas 2015-2016.



Alvira Aslam, lahir di Polewali, 03 Juni 1996. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 001 Polewali pada tahun 2008. Kemudian, melanjutkan di SMPN 1 Polewali dan lulus pada tahun 2011. Lalu, melanjutkan pendidikan SMAN 1 Polewali dan lulus pada tahun 2014. Sementara saat ini menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada saat SMA menjadi Duta Lingkungan Hidup periode 2012-2013 dan Duta Forum Anak Sulbar 2013. Saat ini aktif sebagai pengurus Garda Tipikor Fakultas Hukum Unhas dan Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Unhas.

Motto : Cerdas di Otak, Fasih di Lisan, Terampil di Tangan, Santun di Sikap



Andi Ulfah Insyirahutami, lahir di Ujung Pandang, 30 September 1996. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 28 Tumampua Pangkep pada tahun 2008. Kemudian, melanjutkan di SMP Pesantren Modern Putri IMMIM dan lulus pada tahun 2011. Lalu, melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 8 Makassar lulus pada tahun 2014 . Pada saat di SMK aktif menjadi anggota organisasi Lingkungan Sekolah Bebas Narkoba (LSBN). Sementara ini menempuh pendidikan strata 1 di Universitas Hasanuddin Makassar.

Motto : Respect to each other



Ilmanbahri Widyananda Mansyur lahir di Majene pada tanggal 15 November 1993, menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 2 Kampung Baru Majene pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di SMPN 2 Kampung Baru Majene, lalu menyelesaikan pendidikan di SMAN 1 Majene pada tahun 2012. Saat ini tengah melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sementara menjabat sebagai koordinator Isu dan Propaganda Garda Tipikor FH-UH. Dan Sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Umum pada Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia (IM3I) periode 2014-2015.

Motto: Mengubah sesuatu harus di mulai dari dalam diri.



Muh. Fauzi Ashary, lahir di Ujung Pandang, 10 September 1996. Menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri Minasa Upa dan SD Inpres Unggulan Komp.Pemda pada tahun 2008. Kemudian, melanjutkan pendidikan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta dan selesai di SMP YP PGRI Disamakan Makassar 2011. Selanjutnya, menempuh pendidikan SMA Negeri 8 Makassar. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Angkatan 2014. Sewaktu SMA pernah menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS SMANegeri 8 Makassar periode 2012-2013, Wakil Ketua Remaja Mesjid BaitulMu'minin periode 2012-2013. Saat menjabat sebagai Wakil Koordinator Humas Garda Tipikor FH-UH periode 2015-2016, Wakil Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Basket FH-UH periode 2015-2016, Anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Motto: *Bersabarlah, semua akan indah pada waktunya*



Muhammad Reza Murti, lahir di Watansoppeng, 23 November 1996. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 24 Lapajung pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Watansoppeng dan lulus pada tahun 2011. Selanjutnya, bersekolah di SMAN 1 Watansoppeng dan lulus

pada tahun 2014. Sementara melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2014. Sewaktu SMA menjadi salah satu Purna Paskibra. Saat ini aktif di organisasi Garda Tipikor FH-UH, ALSA LC Unhas.

Motto: Tuhan selalu mendukung pada jalan yang benar.



Rahmat Kurniawan, Lahir di Rappang, Kabupaten Sidrap pada tanggal 22 April 1995. Menyelesaikan pendidikan dasar di SD 1 Benteng tahun 2007, kemudian melanjutkan ke SMP 1 Pancarijang dan lulus pada tahun 2010. Lalu melanjutkan pendidikan ke SMA 1 Pancarijang dan lulus sebagai pada tahun 2013.

Sempat kuliah di Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris UIN Alauddin. Pada tahun 2014, pindah ke Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Aktif di organisasi Palang Merah Remaja pada saat SMA, saat ini tercatat sebagai pengurus di beberapa organisasi.

Motto: "Lakukan dengan serius apapun yang dikerjakan, walau hidup adalah permainan tapi kita hidup bukan untuk main - main"

LAMPIRAN

GERAKAN RADIKAL ANTI TINDAK PIDANA KORUPSI (GARDA TIPIKOR)

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin



VISI DAN MISI

GERAKAN RADIKAL ANTI TINDAK PIDANA KORUPSI (GARDA TIPIKOR)

- **VISI**
Menjadi lembaga yang proaktif dan komitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
- **MISI**
 1. Membina generasi muda yang memiliki kepedulian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
 2. Mengembangkan potensi kreativitas dan

keilmuan anggota dalam bidang tindak pidana korupsi.

3. Menjadi pelopor kegiatan- kegiatan yang bersifat pemberantasan segala bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia.
4. Melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi yang memiliki semangat dan kepedulian terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

PROFILE GERAKAN RADIKAL ANTI TINDAK PIDANA KORUPSI (GARDA TIPIKOR)

Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi atau biasa di singkat menjadi GARDA TIPIKOR merupakan suatu organisasi kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berstatus non-pemerintah dan non-politik. Garda Tipikor didirikan sejak 6 maret 2005 berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, makassar.

Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi atau Garda Tipikor dipegang oleh satu orang ketua umum dan dibantu oleh empat orang wakil ketua yang telah memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing. Ketua umum juga dibantu oleh seorang sekretaris dan wakil sekretaris serta seorang bendahara yang juga telah memiliki tugas dan tanggungjawab sendiri dalam meningkatkan rasa solidaritas juga kerjasama dalam

organisasi.

Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi atau Garda Tipikor bersifat terbuka bagi siapa saja yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, yang bersifat independen, objektif, dan rasional dan berfungsi sebagai organisasi kader dan perlawanan terhadap segala bentuk praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Adapun yang layak menjadi anggota Garda Tipikor adalah mereka yang berstatus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan memiliki kepedulian terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang bersifat independen, objektif, dan rasional yang terdaftar secara administratif, dan telah mengikuti prosesi penerimaan anggota GARDA TIPIKOR.

Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi atau Garda Tipikor memiliki beberapa tahap dalam proses penerimaan anggota baru yaitu open recruitment anggota, pelatihan, dan pengukuhan secara resmi oleh Dewan Pembina Organisasi. Garda Tipikor telah menyelenggarakan beberapa kegiatan yang sangat bermanfaat bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sendiri.

**SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
GERAKAN RADIKAL ANTI TINDAK PIDANA
KORUPSI**

DEWAN PELINDUNG

DR. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H.,M.Si., M.H.

DEWAN PEMBINA

DR.Hamzah Halim,S.H.,M.H.

Prof. DR.Slamet Sampurno Soewondo

DR.Muhammad Hasrul,S.H.,M.H.

Adnan Purichta Ichsan YL, S.H.

DEWAN PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN

Andi Kartika Ramadhani

Moch. Fauzan Zarkasi

Moch. Ichwanul Reiza

Muh. Nur Fajrin

Hawariyah

KETUA UMUM

Muh. Fazlurrahman K

WAKIL KETUA UMUM

A Muh Agil Mahasin

Fahmi Subarkah

Rifqi Ibsam

Inpebriansyah Bakrie

SEKRETARIS UMUM

Rini Wahyuningsih

WAKIL SEKRETARIS UMUM

Nurul Fadhilla

BENDAHARA UMUM

Alisyah Izdiyar Nabighah

DIVISI-DIVISI

Divisi Isu dan Propaganda

Koordinator : Ilman Bahri

Wakil Koordinator : Musthakim Algozaly

Anggota : Muhammad Agung

Nelson Sirenden

Refah Kurniawan

Muhammad Mubarak Cadika Putra

Sainuddin

Muh. Harry Mappangara

Muh. Reza Al-Tauhid

RusShinta

Muhammad AkramSyarief

Divisi Kaderisasi Dan Kelembagaan

Koordinator : Kharismawati

Wakil Koordinator : Andis Kapati

Anggota : Agung Tri Putra

Iyas Manggala Ayyubi

Nur Yuliyah Rizqi

Muh. Agung Wijaya

A.Srikandi MPB

Muhammad Idham Chalid

Nur Fadli Hamka
A. Dzaral Al Ghifari
DwiPuspitaMustamin

Advokasi Dan Monitoring

Koordinator : Imanul Yakin
Wakil Koordinator : Rahmat Kurniawan
Anggota : Muhammad Yunus Fadli
Muhammad Akib Razak
Riska Sari
Ashar Asyari Zaenal
Andi Chaerunnisyah
A. Muh. Irvan Alamsyah
Nurul Anisa
Jumar
Hendri
Rayhanah Firabi

Divisi Pengabdian Dan Pendidikan

Koordinator : Muh Zulfikar N
Wakil Koordinator : Farid Muhammad
Anggota : Muhammad Yunus Fadli
Yudi Hermawan
Muhammad Ivantri
Muhammad Fachrullikhsan
Fahrul Ahmad
Irwan Akbar
Muhammad Ali Suneth
A. Selviani Sandriani
Ahmad Fauzi
Muh. Fauzy Mustari

Nursheila Muis

Divisi Hubungan Masyarakat

Koordinator : Muh. Reza Murti
Wakil Koordinator : Muh. Fauzy Ashary
Anggota : Muh. Chaidir Ali
Tri Indriyani P
Riska Dahir
Hikmah Nur Rahma
Nikita Ahmady
Bintang Maha Putra
Muh. Idris
Sukria Indah Lestari
Muhammad Grady Muttaqien
Achmad Halifkah M

Divisi Komunikasi dan Informasi

Koordinator : Akbar Dondo
Wakil Koordinator : Aulia Fathanah
Anggota : Edi S. Makkasau
Fadli Fathurrahman
Abdullah Fatih
A. Yuniarti B
Eka Fitriyaningsih
Nursuci Febriani
Nur Aryastuti
Nurul Afiah Idrus
Armelia Syafira

Divisi Kesekretariatan

Koordinator : **Andi A Adi Surya**
Wakil Koordinator : **Annisa Septiani Rahma**
Anggota : **Dhanik Ayu Reashita P**
Sanisa Maharani
M. Khaerul
Nurul Syafika
Sunarti Sudirman
Zainuddin
Dian Febrina
Harmonika
Fadel Muhammad
NurHidaya
Nurul Hasanah
A. RifqiNur Mukhtar

Divisi Dana dan Usaha

Koordinator : **Annisa F Rosadi**
Wakil Koordinator : **St. Hana Syafitri**
Anggota : **Gagah Budi Agung**
Arie Richfan R
Alvira Aslam
Agnes Somi Hurint
Aulia Insana Tubagus
Nur Aliyah
Bagas Julnizar Bakhtiar
Asfirawati
Mastura Azizah
Ekarini Septiana
Sariwana
A. Mattangkilang



KEJAHATAN KORUPSI

Tim Penulis

Hamzah Halim
Imannul Yakin
Rahmat Kurniawan
Andi Ulfah Insyirahutami
Annisa Fadhilah Rosadi
Alvira Aslam

A.Muh. Agil Mahasin
Musthakim Algozaly
Ilmanbahri Widyananda Mansyur
Muh. FauziAshary
Muhammad Reza Murti

Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (GARDA TIPIKOR) merupakan suatu organisasi kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berstatus non-pemerintah dan non-politik. Garda Tipikor didirikan sejak 6 maret 2005 berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, makassar. Beranggotaan aktivis kampus yang memiliki komitmen pada gerakan anti korupsi

Diterbitkan atas kerjasama:

